



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KOTA TANGERANG SELATAN**



WALI KOTA TANGERANG SELATAN

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dapat disusun dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024. Laporan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja tahunan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi Kota Tangerang Selatan yaitu Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif Dan Efisien, serta misi Kota Tangerang Selatan yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi, Membangun Kota yang Lestari, Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif dan Membangun Birokrasi yang Unggul. Hasil pencapaian kinerja pemerintah Kota Tangerang Selatan ini tidak terlepas dari kerja sama antara aparaturnya pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2024. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan serta perencanaan program dan kegiatan untuk tahun mendatang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Tangerang Selatan, 24 Maret 2025

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

BENYAMIN DARNIE

Laporan Kinerja Instansi Tahun 2024
Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan ini disusun selaras dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2021–2026 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024, yang berorientasi pada hasil dan menjawab isu-isu strategis. Melalui laporan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh gambaran yang transparan mengenai perkembangan pembangunan, pencapaian target, serta berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian tujuan dan sasaran yang diukur mencakup 5 indikator tujuan dan 24 indikator sasaran.

Dari 5 indikator tujuan utama, sebanyak 4 indikator telah memenuhi target, sementara 1 indikator belum mencapai target. Sementara itu, dari 24 indikator sasaran, terdapat 15 indikator yang memenuhi target, sedangkan 9 indikator lainnya belum mencapai target. Adapun capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dijelaskan sebagai berikut.

1. Tujuan 1 telah memenuhi target dengan capaian indikator indeks pembangunan manusia sebesar 84,16%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 83,70%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 100,55%.
Rincian capaian sasaran yang mendukung tujuan 1 adalah sebagai berikut:
 - a. capaian indikator kinerja sasaran indeks pendidikan mencapai 80,83%, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 80,83%. Dengan demikian, capaian kinerja ini mencapai 100% dan masuk dalam kriteria "memenuhi target";
 - b. capaian indikator kinerja sasaran angka harapan hidup mencapai 75,80 tahun, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 75,84 tahun. Dengan capaian sebesar 99,95%, indikator ini masuk dalam kriteria "tidak memenuhi target";
 - c. capaian indikator kinerja sasaran indeks pembangunan keluarga berada pada kategori "sangat baik" dengan nilai 84,16, melampaui target yang ditetapkan sebesar 70 "baik". Dengan capaian 120,23%, indikator ini masuk dalam kriteria "memenuhi target";
 - d. capaian indikator kinerja sasaran indeks pembangunan pemuda mencapai 55,86 poin, melampaui target yang ditetapkan sebesar 55,00 poin. Dengan persentase capaian sebesar 101,56%, indikator ini masuk dalam kriteria "memenuhi target";
 - e. capaian indikator kinerja sasaran indeks pembangunan gender mencapai 93,96 poin, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 94,53 poin. Dengan capaian sebesar 99,40%, indikator ini masuk dalam kriteria "tidak memenuhi target"; dan
 - f. capaian indikator kinerja sasaran indeks pemberdayaan gender mencapai 72,67 poin, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 73,86 poin. Dengan capaian 98,39%, indikator ini masuk dalam kriteria "tidak memenuhi target".
2. Tujuan 2 telah memenuhi target, dengan capaian indikator indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar sebesar 8,29 poin, melampaui target yang ditetapkan sebesar 7,03 poin. Dengan capaian 117,92%, indikator ini menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Rincian capaian sasaran yang mendukung tujuan 2 adalah sebagai berikut:

- a. capaian indikator kinerja sasaran rasio konektivitas kota mencapai 0,93 poin, melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,89 poin. Dengan capaian 104,49%, indikator ini masuk dalam kriteria "memenuhi target"; dan
 - b. capaian indikator sasaran kinerja lalu lintas/transportasi kota (*v/c ratio*) mencapai 0,54, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 0,54. Dengan capaian 100%, indikator ini masuk dalam kriteria "memenuhi target".
3. Tujuan 3 belum memenuhi target, dengan capaian indikator indeks kota layak huni sebesar 70,03 poin, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 71,77 poin. Dengan capaian 97,58%, indikator ini masih perlu ditingkatkan.

Rincian capaian sasaran yang mendukung tujuan 3 adalah sebagai berikut:

- a. capaian indikator sasaran indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 61,03 poin, melampaui target yang ditetapkan sebesar 60,66 poin. Dengan capaian 100,61%, indikator ini masuk dalam kriteria "memenuhi target";
 - b. capaian indikator kinerja sasaran persentase permukiman layak huni mencapai 99,6%, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 99,69%. Dengan capaian 99,91%, indikator ini masuk dalam kriteria "tidak memenuhi target";
 - c. capaian indikator kinerja sasaran cakupan pengelolaan sampah mencapai 99,54%, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 100%. Dengan capaian 99,54%, indikator ini masuk dalam kriteria "tidak memenuhi target".
 - d. capaian indikator sasaran ruang terbuka hijau publik mencapai 8%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,59%. Dengan capaian 174,29%, indikator ini masuk dalam kriteria "memenuhi target";
 - e. capaian indikator sasaran indeks rasa aman berada pada kategori "aman" dengan nilai 66,97, sesuai dengan target yang ditetapkan "aman" dengan nilai 66,97. Dengan capaian 100%, indikator ini masuk dalam kriteria "memenuhi target";
 - f. capaian indikator indeks demokrasi 86,04 dari target 81 dengan persentase capaian 106,22%, sehingga indikator ini telah "memenuhi target"; dan
 - g. capaian indikator kinerja sasaran indeks risiko bencana berada pada kategori "sedang" dengan nilai 68,10, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam kategori "rendah" dengan nilai 60. Dengan capaian 86,5%, indikator ini masuk dalam kriteria "tidak memenuhi target".
4. Tujuan 4 telah memenuhi target, dengan capaian indikator indeks daya saing daerah berada pada kategori "sangat tinggi" dengan nilai 3,81, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 3,81. Dengan capaian 100%, indikator ini masuk dalam kriteria "memenuhi target".

Rincian capaian sasaran yang mendukung tujuan 4 adalah sebagai berikut:

- a. capaian indikator sasaran nilai sektor ekonomi kreatif mencapai 14,68 triliun rupiah, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 14,68 triliun rupiah. Dengan capaian 100%, indikator ini masuk dalam kriteria "memenuhi target";
- b. capaian indikator sasaran nilai investasi tahunan mencapai 8,47 triliun rupiah, melampaui target yang ditetapkan sebesar 7,44 triliun rupiah. Dengan capaian 113,84%, indikator ini masuk dalam kriteria "memenuhi target";
- c. capaian indikator sasaran produktivitas tenaga kerja per total *output* mencapai Rp186.503.283,34 dari target yang ditetapkan sebesar Rp169.838.260, dengan capaian 109,81%, indikator ini masuk dalam kriteria "memenuhi target"; dan

- d. capaian indikator sasaran produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa mencapai Rp118.560.796,91, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp.109.284.473. Dengan capaian 108,49%, indikator ini masuk dalam kriteria "memenuhi target".
5. Tujuan 5 telah memenuhi target, dengan capaian indikator indeks reformasi birokrasi sebesar 85,61 poin, melampaui target yang ditetapkan sebesar 76,79 poin. Dengan capaian 111,49%, indikator ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Adapun rincian capaian sasaran yang mendukung tujuan 5 adalah sebagai berikut:
 - a. capaian indikator sasaran nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memperoleh kategori B dengan nilai 69,06, di bawah target yang ditetapkan pada kategori BB. Dengan capaian 98,66%, indikator ini masuk dalam kriteria "tidak memenuhi target";
 - b. capaian indikator sasaran nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah mencapai 3,54 poin, di bawah target yang ditetapkan sebesar 4 poin. Dengan capaian 88,5%, indikator ini masuk dalam kriteria "tidak memenuhi target";
 - c. capaian indikator sasaran opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan capaian 100%, indikator ini masuk dalam kriteria "memenuhi target";
 - d. capaian indikator sasaran indeks persepsi korupsi/survei penilaian integritas yang dikeluarkan oleh KPK RI mencapai 76,25 poin, di bawah target yang ditetapkan sebesar 84 poin. Dengan capaian 90,77%, indikator ini masuk dalam kriteria "tidak memenuhi target"; dan
 - e. capaian indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat mencapai 90,25%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 89,87%. Dengan capaian 100,42%, indikator ini masuk dalam kriteria "memenuhi target".

Realisasi anggaran Kota Tangerang Selatan yang mencapai 96,72%, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,45%, mencerminkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi sumber daya untuk pembangunan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi Kota Tangerang Selatan dalam menyikapi hasil pencapaian akuntabilitas kinerja di masa mendatang, di antaranya sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, diperlukan perencanaan yang berbasis data akurat, berorientasi hasil, serta mampu menjawab isu strategis yang dihadapi. Selain itu, koordinasi yang erat antar perangkat daerah penting untuk menyelaraskan kebijakan, mencegah tumpang tindih program, serta memastikan setiap langkah pembangunan berjalan secara efektif dan efisien.
2. Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap indikator yang belum mencapai target guna mengidentifikasi penyebab utama. Pemahaman mendalam terhadap faktor penghambat akan memungkinkan pemerintah merancang strategi perbaikan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pengalokasian sumber daya tambahan serta penyesuaian kebijakan menjadi langkah strategis dalam mengatasi kendala yang ada. Berikut adalah saran upaya perbaikan untuk masing-masing indikator tujuan:

- a. untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengatasi tantangan seperti akses kesehatan dan pendidikan yang belum merata serta ketimpangan pendapatan, diperlukan kebijakan yang lebih terfokus. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperluas cakupan layanan kesehatan dengan menambah fasilitas di wilayah minim akses, memberikan pelatihan dan pendampingan usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperkuat subsidi pendidikan guna memastikan kesempatan belajar yang merata. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pertumbuhan IPM Kota Tangerang Selatan semakin optimal dan berkelanjutan;
- b. upaya meningkatkan kepuasan layanan infrastruktur dasar seperti mengatasi kemacetan, keterbatasan transportasi umum, dan kualitas jalan yang belum optimal diperlukan berbagai upaya strategis. Pelebaran jalan di titik-titik rawan kemacetan serta optimalisasi rekayasa lalu lintas dapat dilakukan untuk meningkatkan kelancaran mobilitas. Selain itu, pengembangan transportasi umum yang lebih aman, nyaman, dan terjangkau menjadi solusi penting guna mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Penerapan sistem *park and ride* di lokasi strategis juga dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik. Di samping itu, peningkatan infrastruktur pendukung, seperti trotoar yang ramah pejalan kaki dan jalur khusus sepeda, perlu dilakukan guna menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar, efisien, dan ramah lingkungan;
- c. untuk meningkatkan indeks kota layak huni, diperlukan berbagai upaya strategis, seperti penanganan permukiman kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni, serta pengelolaan sampah yang lebih optimal. Peningkatan infrastruktur dasar, termasuk akses air bersih, sanitasi layak, dan sistem drainase yang efektif, juga krusial untuk mengurangi risiko banjir. Selain itu, perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan meningkatkan kualitas lingkungan dan menyediakan ruang rekreasi bagi masyarakat. Perbaikan tata kelola perkotaan melalui perencanaan ruang yang lebih baik, pengendalian alih fungsi lahan, serta penerapan konsep kota cerdas (*smart city*) menjadi langkah penting. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah, serta keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan juga perlu diperkuat. Dengan langkah-langkah ini, Kota Tangerang Selatan diharapkan menjadi kota yang lebih nyaman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya;
- d. Kota Tangerang Selatan masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing daerah, seperti ketimpangan ekonomi, peningkatan infrastruktur, tata ruang, dan kebutuhan SDM yang sesuai pasar masih perlu diperhatikan. Untuk meningkatkan daya saing, langkah yang dapat dilakukan meliputi pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan dan tata ruang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan program kewirausahaan berbasis digital; dan
- e. capaian indeks reformasi birokrasi Kota Tangerang Selatan telah memenuhi target, namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalisme ASN, transparansi dan efisiensi

sistem pemerintahan, serta penguatan budaya kerja dan *mindset* ASN. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui digitalisasi layanan publik guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses, peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan profesional dan inovatif, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dengan sistem evaluasi kinerja yang lebih ketat. Selain itu, penyederhanaan prosedur birokrasi diperlukan untuk mempercepat layanan dan mencegah praktik KKN, serta membangun budaya kerja yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;

3. Agar anggaran lebih efektif dan efisien, diperlukan perencanaan berbasis data, penguatan pengawasan, serta optimalisasi teknologi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan juga penting guna memastikan pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel. Selain itu, efisiensi belanja harus difokuskan pada program berdampak langsung bagi masyarakat, dengan partisipasi publik dalam pengawasan untuk menjamin transparansi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penggunaan anggaran semakin optimal dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan.

Dengan berbagai capaian yang telah diraih serta upaya perbaikan yang terus dilakukan, Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mewujudkan kota yang “Unggul, Nyaman, dan Cerdas”. Ke depan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar setiap program dan kebijakan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh warga. Semoga langkah-langkah yang ditempuh semakin mendorong kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan Kota Tangerang Selatan sebagai kota “Cerdas, *Modern*, dan Religius.”

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Gambaran Umum Organisasi	3
1.4.1 Sumber Daya Perangkat Daerah	3
1.4.2 Aspek Strategis.....	4
1.4.3 Isu Strategis	7
1.5 Sistematika Penyusunan LKjIP Tahun 2024	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD).....	11
2.1.1 Visi dan Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026	11
2.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026	12
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	14
2.2.1 IKU Tahun 2024	14
2.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja.....	26
3.1.1 Tujuan 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.....	29
3.1.2 Tujuan 2 : Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.....	32
3.1.3 Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni	33
3.1.4 Tujuan 4 : Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah.....	35
3.1.5 Tujuan 5 : Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien.....	37
3.2 Analisis Capaian Kinerja	38
3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya ...	38
3.2.1.1 Tujuan 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	39
3.2.1.2 Tujuan 2 : Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Transportasi	42
3.2.1.3 Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni.....	44
3.2.1.4 Tujuan 4 : Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah.....	47
3.2.1.5 Tujuan 5 : Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien	50
3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah.....	55

3.2.2.1	Tujuan 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	55
3.2.2.2	Tujuan 2 : Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.....	57
3.2.2.3	Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni.....	58
3.2.2.4	Tujuan 4 : Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah.....	60
3.2.2.5	Tujuan 5 : Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien	62
3.2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional.....	63
3.2.3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Daerah dan Nasional.....	64
3.2.3.2	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target SDG's.....	66
3.2.4	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.....	71
3.2.4.1	Tujuan 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.....	71
3.2.4.2	Tujuan 2 : Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Transportasi	79
3.2.4.3	Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni	82
3.2.4.4	Tujuan 4 : Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Ekonomi Daerah	87
3.2.4.5	Tujuan 5 :Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien.....	92
3.2.5	Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran)	95
3.2.6	Analisis Program/Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja.....	100
3.3	Analisis Capaian Kinerja Anggaran.....	122
3.3.1	Realisasi Anggaran Tahun 2024	122
3.3.2	Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya	130
BAB IV PENUTUP.....		148
LAMPIRAN		151

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Status dan Jenis Kelamin.....	3
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Menurut Kepangkatan/Golongan Ruang (PNS).....	3
Tabel 1.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Pendidikan	4
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Kecamatan	5
Tabel 1.5	Urusan dan Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan	5
Tabel 1.6	Isu Strategis Kota Tangerang Selatan.....	7
Tabel 2.1	Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Selatan Periode 2022-2026.....	12
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Wali Kota Tahun 2024.....	17
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024	19
Tabel 3.1	Kategori Rentang Capaian.....	26
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Dibandingkan Target PK Tahun 2024	29
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan Kualitas Layanan dan Akses Pendidikan” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Tahun 2024.....	30
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Tahun 2024.....	30
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 3 “Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Tahun 2024.....	31
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 4 “Meningkatkan Daya Saing Pemuda” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Tahun 2024.....	31
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 5 “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Gender” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Tahun 2024.....	32
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Tujuan 2 “Meningkatkan Konektivitas Dan Aksesibilitas Infrastruktur Transportasi” Dibandingkan Target PK Tahun 2024.....	32
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Tahun 2024	33
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Tujuan 3 “Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni” Dibandingkan Target PK Tahun 2024.....	33
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perkotaan” Tujuan 3 “Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni” Tahun 2024	34

Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan” Tujuan 3 “Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni” Tahun 2024.....	34
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 3 “Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam” Tujuan 1 “Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni” Tahun 2024	35
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Tujuan 4 “Meningkatkan Perekonomian Dan Daya Saing Ekonomi Daerah” Dibandingkan Target PK Tahun 2024	35
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan sektor ekonomi kreatif” Tujuan 4 “Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah” Tahun 2024.....	36
Tabel 3.17	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan Investasi” Tujuan 4 “Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah” Tahun 2024	36
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 3 “Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja” Tujuan 4 “Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni” Tahun 2024	37
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Target 5 “Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien” Dibandingkan Target PK Tahun 2024.....	37
Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” Tujuan 5 “Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien” Tahun 2024.....	38
Tabel 3.21	Tren Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d. 2024.....	40
Tabel 3.22	Tren Perkembangan Indeks Rasa Aman Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d. 2024	46
Tabel 3.23	Tren Perkembangan Indeks Demokrasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d. 2024	46
Tabel 3.24	Tren Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d. 2024.....	47
Tabel 3.25	Tren Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d. 2024	47
Tabel 3.26	Tren Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d. 2024	50
Tabel 3.27	Tren Perkembangan Opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d. 2024	51
Tabel 3.28	Indikator Kinerja Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d. 2024.....	53
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing” Dibandingkan Target Jangka Menengah Tahun 2026.....	55
Tabel 3.30	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026	55
Tabel 3.31	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang	

	berkualitas dan berdaya saing” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026	56
Tabel 3.32	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan kesejahteraan keluarga” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026.....	56
Tabel 3.33	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan daya saing pemuda” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026.....	57
Tabel 3.34	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026.....	57
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Indikator Tujuan 2 ‘Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Transportasi” Dibandingkan Target Jangka Menengah Tahun 2026.....	58
Tabel 3.36	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Transportasi” Tujuan 2 “Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Transportasi”Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026	58
Tabel 3.37	Capaian Kinerja Tujuan 3 “Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni” Dibandingkan Target Jangka Menengah Tahun 2026	58
Tabel 3.38	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan” Tujuan 3 “Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026..	59
Tabel 3.39	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan” Tujuan 3 “Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni” Tahun 2024 dibandingkan Target Jangka Menengah Tahun 2026.....	60
Tabel 3.40	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 3 “Meningkatkan pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam” Tujuan 3 “Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026	60
Tabel 3.41	Capaian Kinerja Tujuan 4 “Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Ekonomi Daerah” Dibandingkan Target Jangka Menengah Tahun 2026	61
Tabel 3.42	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan sektor ekonomi kreatif” Tujuan 4 “Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026	61
Tabel 3.43	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan Investasi” Tujuan 4 “Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah” Tahun 2024	61
Tabel 3.44	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 3 “Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja” Tujuan 4 “Meningkatkan perekonomian dan daya saing	

ekonomi daerah” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026.....	62
Tabel 3.45 Capaian Kinerja Tujuan 5 “Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien” Dibandingkan Target Jangka Menengah Tahun 2026	62
Tabel 3.46 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” Tujuan 5 “Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026.....	63
Tabel 3.47 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Daerah dan Nasional.....	65
Tabel 3.48 Perbandingan Kinerja SDG’s Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dengan SDG’s Nasional Tahun 2024.....	67
Tabel 3.49 Faktor Keberhasilan Sasaran Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”	71
Tabel 3.50 Faktor Kegagalan Sasaran Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”	74
Tabel 3.51 Faktor Keberhasilan Sasaran Tujuan 2 “Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Transportasi”	79
Tabel 3.52 Faktor Keberhasilan Sasaran Tujuan 3 “Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni”	82
Tabel 3.53 Faktor Kegagalan Sasaran Tujuan 3 “Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni”	84
Tabel 3.54 Faktor Keberhasilan Sasaran Tujuan 4 “Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Ekonomi Daerah”	88
Tabel 3.55 Faktor Keberhasilan Sasaran Tujuan 5 “Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien”	92
Tabel 3.56 Faktor Kegagalan Sasaran Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”	93
Tabel 3.57 Efisiensi Sumber Daya/Anggaran	96
Tabel 3.58 Program Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Tahun 2024	100
Tabel 3.59 Realisasi Anggaran Tahun 2024	122
Tabel 3.60 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Tren Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 s.d 2024.....	39
Gambar 3.2	Tren Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024	39
Gambar 3.3	Tren Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024	40
Gambar 3.4	Tren Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024.....	41
Gambar 3.5	Tren Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024.....	41
Gambar 3.6	Tren Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024.....	42
Gambar 3.7	Tren Perkembangan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 s.d 2024.....	42
Gambar 3.8	Tren Perkembangan Rasio Konektivitas Kota, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 -2024.....	43
Gambar 3.9	Kinerja Lalu Lintas/Transportasi Kota (<i>v/c ratio</i>) Kota, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024.....	43
Gambar 3.10	Tren Perkembangan Indeks Kualitas Kota Layak Huni Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 s.d 2024.....	44
Gambar 3.11	Tren Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024.....	44
Gambar 3.12	Tren Perkembangan Persentase Pemukiman layak huni, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024.....	45
Gambar 3.13	Tren Perkembangan Cakupan Pengelolaan Sampah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024.....	45
Gambar 3.14	Tren Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024.....	46
Gambar 3.15	Tren Perkembangan Nilai Sektor Ekonomi Kreatif, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024.....	48
Gambar 3.16	Tren Perkembangan Nilai Investasi Tahunan, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024.....	48
Gambar 3.17	Tren Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja Per Total <i>Output</i> , Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024.....	49
Gambar 3.18	Tren Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Sektor Perdagangan dan Jasa, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024.....	49
Gambar 3.19	Tren Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024.....	50
Gambar 3.20	Tren Perkembangan Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024.....	51
Gambar 3.21	Tren Perkembangan Nilai Indeks Persepsi Korupsi/Survei Penilaian Integritas dikeluarkan Oleh KPK RI, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024.....	52

Gambar 3.22Tren Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat, Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 s.d 2024.....	52
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik, Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta pengaturan terbaru Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 menjadi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu Wali Kota Tangerang Selatan kepada Presiden melalui Kementerian PAN-RB yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil program/kegiatan Tahun 2024, yaitu tahun keempat RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Dalam hal perencanaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengambil langkah proaktif dalam menindaklanjuti perlunya formalisasi dokumen perencanaan dengan memperhatikan aspek kelayakan dan kemudahan untuk melakukan pembaruan. Sebagai bagian dari upaya memastikan keberlanjutan dan kesuksesan berbagai program pembangunan, pemerintah kota telah menyusun dan menyusun ulang dokumen perencanaan yang mencakup analisis kelayakan teknis, finansial, serta operasional, guna memastikan bahwa semua aspek yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan dapat tercakup secara komprehensif.

Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga telah memperkenalkan sistem yang fleksibel dan dinamis untuk memudahkan pembaruan dokumen perencanaan apabila ada perubahan kebutuhan atau kondisi yang terjadi seiring waktu. Pembaruan tersebut dapat mencakup berbagai hal, seperti perubahan regulasi, perkembangan teknologi, atau bahkan pergeseran anggaran yang terjadi dalam proyek-proyek pembangunan. Dengan mengadopsi sistem pengelolaan dokumen yang terintegrasi dan berbasis teknologi, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap pembaruan dilakukan secara efisien dan terkoordinasi dengan baik.

Dalam setiap proses pembaruan, pemerintah kota juga secara aktif melibatkan berbagai pihak terkait, baik dari sektor swasta, masyarakat, maupun *stakeholder* lainnya, untuk mendapatkan masukan yang relevan. Dengan cara ini, setiap keputusan yang diambil tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak hanya memastikan kelayakan perencanaan yang lebih matang, tetapi juga mempermudah proses pembaruan di masa depan, sehingga setiap kebijakan yang dijalankan tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah secara konsisten melakukan tindak lanjut dalam pengukuran kinerja melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program pembangunan, pemerintah kota telah menerapkan sistem pengukuran kinerja yang sistematis dan terukur.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, berbagai indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya terus dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditentukan. Dengan adanya sistem yang terstruktur, pemerintah dapat memantau progres capaian target kinerja dengan lebih akurat, serta mengidentifikasi potensi hambatan atau kendala yang mungkin muncul selama implementasi.

Proses evaluasi dilakukan secara mendalam untuk menilai sejauh mana hasil yang dicapai sudah memenuhi standar yang diinginkan, serta untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka perbaikan di masa mendatang. Hasil dari evaluasi ini tidak hanya digunakan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya terukur dengan jelas, tetapi juga dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan dinamika yang ada. Pengukuran kinerja yang teratur menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah kota dalam mewujudkan visi pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan
3. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024 ini bertujuan untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari AKIP. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 menggunakan data per Desember 2024. Adapun tujuan penyusunan LKjIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan tahun 2024 dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2024 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
3. sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2024 dan rekomendasi pada tahun yang akan datang.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Struktur organisasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.4.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur di Kota Tangerang Selatan per 31 Desember 2024 berjumlah 18.067 orang, terdiri dari dukungan pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 4.447 orang dan Non ASN sebanyak 10.293 orang, dengan kuantitas dan kualitas sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Status dan Jenis Kelamin

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5=3+4
A.	ASN – PNS	1.670	2.584	4.254
B.	ASN – P3K	1.131	3.194	4.325
C.	Non ASN	7.431	2.862	10.293
Jumlah Total		10.232	8.640	18.872

Sumber : Kota Tangerang Selatan dalam Angka Tahun, 2025.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Kepangkatan/Golongan Ruang (PNS)

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama	IV/E	0
2.	Pembina Utama Madya	IV/D	2
3.	Pembina Utama Muda	IV/C	48
4.	Pembina Tingkat I	IV/B	364
5.	Pembina	IV/A	594
6.	Penata Tingkat I	III/D	952
7.	Penata	III/C	681

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
8.	Penata Muda Tingkat I	III/B	795
9.	Penata	III/A	405
10.	Pengatur Tingkat I	II/D	116
11.	Pengatur	II/C	226
12.	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	42
13.	Pengatur Muda	II/A	27
14.	Juru Tingkat I	I/D	2
15.	Juru	I/C	0
16.	Juru Muda Tingkat I	I/B	0
17.	Juru Muda	I/A	0
Jumlah Total			4.254

Sumber : Kota Tangerang Selatan dalam Angka Tahun, 2025.

Tabel 1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1.	S3/Doktor/Ph.D	8
2.	S2/Pasca Sarjana	904
3.	S1/Sarjana	5.866
4.	Diploma IV/Akta IV	186
5.	Diploma III/Akta III	1.368
6.	Diploma II/Akta II	60
7.	Diploma I/Akta I	7
8.	SLTA atau Sederajat	163
9.	SLTP atau Sederajat	7
10.	SD	10
Jumlah Total		8.579

Sumber : Kota Tangerang Selatan dalam Angka Tahun, 2025.

1.4.2 Aspek Strategis

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada tanggal 26 November tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Pembentukan daerah otonom baru tersebut merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan berada di Jl. Maruga Raya No. 1 Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dengan sebagian kantor pemerintahan terpusat di Kawasan Pusat Pemerintahan dan sebagian lainnya berada di Luar Kawasan Pusat Pemerintahan diantaranya, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Komposisi penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin meliputi 712.409 jiwa atau 49,84% penduduk laki-laki dan 717.120 jiwa atau 50,16% penduduk perempuan. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pamulang yaitu 329,61 ribu jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di

Kecamatan Setu yaitu 93,63 ribu jiwa. Kondisi kependudukan Kota Tangerang Selatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Persentase (%)
1	Setu	93,63	6,55
2	Serpong	166,72	11,66
3	Pamulang	329,61	23,06
4	Ciputat	226,31	15,83
5	Ciputat Timur	171,25	11,98
6	Pondok Aren	301,00	21,06
7	Serpong Utara	141,00	9,86
Kota Tangerang Selatan		1.429,53	100

Sumber : Kota Tangerang Selatan dalam Angka Tahun 2025.

Sebagai daerah otonom, kewenangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi.

Rincian urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang urusan pemerintahan daerah, dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan sebanyak 30 (tiga puluh) urusan sedangkan pelaksana urusan perangkat daerah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara rinci pelaksanaan urusan oleh perangkat daerah diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5 Urusan dan Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan

Tabel 1.6				
Urusan dan Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan				
No	Urusan		Perangkat Daerah Pengampu Urusan	
I	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
				Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		5	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Sosial	Dinas Sosial		
II	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3	Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No	Urusan		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
			dan Keluarga Berencana
		4	Pertanahan
		5	Lingkungan Hidup
		6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		7	Perhubungan
		8	Komunikasi dan Informatika
		9	Statistik
		10	Persandian
		11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		12	Penanaman Modal
		13	Kepemudaan dan Olahraga
		14	Kebudayaan
		15	Perpustakaan
		16	Kearsipan
		17	Pangan
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	1	Perikanan
		2	Pertanian
		3	Pariwisata
		4	Perindustrian
		5	Perdagangan
IV	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Perencanaan
		2	Penelitian dan Pengembangan
		3	Kepegawaian
		4	Pendidikan dan Pelatihan
		5	Keuangan
V	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	1	Sekretariat Daerah
		2	Sekretariat DPRD
VII	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	1	Pengawasan
VIII	Unsur Kewilayahan	1	Kecamatan
			Pamulang
			Ciputat
			Setu
			Serpong
			Pondok Aren
			Serpong Utara
IX	Unsur Pemerintahan	1	Kesatuan Bangsa dan
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Urusan		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
	Umum	Politik	

Sumber : Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.4.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa mendatang. Isu strategis juga dapat berupa potensi daerah, yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis pembangunan Kota Tangerang Selatan tahun 2024 yang berkaitan dengan permasalahan Kota Tangerang Selatan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.6 Isu Strategis Kota Tangerang Selatan

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis
1. Kualitas SDM belum berdaya saing unggul	1. Daya saing SDM
2. Pelayanan sistem perkotaan belum optimal	2. Konektivitas infrastruktur dan perwujudan kota yang lestari
3. Belum optimalnya kualitas kota sebagai kota layak huni	
4. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah	3. Daya saing ekonomi terutama sektor ekonomi kreatif dan UMKM
5. Belum optimalnya transformasi pelayanan publik	4. Birokrasi yang adaptif dan berorientasi pelayanan publik

Sumber : Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan No. 29 Tahun 2024

Uraian mengenai isu strategis Kota Tangerang Selatan tahun 2024 disampaikan sebagai berikut.

1. Daya saing SDM

Partisipasi sekolah jenjang SMA/ sederajat pada tahun 2024 mencapai 83,6%, sementara jenjang SD dan SMP masing-masing sebesar 97,47% dan 99,23%, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan keberhasilan Wajib Belajar 12 Tahun. Akselerasi angka partisipasi sekolah usia 7–12 tahun dan 13–15 tahun juga perlu terus didorong agar mencapai 100%. Mengingat pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan tetap berupaya mendukung peningkatan partisipasi sekolah ditingkat SMA/MA/SMK melalui kolaborasi dan penguatan sektor pendidikan.

Di sisi lain, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau masih belum merata, ditandai dengan permasalahan gizi makro dan mikro seperti stunting, obesitas sentral, dan gizi buruk. Pada tahun 2024, prevalensi stunting balita tercatat sebesar 9,2%, kurang energi kronis pada ibu hamil 2,90%, obesitas sentral 26,36%, dan gizi buruk pada balita 0,03%. Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang mencapai 95,28% menunjukkan masih perlunya optimalisasi sistem kesehatan daerah yang lebih tangguh dan responsif, terutama dalam menangani kedaruratan kesehatan.

Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 sebesar 2,36%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2,57%. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 tercatat sebanyak 43,33 ribu jiwa, turun dari 46,31 ribu jiwa pada tahun sebelumnya. Namun, dalam lingkup pelayanan perlindungan sosial, belum

digunakannya satu data sasaran yang *valid* dan terintegrasi menyebabkan upaya perlindungan sosial masih terfragmentasi dan berpotensi terjadi kesalahan sasaran. Selain itu, pelaksanaan perlindungan sosial belum adaptif terhadap kerentanan sosial serta belum mampu meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam, non-alam, dan perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah, sementara lingkungan yang inklusif bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pemerataan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan sistem perlindungan sosial agar lebih adaptif dan tepat sasaran.

2. Konektivitas infrastruktur dan perwujudan kota yang lestari

Konektivitas infrastruktur masih menjadi isu strategis dalam rencana kerja tahunan pembangunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, hal ini disebabkan Kota Tangerang Selatan memiliki infrastruktur dan layanan perkotaan berupa sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan SDA, dan infrastruktur perkotaan yang meliputi sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem jaringan persampahan, sistem drainase, fasilitas pejalan kaki, fasilitas pesepeda, fasilitas perparkiran, tempat evakuasi bencana, fasilitas pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang belum optimal dalam pelayanan.

Permasalahan yang dihadapi terkait infrastruktur dan layanan perkotaan tersebut adalah seluruh infrastruktur tersebut belum terintegrasi dan inklusif sesuai kebutuhan masyarakat. Belum terintegrasinya antara jaringan jalan, fasilitas perparkiran dengan sistem transportasi menyebabkan terjadinya 35 titik kemacetan pada tahun 2024. Sistem drainase yang belum terintegrasi dengan sistem jaringan SDA menyebabkan Kota Tangerang Selatan mengalami genangan bahkan banjir di beberapa wilayah. Belum terintegrasinya sistem evakuasi bencana dan sistem proteksi kebakaran dengan infrastruktur penunjang lainnya seperti sistem jaringan jalan, menyebabkan ketahanan daerah terhadap bencana rendah. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang ramah dapat diakses oleh kelompok rentan seperti disabilitas, lanjut usia, wanita dan anak-anak, masih menjadi permasalahan yang dirasakan di Kota Tangerang Selatan.

3. Daya saing ekonomi terutama sektor ekonomi kreatif dan UMKM

Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro di Kota Tangerang Selatan masih relatif kecil hanya sebesar 0,29%. Selain itu, jumlah UMKM yang bergerak dalam bidang usaha kreatif masih sedikit yaitu sebesar 12,93%. Hal tersebut dapat menggambarkan belum optimalnya kontribusi UMKM dan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan rantai ekonomi nasional. Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah; rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil. Hal-hal tersebut dinilai belum dikelola secara maksimal, dan inovasi yang mendorong investasi di sektor ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan.

4. Birokrasi yang adaptif dan berorientasi pelayanan publik

Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Pada tahun 2024, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih berkategori B (69,06). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan sebesar 90,25% (>90%). Sementara itu nilai reformasi birokrasi tahun 2024 baru sebesar 85,61 dan indeks persepsi korupsi di Kota Tangerang Selatan masih diangka 76,25.

Isu strategis yang disampaikan diatas, menjadi prioritas dalam PK tahun 2024 dan sesuai dengan kebijakan pembangunan dalam RPJMD 2021-2026 untuk tahun 2024 yang diarahkan pada peningkatan kualitas Tangerang Selatan “Unggul, Inovatif, dan Layak Huni” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut.

- a. Unggul: Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia.
- b. Inovatif: Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa termasuk ekonomi kreatif.
- c. Inovatif: Penguatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan.
- d. Layak huni: Peningkatan konektivitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.

Isu Kota Tangerang Selatan juga selaras dengan RKP Tahun 2025, yang mengusung tema “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, dengan sasaran pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan, serta intensitas emisi gas rumah kaca. Sementara itu, agenda strategis tahun 2025 yang termuat dalam RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2025 yaitu:

1. penyusunan RPJMD 2025-2029;
2. percepatan pengentasan kemiskinan;
3. percepatan penurunan stunting;
4. pelantikan Kepala Daerah hasil PILKADA serentak tahun 2024; dan
5. persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Tingkat Provinsi Banten.

1.5 Sistematika Penyusunan LKjIP Tahun 2024

Sebagaimana telah diatur dalam PERMEPAN Nomor 53 Tahun 2014, penyajian LKjIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2024.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.
2. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024.
3. Surat Pernyataan Telah Diriviu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Kota Tangerang Selatan membahas rencana-rencana strategis yang akan dicapai pada rencana kinerja yang menjadi target Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam perencanaan pembangunan tahun 2024. Rencana tersebut merupakan penjabaran arah kebijakan dari visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD periode tahun 2021–2026, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam RENSTRA Kota Tangerang Selatan tahun 2021–2026 sebagai acuan untuk pencapaian kinerja yang menjawab isu strategis kota.

Dalam rangka tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Kementerian PANRB maka telah dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja tahun 2024. Kemudian untuk pengukuran dan peningkatan kinerja Kota Tangerang Selatan ke dalam Indikator Kinerja Utama dan dirinci kembali ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

2.1 Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

2.1.1 Visi dan Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

Visi dan misi RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2021–2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut.

“TERWUJUDNYA TANGERANG SELATAN UNGGUL, MENUJU KOTA LESTARI, SALING TERKONEKSI, EFEKTIF DAN EFISIEN”.

Makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Tangerang Selatan unggul** menunjukkan yang terbaik dalam segala aspek untuk mewujudkan sebuah cita-cita ke arah lebih baik dan berkesinambungan sesuai kondisi yang diharapkan, juga merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dinamis dari isu strategis untuk diprioritaskan dan dioptimalkan;
2. **menuju kota lestari** bermakna membangun Kota Tangerang Selatan yang layak huni dan mengedepankan lingkungan tinggal yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah lansia, serta mendukung perwujudan 16 dari 17 tujuan SDG's sesuai yang diamanatkan dalam RPJMN;
3. **saling terkoneksi** bermakna mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang memiliki akses menyeluruh ke seluruh wilayah dengan didukung sistem transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan daerah; dan

4. **efektif dan efisien** adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan cepat dan tepat, serta menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, sehat, tepat guna, dan praktis.

Seiring dengan pembangunan Kota Tangerang Selatan yang terus berjalan, maka upaya perwujudan visi di atas, akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Tangerang Selatan Tahun 2021–2026 yaitu sebagai berikut.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
2. Pembangunan infrastruktur yang saling terkoneksi.
3. Membangun kota yang lestari.
4. Meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi di sektor ekonomi kreatif.
5. Membangun birokrasi yang efektif dan efisien.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam dokumen perencanaan. RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026 menetapkan sebanyak 13 (tiga belas) sasaran dan 29 (dua puluh sembilan) indikator sasaran sebagai berikut.

Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Selatan Periode 2022-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target RPJMD				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pembangunan sumber daya manusia yang unggul	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks pembangunan manusia	81,63	81,81	81,99	82,19	82,4
		Meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks pendidikan	80,07	80,44	80,83	81,23	81,67
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	72,5	72,56	72,59	72,63	72,67
		Meningkatkan kesejahteraan keluarga	Indeks pembangunan keluarga	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat baik
		Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks pembangunan pemuda	53	53,4	53,8	54,2	55
		Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks pembangunan gender	93,58	93,58	93,59	93,59	93,6
			Indeks pemberdayaan gender	73,85	73,85	73,86	73,86	73,87
Pembangunan infrastruktur yang saling terkoneksi	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.		Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5	5,4	5,8	6,2	7
		Meningkatkan kinerja	Rasio konektivitas	0,59	0,59	0,74	0,89	1

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target RPJMD				
				2022	2023	2024	2025	2026
Membangun kota yang lestari	Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni	transportasi dan jaringan jalan perkotaan	kota					
			Kinerja lalu lintas/transpor tasi kota (v/c ratio)	0,54	0,52	0,5	0,48	0,46
			Indeks kota layak huni	65-65,5	65,5-66,3	66,3-66,7	66,7-66,9	67
		Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan	Indeks kualitas lingkungan hidup	51,8	51,9	52	52,1	52,2
			Persentase pemukiman layak huni	99,31	99,37	99,69	99,84	100
			Cakupan pengelolaan sampah	90	93	96	100	100
			Ruang terbuka hijau publik	4,26	4,31	4,59	4,81	5
		Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan	Indeks rasa aman	Aman	Aman	Aman	Aman	Aman
			Indeks demokrasi	Sedang (80)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
		Meningkatkan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam	Indeks risiko bencana	Rendah (76)	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
			Indeks daya saing daerah)	Sedang (2,5)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
	Meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi di sektor ekonomi kreatif	Meningkatkan sektor ekonomi kreatif	Nilai sektor ekonomi kreatif	8,16	8,72	9,36	10,04	10,77
		Meningkatkan investasi	Nilai investasi tahunan	4,42	4,66	4,9	5,14	5,39
		Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja per total output	82.29 2.178	85.289. 742	88.43 9.806	91.82 6.221	95.512. 855
			Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa	83.78 2.610	87.022. 906	90.47 6.066	94.17 4.852	98.166. 098
Membangun birokrasi yang efektif dan efisien	Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien		Indeks reformasi birokrasi	65	66	67	68	70
		Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	BB (70)	BB	BB	BB	BB
			Nilai evaluasi penyelenggaraan	3,6	3,8	4	4,1	4,2

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target RPJMD				
				2022	2023	2024	2025	2026
			pemerintahan daerah					
			Opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks persepsi korupsi	82	83	84	85	85
			Indeks kepuasan masyarakat	83,5	84	85	87	88,3

Sumber : RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menuangkan target kinerja daerah yang ditetapkan pada tahun 2024 beserta indikator ketercapaian, dan targetnya ke dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024.

2.2.1 IKU Tahun 2024

Dasar penyusunan rencana kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. IKU adalah indikator sasaran yang termuat dalam RPJMD dan indikator lainnya yang dianggap penting dan relevan. IKU disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, merupakan informasi kinerja yang penting dan diperlukan sebagai alat ukur keberhasilan selama lima tahun. IKU Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Kinerja Utama/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks pendidikan	(1/3) rata-rata lama sekolah ditambah (2/3) rata-rata harapan sekolah	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Meningkatkan kesejahteraan keluarga	Indeks pembangunan keluarga	Indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dengan predikat sebagai berikut. Baik = >70 Cukup Baik = 40 < X < 70 Kurang/rentan = <40	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks pembangunan pemuda	aspek pembangunan pemuda yang dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya (sumber BPS).	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan

Kinerja Utama/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																									
		<table><tr><th>No</th><th>Indikator</th><th>Batas Minimum</th><th>Batas Maksimum</th><th>Sumber Data</th></tr><tr><td colspan="5">Domain Pendidikan</td></tr><tr><td>1</td><td>Rata-rata lama sekolah</td><td>0</td><td>15 (target)</td><td>Standar PBB, digunakan pada IPM</td></tr><tr><td>2</td><td>APK sekolah menengah</td><td>0</td><td>100 (target)</td><td>Standar</td></tr><tr><td>3</td><td>APK perguruan tinggi</td><td>0</td><td>100 (target)</td><td>Standar</td></tr><tr><td colspan="5">Domain Kesehatan dan Kesejahteraan</td></tr><tr><td>4</td><td>Angka kesakitan peremuda</td><td>0 (target)</td><td>20</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>5</td><td>Persentase peremuda korban kejahatan</td><td>0 (target)</td><td>3</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>6</td><td>Persentase peremuda yang merokok</td><td>0 (target)</td><td>36</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>7</td><td>Persentase remaja perempuan yang sedang hamil</td><td>0 (target)</td><td>45</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td colspan="5">Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja</td></tr><tr><td>8</td><td>Persentase peremuda wirausaha kerah putih</td><td>0</td><td>2 (target)</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>9</td><td>TPT peremuda</td><td>0 (target)</td><td>28</td><td>TPT peremuda Arab Saudi</td></tr><tr><td colspan="5">Domain Partisipasi dan Kepemimpinan</td></tr><tr><td>10</td><td>Persentase peremuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan</td><td>0</td><td>100 (target)</td><td>Standar</td></tr><tr><td>11</td><td>Persentase peremuda yang aktif dalam organisasi</td><td>0</td><td>45 (target)</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>12</td><td>Persentase peremuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat</td><td>0</td><td>25 (target)</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td colspan="5">Domain Gender dan Diskriminasi</td></tr><tr><td>13</td><td>Angka perkawinan usia anak</td><td>0 (target)</td><td>45</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>14</td><td>Persentase peremuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi</td><td>25</td><td>100 (target)</td><td>Standar</td></tr><tr><td>15</td><td>Persentase peremuda perempuan yang bekerja di sektor formal</td><td>0</td><td>60 (target)</td><td>Nilai maksimum +2 standar deviasi</td></tr></table>	No	Indikator	Batas Minimum	Batas Maksimum	Sumber Data	Domain Pendidikan					1	Rata-rata lama sekolah	0	15 (target)	Standar PBB, digunakan pada IPM	2	APK sekolah menengah	0	100 (target)	Standar	3	APK perguruan tinggi	0	100 (target)	Standar	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan					4	Angka kesakitan peremuda	0 (target)	20	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	5	Persentase peremuda korban kejahatan	0 (target)	3	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	6	Persentase peremuda yang merokok	0 (target)	36	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja					8	Persentase peremuda wirausaha kerah putih	0	2 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	9	TPT peremuda	0 (target)	28	TPT peremuda Arab Saudi	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan					10	Persentase peremuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100 (target)	Standar	11	Persentase peremuda yang aktif dalam organisasi	0	45 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	12	Persentase peremuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	Domain Gender dan Diskriminasi					13	Angka perkawinan usia anak	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	14	Persentase peremuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi	25	100 (target)	Standar	15	Persentase peremuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60 (target)	Nilai maksimum +2 standar deviasi	
No	Indikator	Batas Minimum	Batas Maksimum	Sumber Data																																																																																																								
Domain Pendidikan																																																																																																												
1	Rata-rata lama sekolah	0	15 (target)	Standar PBB, digunakan pada IPM																																																																																																								
2	APK sekolah menengah	0	100 (target)	Standar																																																																																																								
3	APK perguruan tinggi	0	100 (target)	Standar																																																																																																								
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan																																																																																																												
4	Angka kesakitan peremuda	0 (target)	20	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																								
5	Persentase peremuda korban kejahatan	0 (target)	3	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																								
6	Persentase peremuda yang merokok	0 (target)	36	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																								
7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																								
Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja																																																																																																												
8	Persentase peremuda wirausaha kerah putih	0	2 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																								
9	TPT peremuda	0 (target)	28	TPT peremuda Arab Saudi																																																																																																								
Domain Partisipasi dan Kepemimpinan																																																																																																												
10	Persentase peremuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100 (target)	Standar																																																																																																								
11	Persentase peremuda yang aktif dalam organisasi	0	45 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																								
12	Persentase peremuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																								
Domain Gender dan Diskriminasi																																																																																																												
13	Angka perkawinan usia anak	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																								
14	Persentase peremuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi	25	100 (target)	Standar																																																																																																								
15	Persentase peremuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60 (target)	Nilai maksimum +2 standar deviasi																																																																																																								
Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks pembangunan gender	IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki Keterangan : IPM : Indeks Pembangunan Manusia	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																																																																																																									
	Indeks pembangunan gender	rata - rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																																																																																																									
Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Rasio konektivitas kota	Rasio Konektivitas Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) IK 1 = (Jumlah trayek yang dilayani x bobot trayek) / jumlah kebutuhan trayek pada kota tersebut	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan																																																																																																									
	Kinerja lalu lintas/transportasi kota (v/c ratio)	V/c ratio di Jalan kota adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Rasio V/C memungkinkan untuk memperkirakan tingkat kemacetan relatif pada suatu segmen jalan.																																																																																																										
Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan	Indeks kualitas lingkungan hidup	IKLH = (0,376 X IKA) + (0,405 X IKU) + (0,219 X IKL)	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																																																																																																									
	Persentase permukiman layak huni	Luas wilayah permukiman dikurangi dengan luas kawasan permukiman kumuh, dibagi dengan luas wilayah permukiman	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																																																																																																									
	Cakupan pengelolaan sampah	Volume sampah yang dapat dikelola dibagi total volume timbunan sampah kota dikali 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																																																																																																									
	Ruang terbuka hijau publik	Luas ruang terbuka hijau publik ditambah perlindungan setempat dibagi luas wilayah kota dikurangi badan air, kawasan hutan, dan tanaman pangan dikali 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																																																																																																									
Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan	Indeks rasa aman	komposit 4 dimensi : Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan Angka Kriminalitas	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta perlindungan Masyarakat Kecamatan																																																																																																									
	Indeks demokrasi	Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator	Kesatuan Bangsa dan Politik																																																																																																									

Kinerja Utama/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data																												
1	2	3	4																												
		demokrasi																													
Meningkatkan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam	Indeks risiko bencana	$Risk = Hazard \times (Vulnerability/Capacity)$ Keterangan : 1. tingkat risiko rendah 2. tingkat risiko sedang 3. tingkat risiko tinggi	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta perlindungan Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																												
Meningkatkan sektor ekonomi kreatif	Nilai sektor ekonomi kreatif	nilai PDRB sektor ekonomi kreatif (triliun rupiah)	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																												
Meningkatkan investasi	Nilai investasi tahunan	Nilai investasi tahunan (triliun rupiah)	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Urusan <i>Perumahan</i> Bidang Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																												
Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja per total output	Total output (PDRB) dibagi total tenaga kerja (rupiah)	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																												
	Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa	Nilai Tambah Sektor Perdagangan dan Jasa/Jumlah Angkatan Kerja (rupiah)																													
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Komposit dari nilai indikator perencanaan kerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja yang ada di seluruh instansi. <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th><th>Sub Komponen</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30%</td><td> a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%). </td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>25%</td><td> a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%) </td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15%</td><td> a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%) </td></tr> <tr> <td>4</td><td>Evaluasi Internal</td><td>10%</td><td> a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) </td></tr> <tr> <td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>20%</td><td> a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%) </td></tr> <tr> <td colspan="2">Total</td><td>100%</td><td></td></tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).	2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)	3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)	4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)	5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)	Total		100%		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Urusan Pemerintahan Bidang persandian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD
No	Komponen	Bobot	Sub Komponen																												
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).																												
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)																												
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)																												
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)																												
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)																												
Total		100%																													

Kinerja Utama/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1	2	3	4
	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai EPPD terhadap LPPD	Perencanaan Keuangan
	Opini bpk atas pemeriksaan keuangan daerah	Hasil opini BPK atas lapoan keuangan yang telah diaudit	Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Indeks persepsi korupsi	Menilai dan memberi peringkat negara/wilayah berdasarkan seberapa korup sektor publik suatu negara dianggap oleh para ahli dan eksekutif bisnis (kemenkeu) : 0 = sangat korup 100 = sangat bersih dari korupsi	Penelitian dan Pengembangan Inspektorat Daerah
	Indeks kepuasan masyarakat	Ukuran kinerja pelayanan publik	Kecamatan Seluruh Urusan

Sumber : Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

2.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyesuaian perubahan anggaran APBD TA 2024 dan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Kementerian PANRB, telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat beberapa perubahan target yang disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan beban kerja akibat meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan serta strategi Tahun 2024. Rencana kinerja yang disusun mengacu kepada IKU dengan mempertimbangkan pagu anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, selanjutnya setelah anggaran ditetapkan dilakukan perjanjian dalam Perjanjian Kinerja. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024 sebelum dan setelah perubahan.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Wali Kota Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Awal	Target Perubahan
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks pembangunan manusia	%	82,40	83,70
	Meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks pendidikan	%	80,83	80,83
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	73,22	75,84
	Meningkatkan kesejahteraan keluarga	Indeks pembangunan keluarga	Predikat	Baik	Baik (70)
	Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks pembangunan pemuda	Poin	53,8	55,00
	Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks pembangunan gender	Poin	94,53	94,53
		Indeks pemberdayaan gender	Poin	73,86	73,86

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Awal	Target Perubahan
Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi		Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	Poin	5,8	7,03
	Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Rasio konektivitas kota	Rasio	0,74	0,89
		Kinerja lalu lintas/transportasi kota (v/c ratio)	Rasio	0,5	0,54
Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni		Indeks kota layak huni	Poin	71,77	71,77
	Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	60,66	60,66
		Persentase pemukiman layak huni	%	99,69	99,69
		Cakupan pengelolaan sampah	%	96	100
		Ruang terbuka hijau publik	%	4,59	4,59
	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan	Indeks rasa aman	Predikat	Aman	Aman (66,97)
		Indeks demokrasi	Predikat	Baik (81)	Baik (81)
Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah		Indeks daya saing daerah	Predikat	Tinggi (3,75)	Sangat tinggi (3,81)
	Meningkatkan sektor ekonomi kreatif	Nilai sektor ekonomi kreatif	(Triliun rupiah)	9,36	14,68
	Meningkatkan investasi	Nilai investasi tahunan	(Triliun rupiah)	4,9	7,44
	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja per total <i>output</i>	(Rupiah)	88.439.806	169.838.260
		Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa	(Rupiah)	90.476.066	109.284.473
Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien		Indeks reformasi birokrasi	Poin	67	76,79
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat	BB	BB
		Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Poin	4	4,00
		Opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah	Predikat	WTP	WTP
		Indeks persepsi korupsi	Poin	84	84,00
		Indeks kepuasan masyarakat	Poin	85	89,87

Sumber : Perjanjian Kinerja Sebelum dan Setelah Perubahan Wali Kota Tangerang Selatan Tahun, 2024.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pencapaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2024 dilaksanakan melalui program dan kegiatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan rencana anggaran sebagaimana telah tercantum pada APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
1	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG UNGGUL					
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
		Meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan				
				1.01. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	303.551.487.598
					1.02.03 Program Pengembangan Kurikulum	313.730.000
					1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	70.528.292.090
				2.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	892.138.140
					2.22.03. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	797.356.854
					2.22.05. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	165.556.000
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
				1.02. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	277.214.016.427
					1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.910.557.662
					1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	709.129.000
					1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	15.406.474.700
				3.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27.04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	419.050.322
		Meningkatkan kesejahteraan keluarga				
				2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga	2.14.02. Program Pengendalian Penduduk	362.662.000
					2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.240.170.000
					2.14.04. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.965.485.320
				2.09. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.09.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	68.000.000
					2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.326.437.149
					2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan	340.098.560
					2.09.05. Program Pengawasan Keamanan Pangan	177.946.300
				1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial	748.986.790
					1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial	1.170.879.930
					1.06.05. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	394.021.000
		Meningkatkan daya saing pemuda				
				2.19 Urusan Pemerintahan Bidang	2.19.02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.101.500.000

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)		
				Kepemudaan	2.19.03. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	27.754.814.186		
					2.19.04. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	991.500.000		
				Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender				
			2.08. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.244.315.000			
				2.08.03. Program Perlindungan Perempuan	601.607.300			
				2.08.04. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.918.140.000			
				2.08.05. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	25.040.000			
				2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	298.224.200			
				2.08.07. Program Perlindungan Khusus Anak	763.560.460			
			2	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG SALING TERKONEKSI				
		Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.						
			Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan					
			2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	87.682.035.256			
						1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	1.03.10. Program Penyelenggaraan Jalan	205.927.234.564
			3	MEMBANGUNAN KOTA YANG LESTARI				
		Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.						
			Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan					
			1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.196.517.861			
				1.03.05. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	24.004.116.170			
				1.03.08. Program Penataan Bangunan Gedung	404.332.375.244			
				1.03.09. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	454.645.025			
				1.03.11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.033.014.080			
				1.03.12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.694.886.550			
			1.04. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.02. Program Pengembangan Perumahan	2.360.103.520			
				1.04.03. Program Kawasan Permukiman	46.434.838.293			
				1.04.04. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	37.521.397.969			
				1.04.05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	238.206.012.899			
			2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan	2.11.02. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.757.480.634			
				2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan	1.723.706.784			

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
				Hidup	Lingkungan Hidup	
					2.11.04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	22.506.548.182
					2.11.05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	233.729.750
					2.11.06. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	226.274.550
					2.11.08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	171.597.787
					2.11.09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	545.218.112
					2.11.10. Program Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	342.084.550
					2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan	111.397.331.557
				2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2.10.10. Program Penatagunaan Tanah	186.487.000
				1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.07. Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	295.480.266
			Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan			
				1.05. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta perlindungan Masyarakat	1.05.02. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.683.476.040
				7.01. Kecamatan	7.01.04. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.368.872.470
				8.01. Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.970.960.030
					8.01.03. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	51.228.784.541
					8.01.04. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	508.850.536
					8.01.05. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	984.494.100
					8.01.06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	759.868.400

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
					Sosial	
			Meningkatkan pencegahan dan penanganan bencana dan non alam			
				1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	147.718.120.509
					1.03.06. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	103.290.696.530
				1.05. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta perlindungan Masyarakat	1.05.03. Program Penanggulangan Bencana	4.138.960.179
					1.05.04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	12.880.234.529
				1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.06. Program Penanganan Bencana	4.353.091.133
4	MENINGKATAN EKONOMI BERBASIS NILAI TAMBAH TINGGI DI SEKTOR EKONOMI KREATIF					
			Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah			
			Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan			
				2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah	2.17.02. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	229.232.810
					2.17.03. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100.000.000
					2.17.04. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100.000.000
					2.17.05. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	227.312.810
					2.17.06. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	562.299.300
					2.17.07. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.064.471.150
					2.17.08. Program Pengembangan UMKM	1.229.661.610
					3.26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3.26.02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				3.26.03. Program Pemasaran Pariwisata		530.838.800
				3.26.04. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		140.962.200
			3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.143.913.400		
			3.25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	3.25.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.443.433.443	
				2.35.06. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	732.964.122	
			Meningkatkan Investasi			
				2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	133.715.350
					2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal	932.844.800
					2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal	690.947.750

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)			
				3.30. Urusan Perumahan Bidang Perdagangan	2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	457.630.000			
					2.18.06. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	50.000.000			
					3.30.02. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	98.240.521,29			
						3.30.03. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.686.130.964		
						3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	379.182.602		
						3.30.05. Program Pengembangan Ekspor	396.633.860		
						3.30.06. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	157.852.600		
						3.30.07. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	108.265.840		
						3.31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3.31.02. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.257.519.339	
					3.31.03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri		15.763.800		
				3.31.04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	129.478.800				
				Meningkatkan produktivitas tenaga kerja					
					2.07. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2.07.02. Program Perencanaan Tenaga Kerja	25.000.000		
						2.07.03. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.899.732.500		
						2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja	803.740.000		
						2.07.05. Program Hubungan Industrial	812.334.000		
					3.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27.02. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.294.784.384		
						3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian	1.258.251.834		
						5 MEMBANGUN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN			
						Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien			
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah								
	2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan	2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk	292.510.000						
		2.12.03. Program Pencatatan Sipil	148.000.000						
		2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	296.922.400						
		2.12.05. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	10.000.000						
	2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi	2.16.02. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	16.040.950.000						
		2.16.03. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	47.939.135.728						
	2.20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	243.062.400						
	2.21. Urusan Pemerintahan Bidang	2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	408.685.000						

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
				persandian	2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan	924.129.480
				2.24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2.24.02. Program Pengelolaan Arsip	1.057.815.000
					2.24.03. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	40.003.000
					2.24.04. Program Perizinan Penggunaan Arsip	64.440.000
				4.01. Sekretariat Daerah	4.01.02. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	46.511.563.376
					4.01.03. Program Perekonomian dan Pembangunan	6.459.256.339
				4.02. Sekretariat DPRD	4.02.02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	54.633.439.898
				5.01. Perencanaan	5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.325.014.500
					5.01.03. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.044.040.000
				5.02. Keuangan	5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	9.839.508.274
					5.02.03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.220.699.634
					5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.716.533.919
				5.03. Kepegawaian	5.03.02. Program Kepegawaian Daerah	3.848.555.410
				5.04. Pendidikan dan Pelatihan	5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.574.039.150
				5.05. Penelitian dan Pengembangan	5.05.02. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.669.590.000
				6.01. Inspektorat Daerah	6.01.02. Program Penyelenggaraan Pengawasan	721.370.650
					6.01.03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	475.018.768
				7.01. Kecamatan	7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81.085.073.965
					7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	68.287.212.994
					7.01.05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.841.601.385
				Seluruh Urusan	xx.xx.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.100.045.017.480
Total						4.761.432.017.480

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Wali Kota Tangerang Selatan Tahun, 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Laporan Kinerja Tahunan disusun sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan PERMEN PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan tindak lanjut yang signifikan dalam pelaporan kinerja, yang tidak hanya mencakup pencapaian sasaran kinerja, tetapi juga memberikan analisis mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dari sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari upaya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pelaporan kinerja ini disusun secara rinci dengan mencermati berbagai aspek yang berkontribusi pada hasil yang dicapai.

Dalam setiap laporan kinerja, pemerintah tidak hanya mencatat angka atau hasil yang terukur, tetapi juga menggali lebih jauh faktor-faktor yang mendasari pencapaian atau ketidaksesuaian dengan target yang telah ditentukan. Analisis ini mencakup pemahaman mengenai kondisi eksternal dan internal yang memengaruhi implementasi program, termasuk tantangan sumber daya, kebijakan yang berubah, ataupun hambatan operasional lainnya. Dengan demikian, setiap laporan kinerja memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang ada, serta faktor-faktor yang perlu diperbaiki atau diperkuat.

Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga secara hati-hati memperhatikan keandalan data yang digunakan dalam pelaporan kinerja. Keandalan data menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa hasil yang dilaporkan akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu, langkah-langkah dalam memverifikasi dan memvalidasi data dilakukan secara terstruktur, guna menghindari kesalahan atau distorsi informasi yang dapat memengaruhi kualitas analisis. Pemerintah juga memastikan bahwa sistem pengumpulan dan pengelolaan data yang digunakan memiliki standar yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui tindak lanjut pelaporan kinerja yang komprehensif ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Pelaporan yang transparan dan berbasis data yang *valid* tidak hanya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, tetapi juga menjadi dasar yang kuat untuk perencanaan dan perbaikan kebijakan di masa depan.

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja tujuan/sasaran dengan realisasi pada tahun 2024. Selanjutnya dilakukan penghitungan untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) dan selanjutnya dianalisis tingkat keberhasilan setiap indikator untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan maupun kegagalan sebagai dan rekomendasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam penetapan kebijakan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam KEPKA LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan PERMEN PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yaitu sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (progres positif), dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ilustrasi perhitungan progres positif, yaitu sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase tingkat capaian kinerja} \\ \text{Indeks pendidikan 99,90\%} \end{array} = \frac{80,28}{80,44} \times 100\%$$

2. Semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (progres negatif), dengan menggunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase tingkat capaian} \\ \text{kinerja} \end{array} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ilustrasi perhitungan progres negatif, yaitu sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase tingkat capaian} \\ \text{kinerja indeks risiko bencana} \\ 85,91\% \end{array} = \frac{70 - (79,86 - 70)}{70} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan tujuan/sasaran, digunakan skala pengukuran tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Kategori Rentang Capaian

No	Capaian	Kategori Capaian
1.	≥ 100	Memenuhi Target
2.	< 100	Tidak Memenuhi Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyajikan setiap sasaran sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan dilakukan analisis kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target tahun 2024, kemudian melakukan perbandingan capaian

kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir, perbandingan target jangka menengah, secara daerah dan secara nasional. Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada PK Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024. Mengacu pada PK tahun 2024, terdapat 29 indikator kinerja untuk mewujudkan sasaran.

Secara rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran yang memenuhi target pada Tahun 2024 adalah sebesar **65,52%** dengan ketercapaian pada **indikator tujuan 80%** (4 Indikator tujuan mencapai target dan 1 indikator tujuan tidak mencapai target) dan pada **indikator sasaran 62,5%** (15 indikator sasaran mencapai target dan 9 indikator sasaran tidak mencapai target). Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dibandingkan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100\%$	9 = 7
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks pembangunan manusia	%	83,70	84,16	100,55	Memenuhi target
	Meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks pendidikan	%	80,83	80,83	100,00	Memenuhi target
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	75,84	75,80	99,95	Tidak memenuhi target
	Meningkatkan kesejahteraan keluarga	Indeks pembangunan keluarga	Predikat	Baik (70)	Sangat baik (84,16)	120,23	Memenuhi target
	Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks pembangunan pemuda	Poin	55,00	55,86	101,56	Memenuhi target
	Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks pembangunan gender	Poin	94,53	93,96	99,40	Tidak memenuhi target
		Indeks pemberdayaan gender	Poin	73,86	72,67	98,39	Tidak memenuhi target
Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi		Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	Poin	7,03	8,29	117,92	Memenuhi target
	Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Rasio konektivitas kota	Rasio	0,89	0,93	104,49	Memenuhi target
		Kinerja lalu lintas/transportasi kota (v/c ratio)	Rasio	0,54	0,54	100,00	Memenuhi target
Meningkatkan kualitas		Indeks kota layak huni	Poin	71,77	70,03	97,58	Tidak Memenuhi target

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	6	7	8 = (7/6)*100 %	9 =7
kota sebagai kota layak huni	Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	60,66	61,03	100,61	Memenuhi target
		Persentase pemukiman layak huni	%	99,69	99,6	99,91	Tidak memenuhi target
		Cakupan pengelolaan sampah	%	100	99,54	99,54	Tidak memenuhi target
		Ruang terbuka hijau publik	%	4,59	8	174,29	Memenuhi target
	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan	Indeks rasa aman	Predikat	Aman (66,97)	Aman (66,97)	100,00	Memenuhi target
		Indeks demokrasi	Predikat	Baik (81)	Tinggi (86,04)	106,22	Memenuhi target
	Meningkatkan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam	Indeks risiko bencana	Predikat	Rendah (60)	Sedang (68,10)	86,5	Tidak memenuhi target
Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah		Indeks daya saing daerah	Predikat	Sangat tinggi (3,81)	Sangat tinggi (3,81)	100,00	Memenuhi target
	Meningkatkan sektor ekonomi kreatif	Nilai sektor ekonomi kreatif	(Triliun rupiah)	14,68	14,68	100,00	Memenuhi target
	Meningkatkan investasi	Nilai investasi tahunan	(Triliun rupiah)	7,44	8,47	113,84	Memenuhi target
	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja per total output	(Rupiah)	169.838.260	186.503.283,34	109,81	Memenuhi target
		Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa	(Rupiah)	109.284.473	118.560.796,91	108,49	Memenuhi target
Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien		Indeks reformasi birokrasi	Poin	76,79	85,61	111,49	Memenuhi target
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat	BB	B (69,06)	98,66	Tidak memenuhi target
		Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Poin	4,00	3,54	88,50	Tidak memenuhi target
		Opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah	Predikat	WTP	WTP	100,00	Memenuhi target

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian $8 = \frac{7}{6} \times 100\%$	
1	2	3	4	6	7		9 = 7
		Indeks persepsi korupsi/ survei penilaian integritas dikeluarkan oleh KPK RI	Poin	84,00	76,25	90,77	Tidak memenuhi target
		Indeks kepuasan masyarakat	Poin	89,87	90,25	100,42	Memenuhi target

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Berdasarkan analisis terhadap 5 indikator tujuan dan 24 indikator sasaran dapat diketahui bahwa 19 indikator kinerja mendapat kategori memenuhi target dan 10 indikator kinerja mendapat kategori tidak memenuhi target. Hasil dari capaian kinerja tersebut turut didukung oleh program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam PK Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dan merupakan kesinambungan substansi program/kegiatan yang sudah berjalan pada periode sebelumnya. Berikut adalah gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan dalam PK Tahun 2024 yang dirinci dalam sub bab berikut ini.

3.1.1 Tujuan 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu tolok ukur untuk misi ke-1, yang dinilai menggunakan indikator tujuan yaitu **indeks pembangunan manusia** dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan 1 "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" Dibandingkan Target PK Tahun 2024

Indikator Tujuan	Capaian 2023	2024			Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks pembangunan manusia	83,57	83,70	84,16	100,55	Memenuhi target

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten Tahun 2024 BRS No. 60/12/36/Th. XVII, 2 Desember 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk tujuan **meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator ini termasuk dalam kategori memenuhi target dengan persentase capaian sebesar 100,55%.

Sasaran 1 Tujuan 1: Meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan

Sasaran 1 tujuan 1 **meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-1 yaitu **meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**. Sasaran ini diukur menggunakan sebanyak 1 (satu) indikator

sasaran yaitu **indeks pendidikan**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan Kualitas Layanan dan Akses Pendidikan” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan	1. Indeks pendidikan	%	80,83	80,83	100	Memenuhi target

Sumber : Dinas Pendidikan, 2026.

Capaian indikator kinerja 1 indeks pendidikan pada Tahun 2024 sebesar 80,83% dari target sebesar 80,83%, maka capaian kinerja mencapai 100% atau kategori capaian memenuhi target.

**Sasaran 2 Tujuan 1:
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**

Sasaran 2 tujuan 1 **meningkatkan derajat kesehatan masyarakat** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-1 yaitu **meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**. Sasaran ini diukur menggunakan sebanyak 1 (satu) indikator sasaran yaitu **angka harapan hidup**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Angka harapan hidup	Tahun	75,84	75,80	99,95	Tidak memenuhi target

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024.

Capaian indikator kinerja 2 angka harapan hidup pada tahun 2024 sebesar 75,80 tahun dari target sebesar 75,84 tahun, maka capaian kinerja mencapai 99,95% atau kategori capaian tidak memenuhi target.

**Sasaran 3 Tujuan 1:
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga**

Sasaran 3 tujuan 1 **“meningkatkan kesejahteraan keluarga”** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-1 yaitu **“meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan**

berdaya saing". Sasaran ini diukur menggunakan sebanyak 1 (Satu) indikator sasaran yaitu **indeks pembangunan keluarga**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 3 "Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga" Tujuan 1 "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kesejahteraan keluarga	1. Indeks pembangunan keluarga	Predikat	Baik (70)	Sangat baik (84,16)	120,23	Memenuhi target

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, 2024.

Capaian indikator kinerja 3 indeks pembangunan keluarga pada tahun 2024 sebesar baik (70) dari target sebesar sangat baik (84,16), maka capaian kinerja mencapai 120,23% atau kategori capaian memenuhi target.

Sasaran 4 Tujuan 1: Meningkatkan Daya Saing Pemuda

Sasaran 4 tujuan 1 **meningkatkan daya saing pemuda** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-1 yaitu **meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**. Sasaran ini diukur menggunakan sebanyak 1 (satu) indikator sasaran yaitu **indeks pembangunan pemuda**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 4 "Meningkatkan Daya Saing Pemuda" Tujuan 1 "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan daya saing pemuda	1. Indeks pembangunan pemuda	Poin	55,00	55,86	101,56	Memenuhi target

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2024.

Capaian indikator kinerja 4 indeks pembangunan pemuda pada tahun 2024 sebesar 55,86 poin dari target sebesar 55,00, maka capaian kinerja mencapai 101,56% atau kategori capaian memenuhi target.

Sasaran 5 Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berbasis Gender

Sasaran 5 tujuan 1 **meningkatkan pembangunan berbasis gender** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-1 yaitu **"meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing"**. Sasaran ini diukur menggunakan sebanyak 2 (dua) indikator sasaran yaitu

indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 5 “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Gender” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pembangunan gender	1. Indeks pembangunan gender	Poin	94,53	93,96	99,40	Tidak memenuhi target
		2. Indeks pemberdayaan gender	Poin	73,86	72,67	98,39	Tidak memenuhi target

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, 2024.

Capaian indikator kinerja 5 indeks pembangunan gender pada tahun 2024 sebesar 93,96 poin dari target sebesar 94,53 poin, maka capaian kinerja mencapai 99,40% atau kategori capaian tidak memenuhi target. Capaian indikator kinerja 6 indeks pemberdayaan gender pada tahun 2024 sebesar 73,86 poin dari target sebesar 72,67 poin, maka capaian kinerja mencapai 98,39% atau kategori capaian tidak memenuhi target.

3.1.2 Tujuan 2 : Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi

Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi merupakan salah satu tolak ukur untuk misi ke 2, yang dinilai menggunakan indikator tujuan yaitu **indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar** dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Tujuan 2 “Meningkatkan Konektivitas Dan Aksesibilitas Infrastruktur Transportasi” Dibandingkan Target PK Tahun 2024

Indikator Tujuan	Capaian 2023	2024			Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	83,57	7,03	8,29	117,92	Memenuhi target

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk tujuan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator ini termasuk dalam kategori memenuhi target dengan nilai 8,29 poin dan persentase capaian sebesar 117,92%.

Sasaran 1 Tujuan 2: Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan

Sasaran 1 tujuan 2 **meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-2 yaitu **meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi	Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	1 Rasio konektivitas kota	Rasio	0,89	0,93	104,49	Memenuhi target
		2 Kinerja lalu lintas/transportasi kota (v/c ratio)	Rasio	0,54	0,54	100	Memenuhi target

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024.

Capaian indikator kinerja sasaran “rasio konektivitas kota pada tahun 2024 sebesar 0,93 dari target sebesar 0,89, maka capaian kinerja mencapai 104,49% atau kategori capaian memenuhi target. Capaian indikator kinerja lalu lintas/transportasi kota (v/c ratio) pada tahun 2024 sebesar 0,54 dengan target 0,54, maka capaian 100% atau kategori memenuhi target.

3.1.3 Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni

Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni merupakan salah satu tolok ukur untuk misi ke-3, yang dinilai menggunakan indikator tujuan yaitu **indeks kota layak huni** dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Tujuan 3 “Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni” Dibandingkan Target PK Tahun 2024

Indikator Tujuan	Capaian 2023	2024			Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks kota layak huni	69,5	71,77	70,03	97,58	Tidak memenuhi target

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk tujuan **Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator ini termasuk dalam kategori “Tidak Memenuhi Target” dengan persentase capaian sebesar 97,58%.

Sasaran 1 Tujuan 3: Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan

Sasaran 1 tujuan 3 **meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-3 yaitu “**meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni**”. Sasaran ini dinilai menggunakan sebanyak 4 (empat) indikator sasaran yaitu **indeks kualitas lingkungan hidup, persentase pemukiman layak huni, cakupan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau publik**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perkotaan” Tujuan 3 “Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni” Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni	Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan	1. Indeks kualitas lingkungan hidup	Point	60,66	61,03	100,61	Memenuhi target
		2. Persentase pemukiman layak huni	%	99,69	99,6	99,91	Tidak memenuhi target
		3. Cakupan pengelolaan sampah	%	100	99,54	99,54	Tidak memenuhi target
		4. Ruang terbuka hijau publik	%	4,59	8	174,29	Memenuhi target

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Cipta Kaya dan Tata Ruang 2024.

capaian indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2024 sebesar 61,03 poin dari target sebesar 60,66 poin, maka capaian kinerja mencapai 100,61% atau kategori capaian memenuhi target. indikator kinerja persentase pemukiman layak huni pada tahun 2024 sebesar 99,6% dari target sebesar 99,69%, maka capaian kinerja mencapai 99,91% atau kategori capaian tidak memenuhi target. indikator kinerja cakupan pengelolaan sampah pada tahun 2024 sebesar 99,54% dari target sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 99,54% atau kategori capaian tidak memenuhi target. indikator kinerja ruang terbuka hijau publik pada tahun 2024 sebesar 8% dari target sebesar 4,59%, maka capaian kinerja mencapai 174,29% atau kategori capaian memenuhi target.

Sasaran 2 Tujuan 3:
Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pendidikan Politik serta Wawasan Kebangsaan

Sasaran 2 tujuan 3 **meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-3 yaitu **meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni**. Sasaran strategis ini diukur menggunakan sebanyak 2 (dua) indikator sasaran yaitu indeks rasa aman dan indeks demokrasi. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan” Tujuan 3 “Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni” Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan	1. Indeks rasa aman	Predikat	Aman (66,97)	Aman (66,97)	100	Memenuhi target
		2. Indeks demokrasi	Predikat	Baik (81)	Tinggi (86,04)	106,22	Memenuhi target

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , 2024.

Capaian indikator kinerja indeks rasa aman pada tahun 2024 sebesar aman (66,98) dari target aman (66,97) maka capaian kinerja mencapai 100% atau kategori capaian memenuhi target dan capaian indikator kinerja indeks demokrasi pada tahun 2024 sebesar baik (86,04) dari target baik (81) maka capaian kinerja mencapai 106,22% atau kategori capaian memenuhi target.

Sasaran 3 Tujuan 3: Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam

Sasaran 3 tujuan 3 **meningkatkan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-3 yaitu **meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni**. Sasaran ini diukur menggunakan sebanyak 1 (satu) indikator sasaran yaitu indeks risiko bencana. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 3 “Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam” Tujuan 1 “Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni” Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni	Meningkatkan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam	1. Indeks risiko bencana	Predikat	Rendah (60)	Sedang (68,10)	86,5	Tidak memenuhi target

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024.

Capaian indikator kinerja indeks risiko bencana pada tahun 2024 sebesar sedang (68,10) dari target rendah (60) maka kategori capaian tidak memenuhi target.

3.1.4 Tujuan 4 : Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah

Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah merupakan salah satu tolok ukur untuk misi ke-4, yang dinilai menggunakan indikator tujuan yaitu **indeks daya saing daerah** dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Tujuan 4 “Meningkatkan Perekonomian Dan Daya Saing Ekonomi Daerah” Dibandingkan Target PK Tahun 2024

Indikator Tujuan	Capaian 2023	2024			Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks daya saing daerah	Sangat tinggi (3,81)	Sangat tinggi (3,81)	Sangat tinggi (3,81)	100	Memenuhi target

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk tujuan meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator ini termasuk dalam kategori memenuhi target dengan persentase capaian sebesar 100%.

Sasaran 1 Tujuan 4: Meningkatkan Sektor Ekonomi Kreatif

Sasaran 1 tujuan 4 **meningkatkan sektor ekonomi** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-4 yaitu **meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah**. Sasaran ini diukur menggunakan sebanyak 1 (satu) indikator sasaran yaitu nilai sektor ekonomi kreatif. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan sektor ekonomi kreatif” Tujuan 4 “Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah” Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah	Meningkatkan sektor ekonomi kreatif	1. Nilai sektor ekonomi kreatif	Triliun rupiah	14,68	14,68	100	Memenuhi target

Sumber : Dinas Pariwisata, 2024.

Capaian indikator kinerja nilai sektor ekonomi kreatif pada tahun 2024 sebesar 14,68 dari target 14,68. Maka capaian kinerja mencapai 100% atau kategori capaian memenuhi target.

Sasaran 2 Tujuan 4: Meningkatkan Investasi

Sasaran 2 tujuan 4 **meningkatkan investasi** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-4 yaitu **meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah**. Sasaran ini dinilai menggunakan sebanyak 1 (satu) indikator sasaran yaitu meningkatkan investasi. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan Investasi” Tujuan 4 “Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah” Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah	Meningkatkan investasi	1. Nilai investasi tahunan (triliun rupiah)	Triliun rupiah	7,44	8,47	113,84	Memenuhi target

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024.

Capaian indikator kinerja nilai investasi tahunan pada tahun 2024 sebesar 8,47 dari target 7,44. Maka capaian kinerja mencapai 113,84% atau kategori capaian memenuhi target.

Sasaran 3 Tujuan 4: Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

Sasaran 3 tujuan 4 **meningkatkan produktivitas tenaga kerja** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-4 yaitu **meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah**. Sasaran ini dinilai menggunakan sebanyak 2 (dua) indikator sasaran yaitu produktivitas

tenaga kerja per total *output* dan produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 3 “Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja” Tujuan 4 “Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni” Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	1. Produktivitas tenaga kerja per total <i>output</i>	Rupiah	169.838.260	186.503.283,34	109,81	Memenuhi target
		2. Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa (rupiah)	Rupiah	109.284.473	118.560.796,91	108,49	Memenuhi target

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2024.

Capaian indikator kinerja produktivitas tenaga kerja per total *output* pada tahun 2024 sebesar Rp186.503.283,34 dari target Rp169.838.260, maka capaian kinerja mencapai 109,81% atau kategori capaian memenuhi target. Capaian indikator kinerja produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa pada tahun 2024 sebesar Rp118.560.796,91 dari target Rp109.284.473, maka capaian indikator 108,49% atau memenuhi target.

3.1.5 Tujuan 5 : Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu tolok ukur untuk misi ke 5, yang dinilai menggunakan indikator tujuan yaitu **indeks reformasi birokrasi** dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Target 5 “Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien” Dibandingkan Target PK Tahun 2024

Indikator Tujuan	Capaian 2023	2024			Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks reformasi birokrasi	76,79	76,79	85,61	111,49	Memenuhi target

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk tujuan mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator ini termasuk dalam kategori memenuhi target dengan persentase capaian sebesar 111,49%.

Sasaran 1 Tujuan 5: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Sasaran 1 tujuan 5 **meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-5 yaitu **mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien**. Sasaran ini dinilai menggunakan sebanyak 5 (lima) indikator sasaran yaitu nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah, indeks persepsi korupsi/ survei penilaian integritas dikeluarkan oleh KPK RI dan indeks kepuasan masyarakat. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” Tujuan 5 “Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien” Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien	Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien	1. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat	BB	B (69,06)	98,66	Tidak memenuhi target
		2. Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Poin	4,00	3,54	88,50	Tidak memenuhi target
		3. Opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah	Predikat	WTP	WTP	100	Memenuhi target
		4. Indeks persepsi korupsi/ survei penilaian integritas dikeluarkan oleh KPK RI	Poin	84,00	76,25	90,77	Tidak memenuhi target
		5. Indeks kepuasan masyarakat	Poin	89,87	90,25	100,42	Memenuhi target

Sumber : KEMENPAN RB, Sekertariat Daerah, BPK, dan Inspektorat.

Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun 2024 sebesar B (69,06) dari target BB, maka capaian kinerja mencapai 98,66% atau kategori capaian tidak memenuhi target. Capaian indikator kinerja nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2024 sebesar 3,54 dari target 4,00, maka capaian kinerja 88,50% atau kategori tidak memenuhi target. Capaian indikator opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah tahun 2024 adalah WTP dari target WTP maka kategori capaian 100% atau kategori memenuhi target. Capaian indikator indeks persepsi korupsi/survei penilaian integritas dikeluarkan oleh KPK RI tahun 2024 76,25 dari target 84,00 maka capaian kinerja mencapai 90,77% atau tidak memenuhi target. Capaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2024 90,25 dari target 89,87 maka capaian kinerja 100,42% atau kategori memenuhi target.

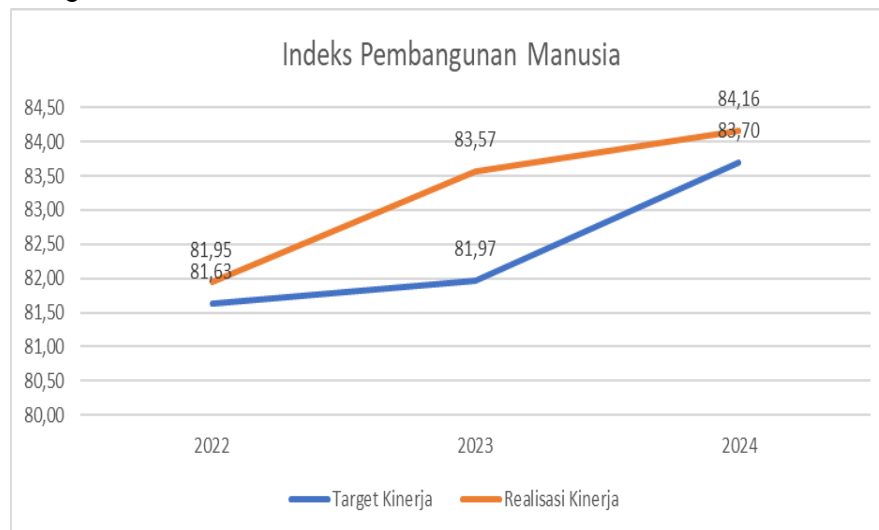
3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja tahun 2022 sampai dengan 2024 bahwa terdapat 5 Indikator tujuan yang mengalami kenaikan. Selain itu, terdapat 19 Indikator sasaran yang mengalami kenaikan, 3 indikator sasaran yang mengalami penurunan dan 2 indikator sasaran yang stagnan.

3.2.1.1 Tujuan 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Adapun perkembangan capaian indikator tujuan 1 mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 tersaji pada gambar berikut.

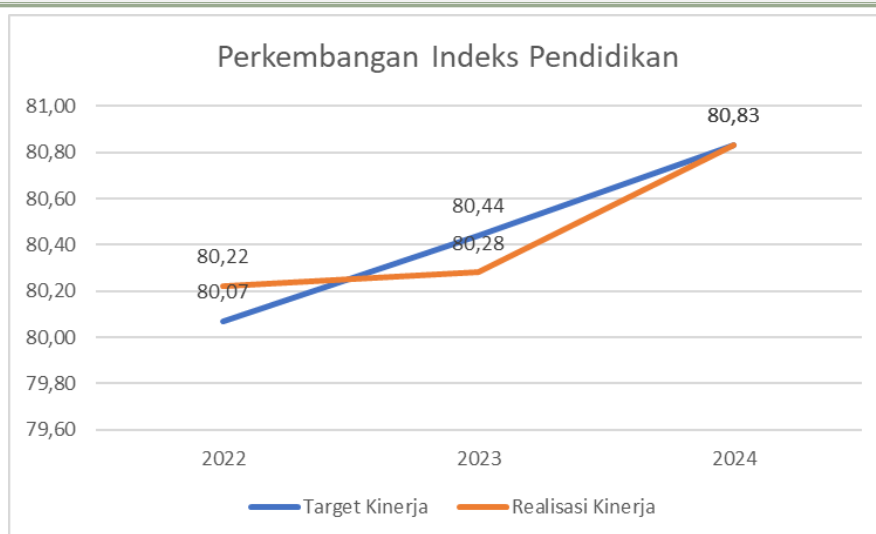


Gambar 3.1 Tren Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 s.d 2024

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024.

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada tujuan 1 **meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing** sebagaimana gambar tersebut, capaian indikator tujuan 1 indeks pembangunan manusia cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator tujuan 1 indeks pembangunan manusia sebesar 81,95% dan meningkat menjadi 84,16% pada tahun 2024.

Sasaran 1 Tujuan 1: "Meningkatkan Kualitas Layanan dan Akses Pendidikan"

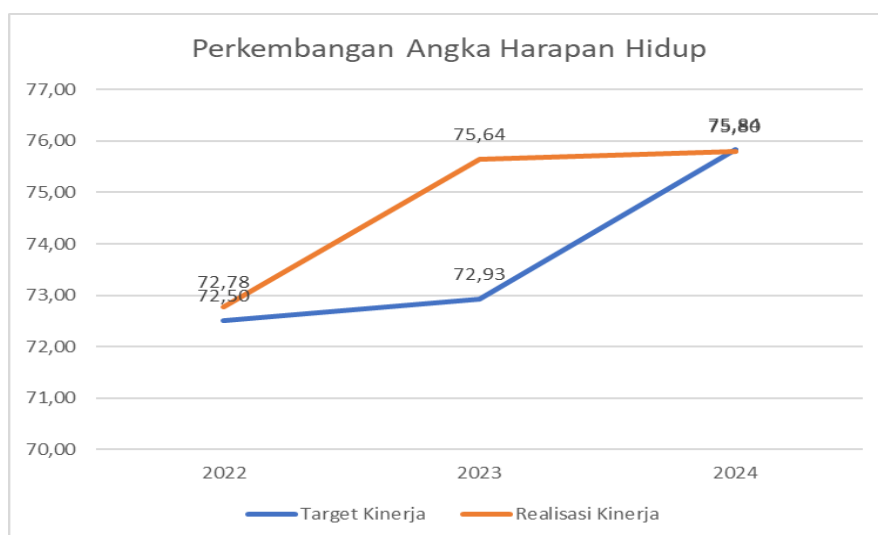


Gambar 3.2 Tren Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran 1 tujuan 1 **meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan** sebagaimana gambar tersebut, capaian indikator kinerja indeks pendidikan cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja indeks pendidikan sebesar 80,22% dan meningkat menjadi 80,83% pada tahun 2024.

Sasaran 2 Tujuan 1:
“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”



Gambar 3.3 Tren Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024

Sumber : Dinas Kesehatan dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran 2 tujuan 1 **meningkatkan derajat kesehatan masyarakat** sebagaimana gambar tersebut, capaian indikator kinerja angka harapan hidup cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja angka harapan hidup sebesar 72,78 tahun dan meningkat menjadi 75,80 tahun pada tahun 2024.

Sasaran 3 Tujuan 1:
“Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga”

Tabel 3.21 Tren Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d. 2024

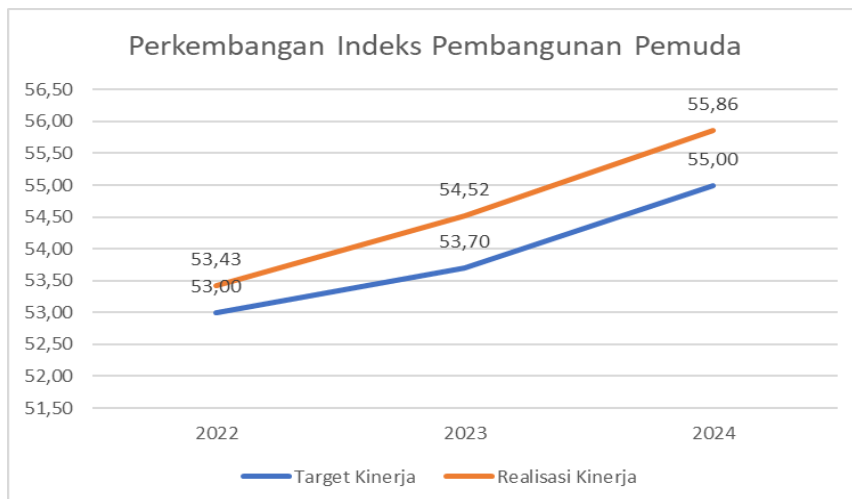
Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
2022	Baik	Baik
2023	Baik (70)	Baik (70)
2024	Baik (70)	Sangat Baik (84,16)

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran 3 tujuan 1 **meningkatkan kesejahteraan keluarga** sebagaimana tabel tersebut, capaian indikator kinerja indeks pembangunan keluarga cenderung kenaikan selama tahun 2022 sampai

dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja indeks pembangunan keluarga sebesar baik dan meningkat menjadi sangat baik (84,16) pada tahun 2024.

Sasaran 4 Tujuan 1:
"Meningkatkan Daya Saing Pemuda"

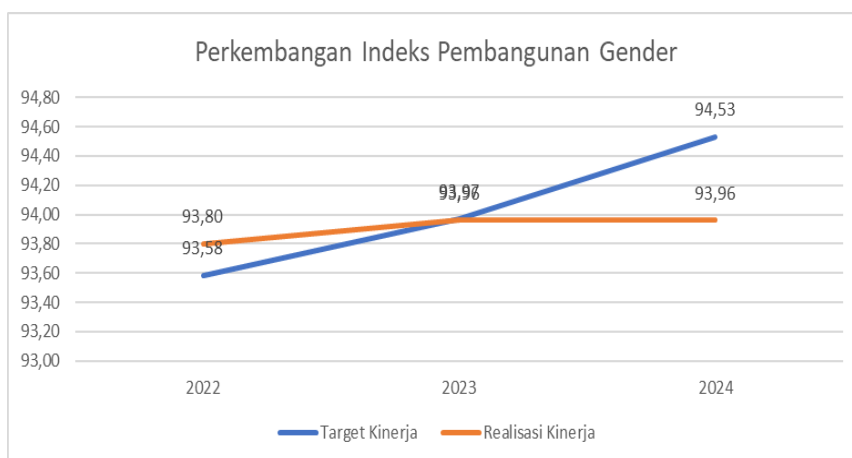


Gambar 3.4 Tren Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2022-2024.

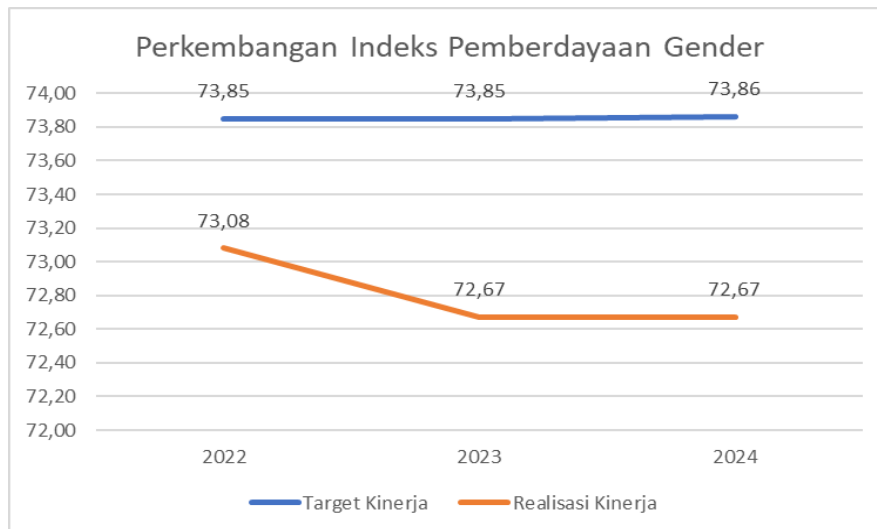
Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran 4 tujuan 1 **meningkatkan daya saing pemuda** sebagaimana gambar tersebut, capaian indikator kinerja indeks pembangunan pemuda cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja indeks pembangunan pemuda sebesar 53,43 poin dan meningkat menjadi 55,86 poin pada tahun 2024.

Sasaran 5 Tujuan 1:
"Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berbasis Gender"



Gambar 3.5 Tren Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024



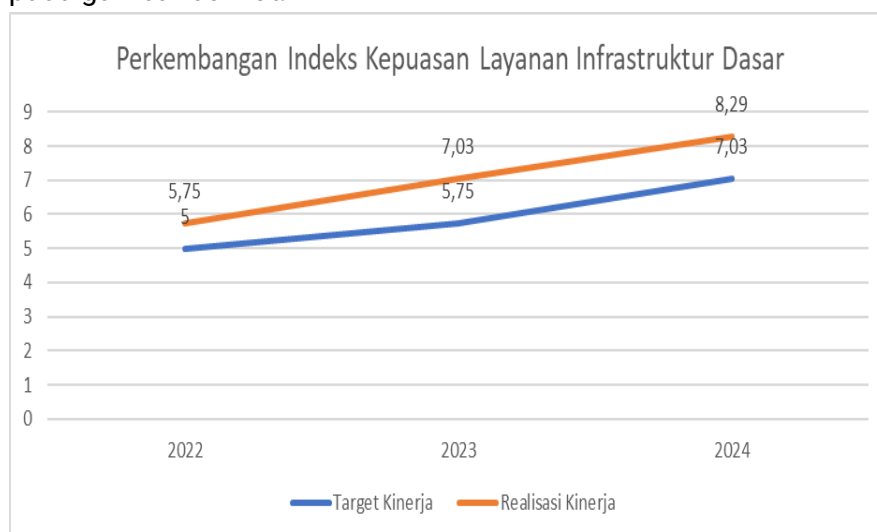
Gambar 3.6 Tren Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran 4 tujuan 1 **meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender** sebagaimana gambar tersebut, capaian indikator kinerja indeks pembangunan gender cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja 5 indeks pembangunan gender sebesar 93,80 poin dan meningkat menjadi 93,96 poin pada tahun 2024. Capaian indikator kinerja indeks pemberdayaan gender cenderung mengalami penurunan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja 5 indeks pembangunan gender sebesar 73,08 poin dan menurun menjadi 72,67 poin pada tahun 2024.

3.2.1.2 Tujuan 2 : Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Transportasi

Adapun perkembangan capaian indikator tujuan 2 mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 tersaji pada gambar berikut.

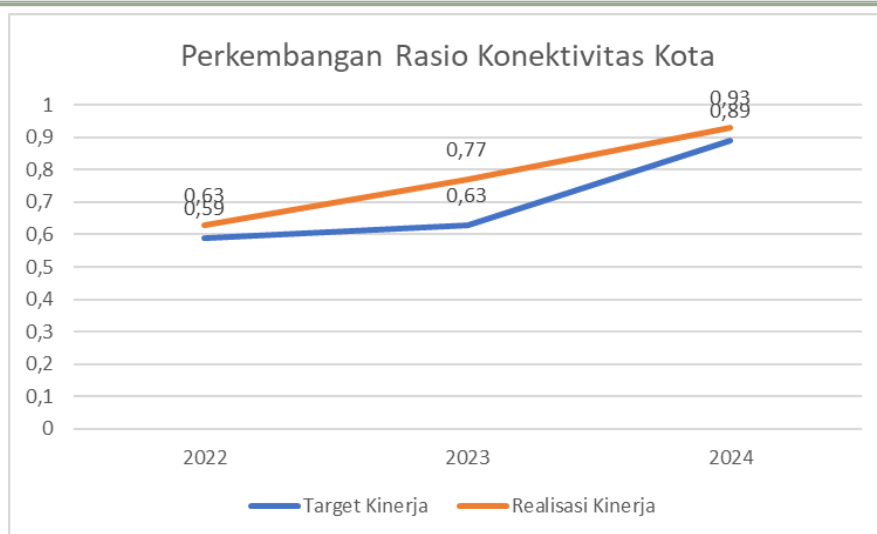


Gambar 3.7 Tren Perkembangan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 s.d 2024

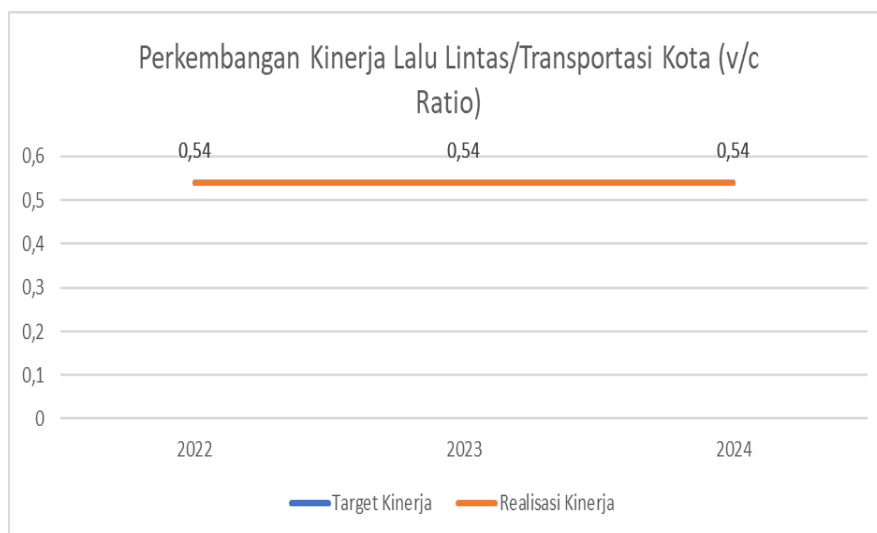
Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Berdasarkan perkembangan capaian indikator tujuan 2 **meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi** sebagaimana gambar tersebut, capaian indikator tujuan 2 indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar sebesar 5,75 poin dan meningkat menjadi 8,29 poin pada tahun 2024.

Sasaran 1 Tujuan 2:
“Meningkatkan Kinerja Trasportasi dan jaringan jalan perkotaan”



Gambar 3.8 Tren Perkembangan Rasio Konektivitas Kota, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 -2024
 Sumber : Dinas Perhubungan dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.



Gambar 3.9 Kinerja Lalu Lintas/Transportasi Kota (v/c ratio) Kota, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024

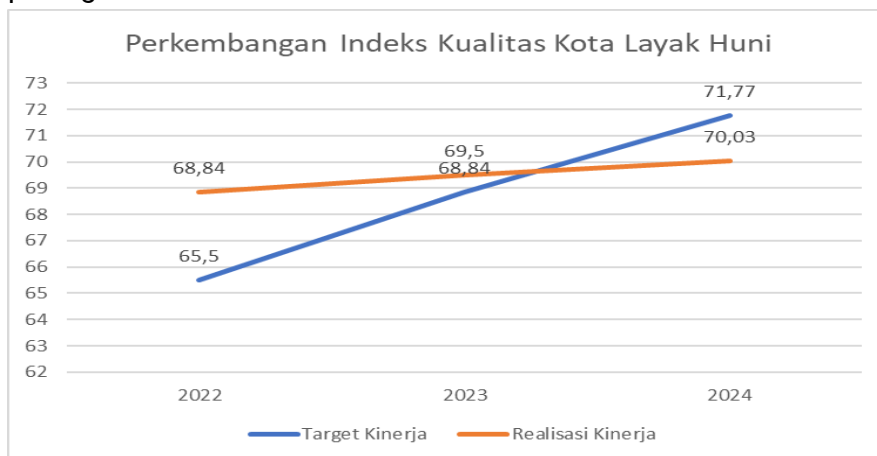
Sumber : Dinas Perhubungan dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran 1 tujuan 2 **meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan** sebagaimana gambar tersebut, capaian indikator kinerja rasio konektivitas kota cenderung mengalami

peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja rasio konektivitas kota sebesar 0,63 dan meningkat 0,93 pada tahun 2024. Capaian indikator kinerja lalu lintas/transportasi kota (*v/c ratio*) cenderung mengalami stagnan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja lalu lintas/transportasi kota (*v/c ratio*) sebesar 0,54 dan stagnan 0,54 pada tahun 2024.

3.2.1.3 Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni

Adapun perkembangan capaian indikator tujuan 3 mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 tersaji pada gambar berikut.

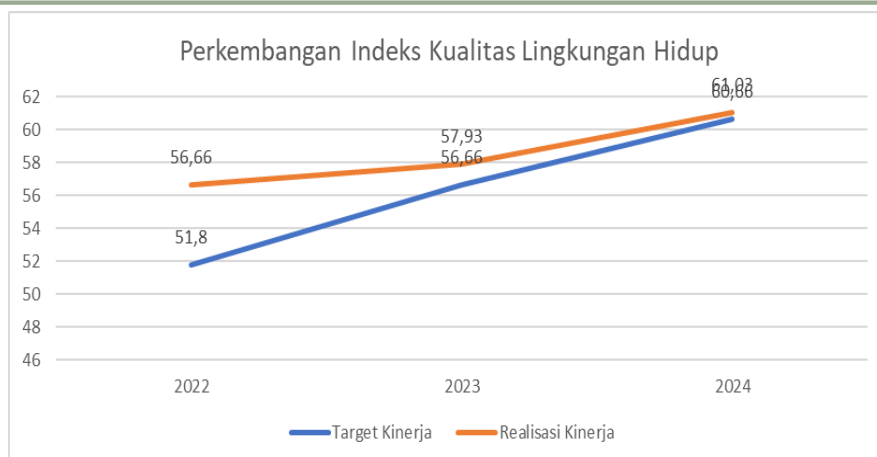


Gambar 3.10 Tren Perkembangan Indeks Kualitas Kota Layak Huni Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 s.d 2024

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Berdasarkan perkembangan capaian indikator tujuan pada sasaran 1 tujuan 3 **meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni** sebagaimana gambar tersebut, capaian indikator tujuan 3 indeks kota layak huni cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator tujuan 3 indeks kota layak huni sebesar 68,84 poin dan meningkat menjadi 70,03 poin pada tahun 2024.

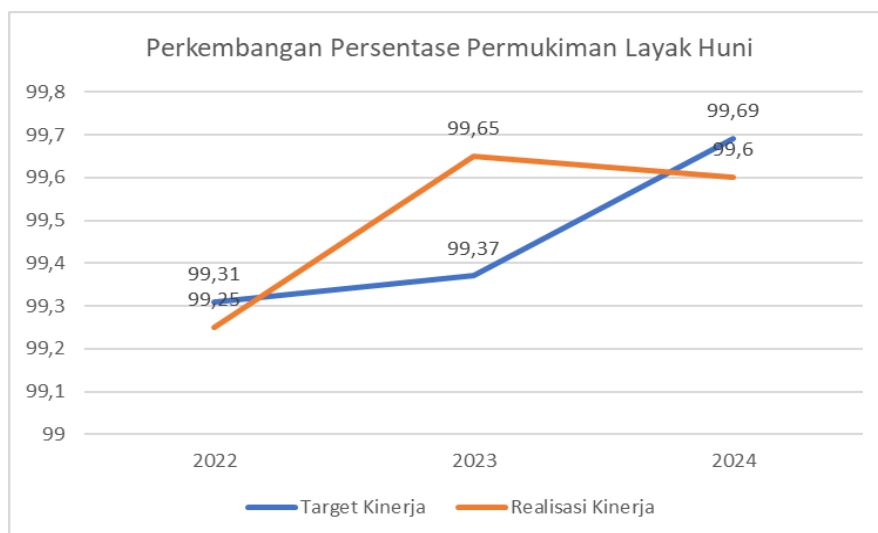
Sasaran 1 Tujuan 3: "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perkotaan"



Gambar 3.11 Tren Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

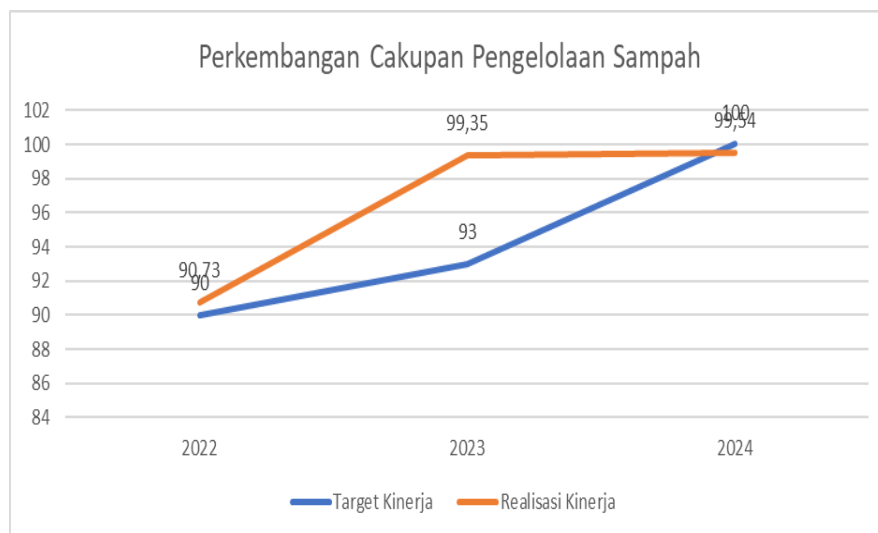
Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran 1 tujuan 3 **meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan** sebagaimana gambar tersebut, capaian indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 56,66 poin dan meningkat 61,03 poin pada tahun 2024.



Gambar 3.12 Tren Perkembangan Persentase Pemukiman layak huni, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

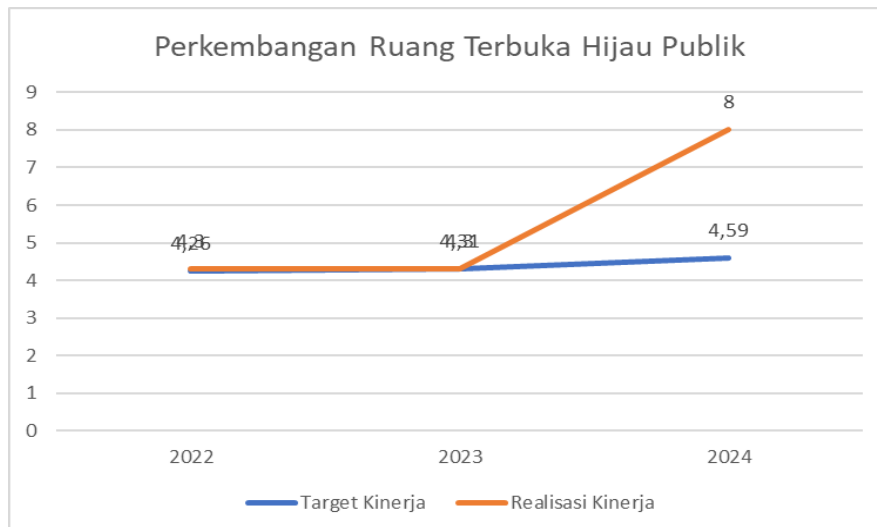
Capaian indikator kinerja persentase pemukiman layak huni cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja persentase pemukiman layak huni sebesar 99,25% dan meningkat 99,6% pada tahun 2024.



Gambar 3.13 Tren Perkembangan Cakupan Pengelolaan Sampah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Capaian indikator kinerja cakupan pengelolaan sampah cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja cakupan pengelolaan sampah sebesar 90,73% dan meningkat 99,54% pada tahun 2024.



Gambar 3.14 Tren Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Capaian indikator kinerja ruang terbuka hijau publik cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja ruang terbuka hijau publik sebesar 4,3% dan meningkat 8% pada tahun 2024.

Sasaran 2 Tujuan 3:

"Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pendidikan Politik Serta Wawasan Kebangsaan"

Tabel 3.22 Tren Perkembangan Indeks Rasa Aman Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d. 2024

Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
2022	Aman	Aman (66,69)
2023	Aman (66,97)	Aman (66,97)
2024	Aman (66,97)	Aman (66,97)

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran 2 tujuan 3 **meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan** sebagaimana tabel tersebut, capaian indikator kinerja indeks rasa aman cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja 1 indeks rasa aman sebesar aman (66,69) dan meningkat menjadi aman (66,97) pada tahun 2024.

Tabel 3.23 Tren Perkembangan Indeks Demokrasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d. 2024

Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
2022	Sedang (80)	Baik (81)
2023	Baik (>80)	Baik (81)
2024	Baik (81)	Tinggi (86,04)

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran 2 tujuan 3 **meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan**

kebangsaan sebagaimana tabel tersebut, capaian indikator kinerja indeks demokrasi cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja indeks demokrasi sebesar baik (81) dan meningkat menjadi tinggi (86,04) pada tahun 2024.

Sasaran 3 Tujuan 3:

"Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam"

Tabel 3.24 Tren Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d. 2024

Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
2022	Rendah (76)	Sedang (79,86)
2023	Rendah (70)	Sedang (79,86)
2024	Rendah	Sedang (68,10)

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran 2 tujuan 3 **meningkatkan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam** sebagaimana tabel tersebut, capaian indikator kinerja indeks risiko bencana cenderung mengalami penurunan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja indeks risiko bencana sebesar sedang (79,86) dan menurun menjadi sedang (68,10) pada tahun 2024.

3.2.1.4 Tujuan 4 : Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah

Adapun perkembangan capaian indikator tujuan 4 mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 tersaji pada tabel.

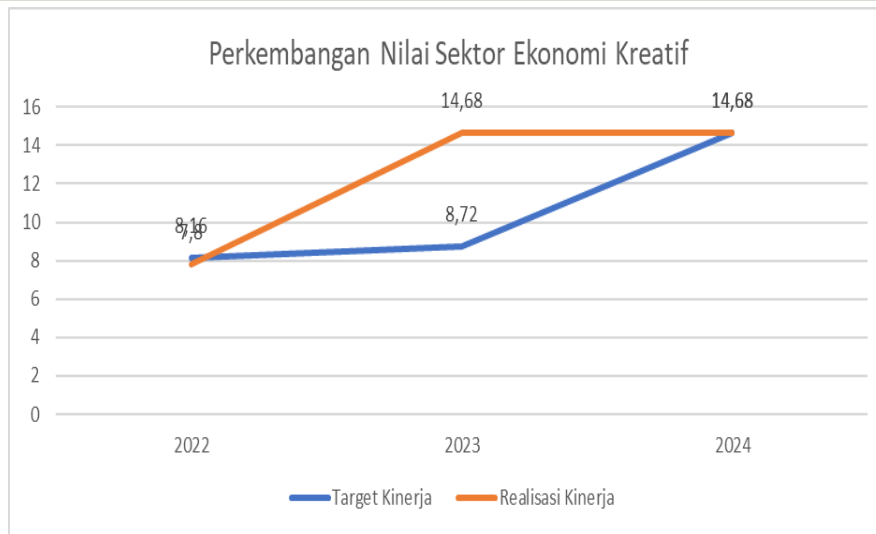
Tabel 3.25 Tren Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d. 2024

Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
2022	Sedang (2,5)	Sangat Tinggi (3,71)
2023	Sangat Tinggi (3,75)	Sangat Tinggi (3,81)
2024	Sangat Tinggi (3,81)	Sangat Tinggi (3,81)

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran 2 tujuan 4 **meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah** sebagaimana tabel tersebut, capaian indikator kinerja indeks daya saing daerah cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja indeks daya saing daerah sebesar sangat tinggi (3,71) dan meningkat menjadi sangat tinggi (3,81) pada tahun 2024.

Sasaran 1 Tujuan 4:
"Meningkatkan Sektor Ekonomi Kreatif"

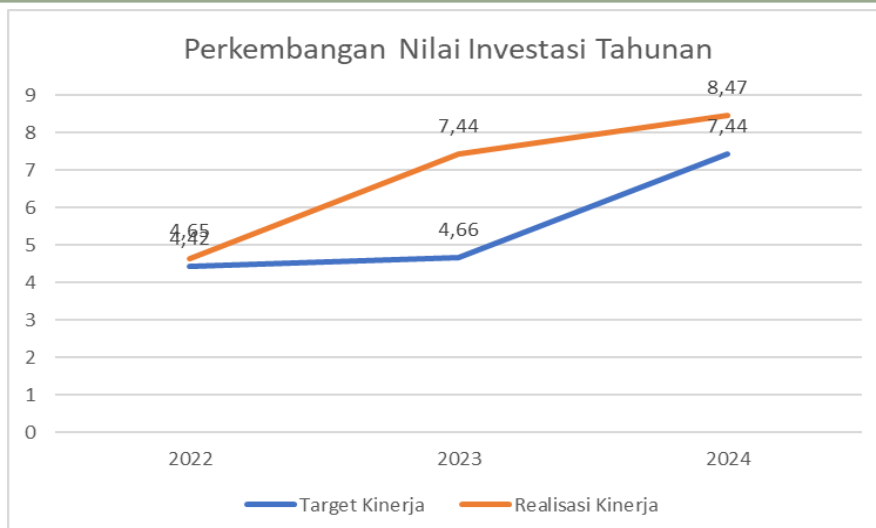


Gambar 3.15 Tren Perkembangan Nilai Sektor Ekonomi Kreatif, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024

Sumber : Dinas Pariwisata dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran 1 tujuan 4 **meningkatkan sektor ekonomi kreatif** sebagaimana gambar tersebut, capaian indikator kinerja nilai sektor ekonomi kreatif cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja nilai sektor ekonomi kreatif sebesar 7,8 triliun rupiah dan meningkat 14,68 triliun rupiah pada tahun 2024.

Sasaran 2 Tujuan 4:
"Meningkatkan Investasi"

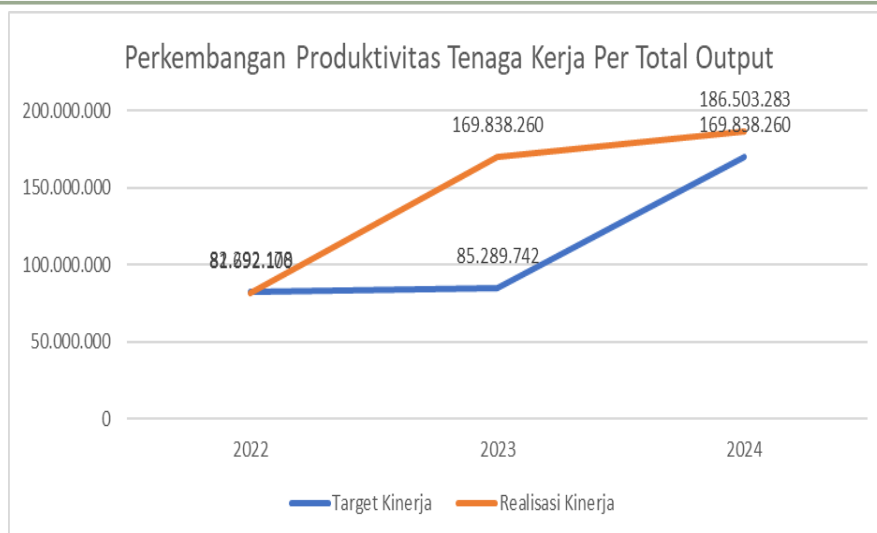


Gambar 3.16 Tren Perkembangan Nilai Investasi Tahunan, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran 2 tujuan 4 **meningkatkan sektor ekonomi kreatif** sebagaimana gambar tersebut, capaian indikator kinerja nilai investasi tahunan cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja nilai investasi tahunan sebesar 4,65 triliun rupiah dan meningkat 8,47 triliun rupiah pada tahun 2024.

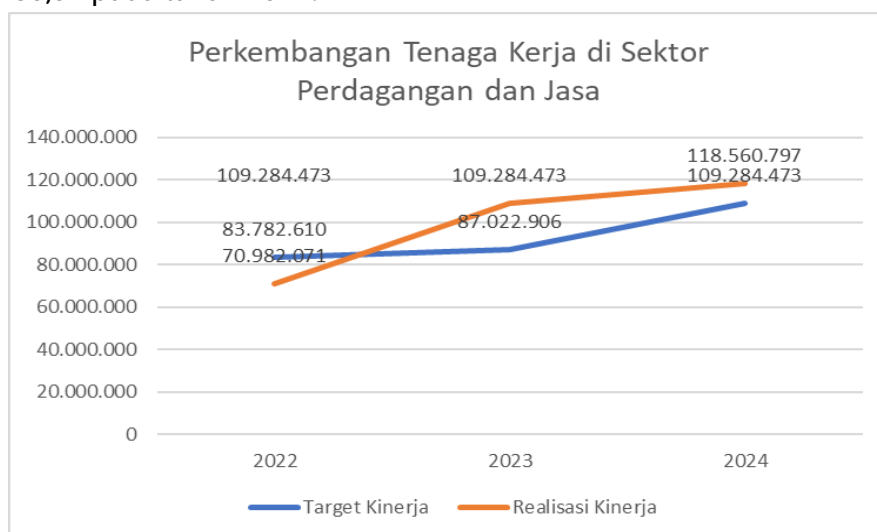
Sasaran 3 Tujuan 4:
"Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja"



Gambar 3.17 Tren Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja Per Total Output, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran 3 tujuan 4 **meningkatkan produktivitas tenaga kerja** sebagaimana gambar tersebut, capaian indikator kinerja produktivitas tenaga kerja per total *output* cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja produktivitas tenaga kerja per total *output* sebesar Rp81.692.100 dan meningkat Rp186.503.283,34 pada tahun 2024.



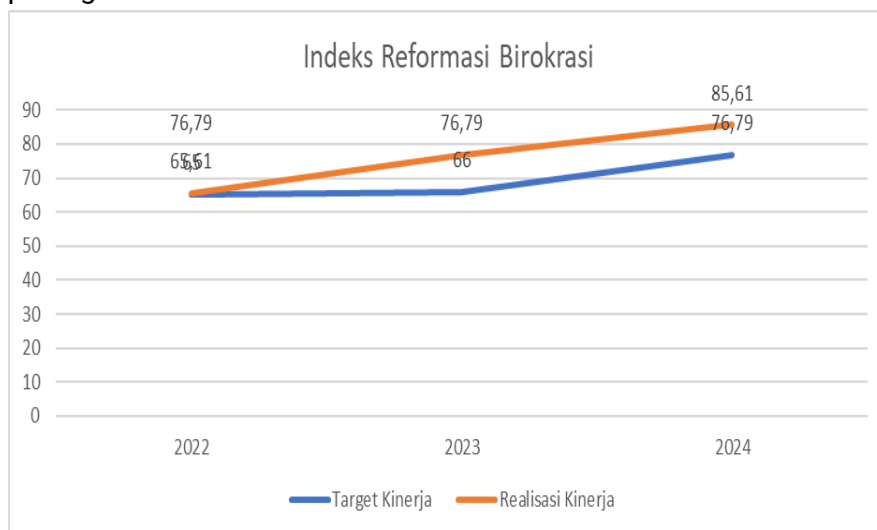
Gambar 3.18 Tren Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Sektor Perdagangan dan Jasa, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Capaian indikator kinerja produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa sebesar Rp70.982.071 dan meningkat Rp118.560.796,91 pada tahun 2024.

3.2.1.5 Tujuan 5 : Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien

Adapun perkembangan capaian indikator tujuan 5 mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 tersaji pada gambar berikut.



Gambar 3.19 Tren Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada tujuan 5 **meningkatkan birokrasi yang efektif dan efisien** sebagaimana gambar tersebut, capaian indikator tujuan indeks reformasi birokrasi cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja indeks reformasi birokrasi sebesar 65,61 poin dan meningkat menjadi 85,61 poin pada tahun 2024.

Sasaran 1 Tujuan 5:
"Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah"

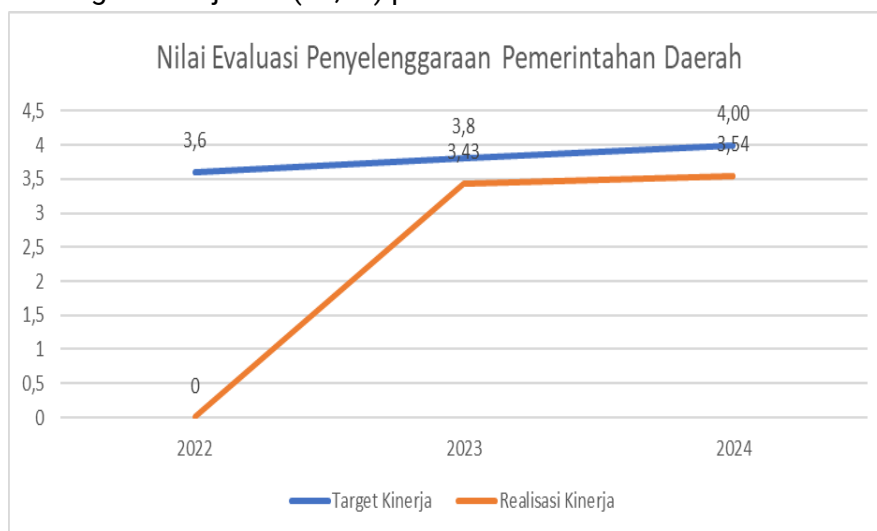
Tabel 3.26 Tren Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d. 2024

Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
2022	BB (70)	B (66,92)
2023	BB (71)	B (67,33)
2024	BB	B (69,06)

Sumber : Kementerian PAN RB dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran 1 tujuan 5 **meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah** sebagaimana tabel tersebut, capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022

capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah” sebesar B (66,92) dan meningkat menjadi B (69,06) pada tahun 2024.



Gambar 3.20 Tren Perkembangan Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024

Sumber : Sekretariat Daerah dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

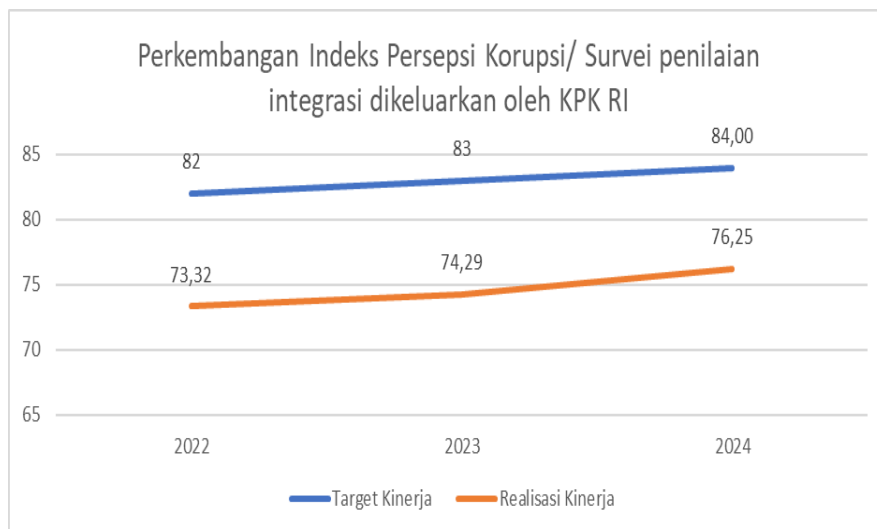
Capaian indikator kinerja nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah cenderung mengalami penurunan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar N/A dan meningkat menjadi 3,54 poin pada tahun 2024.

Tabel 3.27 Tren Perkembangan Opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d. 2024

Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
2022	WTP	WTP
2023	WTP	WTP
2024	WTP	WTP

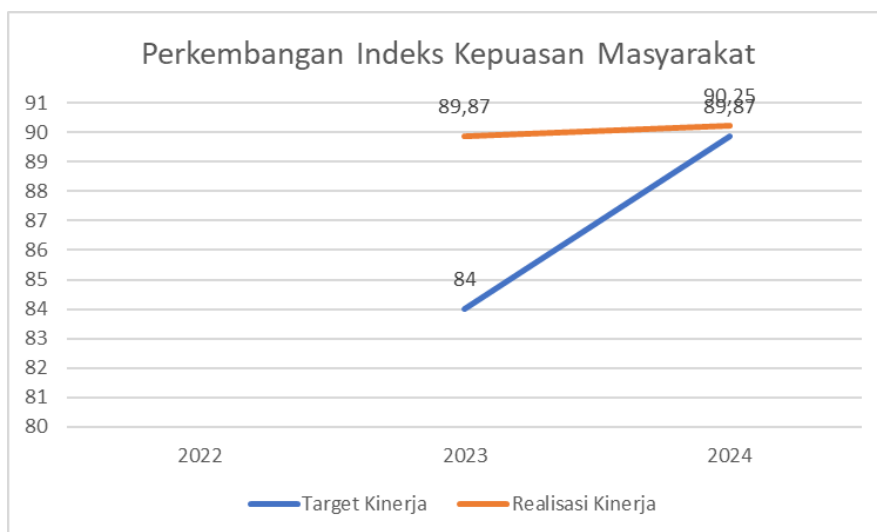
Sumber : BPK dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Capaian indikator kinerja opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah cenderung sama selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah sebesar WTP dan tetap sama menjadi WTP pada tahun 2024.



Gambar 3.21 Tren Perkembangan Nilai Indeks Persepsi Korupsi/Survei Penilaian Integritas dikeluarkan Oleh KPK RI, Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d 2024
Sumber : Inspektorat dan Perjanjian Kinerja, 2022-2024.

Capaian indikator kinerja indeks persepsi korupsi/survei penilaian integritas dikeluarkan oleh KPK RI cenderung meningkat selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja indeks persepsi korupsi/survei penilaian integritas dikeluarkan oleh KPK RI sebesar 73,32 poin dan tetap sama menjadi 76,25 poin pada tahun 2024.



Gambar 3.22 Tren Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat, Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 s.d 2024
Sumber : Sekretariat Daerah dan Perjanjian Kinerja, 2023-2024.

Capaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat sebesar 89,87 dan meningkat menjadi 90,25 pada tahun 2024. Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.28 Indikator Kinerja Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d. 2024

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja								
			Kinerja 2022			Kinerja 2023			Kinerja 2024		
			Target	Capaian	(%)	Target	Capaian	(%)	Target	Capaian	(%)
	Indeks pembangunan manusia	%	81,63	81,95	100,39	81,97	83,57	101,95	83,70	84,16	100,55
Meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks pendidikan	%	80,07	80,22	100,19	80,44	80,28	99,80	80,83	80,83	100,00
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	72,50	72,78	100,39	72,93	75,64	103,72	75,84	75,80	99,95
Meningkatkan kesejahteraan keluarga	Indeks pembangunan keluarga	Predikat	Baik	Baik	100,00	Baik (70)	Baik (70)	100,00	Baik (70)	Sangat baik (84,16)	120,23
Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks pembangunan pemuda	Poin	53,00	53,43	100,81	53,70	54,52	101,53	55,00	55,86	101,56
Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks pembangunan gender	Poin	93,58	93,80	100,24	93,97	93,96	99,99	94,53	93,96	99,40
	Indeks pemberdayaan gender	Poin	73,85	73,08	98,96	73,85	72,67	98,40	73,86	72,67	98,39
	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	Poin	5	5,75	115,00	5,75	7,03	122,26	7,03	8,29	117,92
Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Rasio konektivitas kota	Rasio	0,59	0,63	106,78	0,63	0,77	122,22	0,89	0,93	104,49
	Kinerja lalu lintas/transportasi kota (v/c ratio)	Rasio	0,54	0,54	100,00	0,54	0,54	100,00	0,54	0,54	100,00
	Indeks kota layak huni	Poin	65,5	68,84	105,10	68,84	69,5	100,96	71,77	70,03	97,58
Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	51,8	56,66	109,38	56,66	57,93	102,24	60,66	61,03	100,61
	Persentase pemukiman layak huni	%	99,31	99,25	99,94	99,37	99,65	100,28	99,69	99,6	99,91
	Cakupan pengelolaan sampah	%	90	90,73	100,81	93	99,35	106,83	100	99,54	99,54
	Ruang terbuka hijau publik	%	4,26	4,3	100,94	4,31	4,3	99,77	4,59	8	174,29
Meningkatkan ketenteraman dan	Indeks rasa aman	Predikat	Aman	Aman (66,69)	100,00	Aman (66,97)	Aman (66,97)	100,00	Aman (66,97)	Aman (66,97)	100

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja								
			Kinerja 2022			Kinerja 2023			Kinerja 2024		
			Target	Capaian	(%)	Target	Capaian	(%)	Target	Capaian	(%)
ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan	Indeks demokrasi	Predikat	Sedang (80)	Baik (81)	101,25	Baik (>80)	Baik (81)	101,25	Baik (81)	Tinggi (86,04)	106,22
Meningkatkan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam	Indeks risiko bencana	Predikat	Rendah (76)	Sedang (79,86)	105,08	Rendah (70)	Sedang (79,86)	114,09	Rendah	Sedang (68,10)	86,5
	Indeks daya saing daerah	Predikat	Sedang (2,5)	Sangat tinggi (3,71)	148,40	Tinggi (3,75)	Sangat tinggi (3,81)	101,60	Sangat tinggi (3,81)	Sangat tinggi (3,81)	100,00
Meningkatkan sektor ekonomi kreatif	Nilai sektor ekonomi kreatif	(Triliun Rupiah)	8,16	7,8	95,59	8,72	14,68	168,35	14,68	14,68	100,00
Meningkatkan investasi	Nilai investasi tahunan	(Triliun Rupiah)	4,42	4,65	105,20	4,66	7,44	159,66	7,44	8,47	113,84
Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja per total <i>output</i>	(Rupiah)	82.292.178	81.692.100	99,27	85.289.742	169.838.260	199,13	169.838.260	186.503.283,34	109,81
	Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa	(Rupiah)	83.782.610	70.982.071	84,72	87.022.906	109.284.473	125,58	109.284.473	118.560.796,91	108,49
	Indeks reformasi birokrasi	Poin	65	65,61 (B)	100,94	66	76,79	116,35	76,79	85,61	111,49
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat	BB (70)	B (66,92)	95,60	BB (71)	B (67,33)	94,83	BB	B 69,06	98,66
	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Poin	3,6	N/A	N/A	3,8	3,43	90,26	4,00	3,54	88,50
	Opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah	Predikat	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00
	Indeks persepsi korupsi/ survei penilaian integritas dikeluarkan oleh KPK RI	Poin	82	73,32	89,41	83	74,29	89,51	84,00	76,25	90,77
	Indeks kepuasan masyarakat	Poin				84	89,87	106,99	89,87	90,25	100,42

Sumber : Hasil Analisa 2024 dan LKJP Tahun 2022-2023.

3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan rencana jangka menengah didapatkan bahwa terdapat 5 indikator tujuan yang memenuhi target RPJMD 2026, 14 indikator sasaran yang sudah memenuhi target RPJMD 2026 dan 10 indikator sasaran yang belum memenuhi target RPJMD 2026.

3.2.2.1 Tujuan 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu tolok ukur untuk misi ke-1, yang dinilai menggunakan indikator tujuan yaitu **indeks pembangunan manusia** dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing” Dibandingkan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Indikator Tujuan	Satuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2026	Kategori Capaian
Indeks pembangunan manusia	%	82,40	84,16	102,14	Memenuhi target

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2024 BRS No. 60/12/36/Th. XVII, 2 Desember Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk tujuan **meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **indeks pembangunan manusia** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 102,14%.

Sasaran 1 Tujuan 1: Meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan

Sasaran 1 **meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-1 yaitu **meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun keempat RPJMD Tangerang Selatan tahun 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.30 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2026	Kategori Capaian
Indeks pendidikan	%	81,67	80,83	98,97	Tidak memenuhi target

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk sasaran **meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **indeks pendidikan** termasuk dalam kategori **belum memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 98,97%.

Sasaran 2 Tujuan 1: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran 2 **meningkatkan derajat kesehatan masyarakat** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-1 yaitu **meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun keempat RPJMD Tangerang Selatan tahun 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.31 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2026	Kategori Capaian
Angka harapan hidup	Tahun	72,67	75,80	104,31	Memenuhi target

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk sasaran **meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **angka harapan hidup** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 104,31%.

Sasaran 3 Tujuan 1: Meningkatkan kesejahteraan keluarga

Sasaran 3 **meningkatkan kesejahteraan keluarga** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-1 yaitu **meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun keempat RPJMD Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan kesejahteraan keluarga” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2026	Kategori Capaian
Indeks pembangunan keluarga	Predikat	Sangat baik (75)	Sangat baik (84,16)	112,21	Memenuhi target

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk sasaran **meningkatkan kesejahteraan keluarga**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **indeks pembangunan keluarga** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 112,21%.

Sasaran 4 Tujuan 1: Meningkatkan daya saing pemuda

Sasaran 4 **meningkatkan daya saing pemuda** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-1 yaitu **meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**. Untuk

melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun keempat RPJMD Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.33 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan daya saing pemuda” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2026	Kategori Capaian
Indeks pembangunan pemuda	Poin	55,00	55,86	101,56	Memenuhi target

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk sasaran **meningkatkan daya saing pemuda**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **indeks pembangunan pemuda** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 101,56%.

Sasaran 5 Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender

Sasaran 5 **meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-1 yaitu **meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun keempat RPJMD Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.34 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender” Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2026	Kategori Capaian
1. Indeks pembangunan gender	Poin	93,60	93,96	100,38	Memenuhi target
2. Indeks pemberdayaan gender	Poin	73,87	72,67	98,38	Tidak memenuhi target

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk sasaran **meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **indeks pembangunan gender** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 100,38%. Sedangkan pencapaian indikator **indeks pemberdayaan gender** termasuk dalam kategori **tidak memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 98,38%.

3.2.2.2 Tujuan 2 : Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi

Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi merupakan salah satu tolok ukur untuk misi ke-2, yang dinilai menggunakan indikator tujuan yaitu, indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.35 Capaian Kinerja Indikator Tujuan 2 ‘Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Transportasi’ Dibandingkan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Indikator Tujuan	Satuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2026	Kategori Capaian
Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	Poin	7	8,29	118,43	Memenuhi target

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk tujuan **meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 118,43%.

Sasaran 1 Tujuan 2:
Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan

Sasaran 1 **meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-2 yaitu **meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun keempat RPJMD Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.36 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Transportasi” Tujuan 2 “Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Transportasi” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2026	Kategori Capaian
1. Rasio konektivitas kota	Rasio	1	0,93	93	Tidak memenuhi target
2. Kinerja lalu lintas/transportasi kota (v/c ratio)	Rasio	0,46	0,54	117,39	Memenuhi target

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk sasaran **meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **rasio konektivitas kota** termasuk dalam kategori **belum memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 93%. Sedangkan pencapaian indikator **kinerja lalu lintas/transportasi kota (v/c ratio)** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 117,39%.

3.2.2.3 Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni

Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni merupakan salah satu tolok ukur untuk misi ke-3, yang dinilai menggunakan indikator tujuan yaitu, indeks kota layak huni dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.37 Capaian Kinerja Tujuan 3 “Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni” Dibandingkan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Indikator Tujuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2026	Kategori Capaian
Indeks kota layak huni	67	70,03	104,52	Memenuhi target

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk tujuan **meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **indeks kota layak huni** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 104,52%.

Sasaran 1 Tujuan 3:
Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan

Sasaran 1 **meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-3 yaitu **meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun keempat rpjmd tangerang selatan 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.38 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan” Tujuan 3 “Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2024	Kategori Capaian
1. Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	52,2	61,03	116,92	Memenuhi target
2. Persentase pemukiman layak huni	%	100	99,6	99,6	Tidak memenuhi target
3. Cakupan pengelolaan sampah	%	100	99,54	99,54	Tidak memenuhi target
4. Ruang terbuka hijau publik	%	5	8	160	Memenuhi target

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk sasaran meningkatkan **kualitas lingkungan perkotaan**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **indeks kualitas lingkungan hidup** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 116,92%. Pencapaian indikator **persentase pemukiman layak huni** termasuk dalam kategori **belum memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 99,6%. Pencapaian indikator **cakupan pengelolaan sampah** termasuk dalam kategori **belum memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 99,54%. Pencapaian indikator **ruang terbuka hijau publik** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 160%.

Sasaran 2 Tujuan 3:
Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan

Sasaran 2 **meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-3 yaitu **meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun keempat RPJMD Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.39 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan” Tujuan 3 “Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni” Tahun 2024 dibandingkan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2026	Kategori Capaian
1. Indeks rasa aman	Predikat	Aman (80)	Aman (66,97)	83,71	Tidak Memenuhi Target
2. Indeks demokrasi	Predikat	Sedang (70)	Tinggi (86,04)	122,91	Memenuhi Target

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk sasaran **meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **indeks rasa aman** termasuk dalam kategori **belum memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 83,71%. Sedangkan pencapaian indikator **indeks demokrasi** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 122,91%.

Sasaran 3 Tujuan 3:

Meningkatkan pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam

Sasaran 3 **meningkatkan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-3 yaitu **meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun keempat RPJMD Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.40 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 3 “Meningkatkan pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam” Tujuan 3 “Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2026	Kategori Capaian
Indeks risiko bencana	Predikat	Rendah (33)	Sedang (68,10)	-6,36	Tidak memenuhi target

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk sasaran **meningkatkan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **indeks risiko bencana** termasuk dalam kategori **belum memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian -6,36%.

3.2.2.4 Tujuan 4 : Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah

Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah merupakan salah satu tolok ukur untuk misi ke-4, yang dinilai menggunakan indikator tujuan yaitu, indeks daya saing daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.41 Capaian Kinerja Tujuan 4 “Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Ekonomi Daerah” Dibandingkan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Indikator Tujuan	Satuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2026	Kategori Capaian
Indeks daya saing daerah	Predikat	Sedang (3,75)	Sangat tinggi (3,81)	101,6	Memenuhi target

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk tujuan **meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **indeks daya saing daerah** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 101,6%.

Sasaran 1 Tujuan 4: Meningkatkan sektor ekonomi kreatif

Sasaran 1 **meningkatkan sektor ekonomi kreatif** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-4 yaitu **meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun keempat RPJMD Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.42 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan sektor ekonomi kreatif” Tujuan 4 “Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2026	Kategori Capaian
Nilai sektor ekonomi kreatif	Triliun rupiah	10,77	14,68	136,3	Memenuhi target

Sumber : Dinas Pariwisata Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk sasaran **meningkatkan sektor ekonomi kreatif**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **nilai sektor ekonomi kreatif** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 136,3%.

Sasaran 2 Tujuan 4: Meningkatkan Investasi

Sasaran 2 “meningkatkan **investasi**” merupakan sasaran untuk mencapai sasaran pemerintah daerah pada misi ke-4 yaitu “**meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah**”. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun keempat rpjmd tangerang selatan 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.43 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatkan Investasi” Tujuan 4 “Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah” Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2026	Kategori Capaian
Nilai investasi tahunan	Triliun rupiah	5,39	8,47	157,14	Memenuhi target

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk sasaran **meningkatkan investasi**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **nilai investasi tahunan** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 157,14%.

Sasaran 3 Tujuan 4: Meningkatkan produktivitas tenaga kerja

sasaran 3 **meningkatkan produktivitas tenaga kerja** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-4 yaitu **meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah**. untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun keempat RPJMD Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.44 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 3 “Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja” Tujuan 4 “Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2026	Kategori Capaian
1. Produktivitas tenaga kerja per total <i>output</i>	Rupiah	95.512.855	186.503.283,34	195,27	Memenuhi target
2. Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa	Rupiah	98.166.098	118.560.796,91	120,78	Memenuhi target

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk sasaran **meningkatkan produktivitas tenaga kerja**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **produktivitas tenaga kerja per total output** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 195,27%. Sedangkan pencapaian indikator **produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 120,78%.

3.2.2.5 Tujuan 5 : Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien

Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu tolok ukur untuk Misi ke 5, yang dinilai menggunakan indikator tujuan yaitu, Indeks Reformasi Birokrasi, Dapat dilihat pada 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.45 Capaian Kinerja Tujuan 5 “Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien” Dibandingkan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Indikator Tujuan	Satuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2026	Kategori Capaian
Indeks reformasi birokrasi	Predikat	70	85,61	122,3	Memenuhi target

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk tujuan **mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **indeks reformasi birokrasi** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 122,3%.

Sasaran 1 Tujuan 5:
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Sasaran 1 **meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah** merupakan sasaran untuk mencapai misi ke-5 yaitu **mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun keempat RPJMD Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.46 Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” Tujuan 5 “Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien” Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Indikator Kinerja		Satuan	Target RPJMD 2026	Realisasi 2024	Capaian Terhadap Target RPJMD 2026	Kategori Capaian
1.	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat	BB (70)	B (69,06)	98,66	Tidak memenuhi target
2	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Poin	4,2	3,54	84,29	Tidak memenuhi target
3	Opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah	Predikat	WTP	WTP	100	Memenuhi target
4	Indeks persepsi korupsi/ survei penilaian integritas dikeluarkan oleh KPK RI	Poin	85	76,25	89,71	Tidak memenuhi target
5	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	88,3	90,25	102,21	Memenuhi target

Sumber : KEMENPAN RB, Sekretariat Daerah, BPK dan Inspektorat Tahun 2024 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja untuk sasaran **meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah**, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator **nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah** termasuk dalam kategori **belum memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 98,66%. Pencapaian indikator **nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah** termasuk dalam kategori **belum memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 84,29%. Pencapaian indikator **opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 100%. Pencapaian indikator **indeks persepsi korupsi/ survei penilaian integritas dikeluarkan oleh KPK RI** termasuk dalam kategori **belum memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 89,71%. Pencapaian indikator **indeks kepuasan masyarakat** termasuk dalam kategori **memenuhi target** RPJMD tahun 2026 dengan persentase ketercapaian 102,21%.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional

Terdapat enam indikator yang beririsan dengan RPJMD Provinsi Banten, dengan empat indikator sasaran yang melampaui target RPJMD Provinsi Banten dan dua indikator sasaran tidak melampaui target RPJMD Provinsi Banten yaitu indikator indeks kualitas lingkungan hidup dan cakupan pengelolaan sampah. Sedangkan jika dibandingkan dengan nasional, terdapat tujuh indikator yang beririsan dengan RPJMN, dengan empat indikator sasaran

yang melampaui indikator RPJMN, dan tiga indikator sasaran yang tidak melampaui indikator RPJMN yaitu indeks pembangunan pemuda, indeks pemberdayaan gender dan indeks kualitas lingkungan hidup.

3.2.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Daerah dan Nasional

Target indikator sasaran kinerja indeks pembangunan pemuda, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, indeks kualitas lingkungan hidup, cakupan pengelolaan sampah, indeks risiko bencana, nilai sektor ekonomi kreatif, dan nilai investasi tahunan selain menjadi target yang harus dicapai oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, juga merupakan target Provinsi Banten dan target Nasional yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten dan RPJMN 2019-2024.

Adapun perbandingan capaian indikator sasaran kinerja indeks pembangunan pemuda, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, indeks kualitas lingkungan hidup, cakupan pengelolaan sampah, indeks risiko bencana, nilai sektor ekonomi kreatif, dan nilai investasi tahunan dengan target daerah dan nasional tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.47 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Daerah dan Nasional

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian Kota Tangerang Selatan 2024	Provinsi Banten		Nasional	
			Target RPJMD	Capaian 2024	Target RPJMN	Capaian 2024
Indeks pembangunan manusia	%	84,16	Tidak termasuk indikator RPJM Provinsi	74,48	Tidak termasuk indikator RPJM Nasional	75,02
Angka harapan hidup	Tahun	75,80	Tidak termasuk indikator RPJM Provinsi	74,97	Tidak termasuk indikator RPJM Nasional	74,15
Indeks pembangunan pemuda	Poin	55,86	50,17	53,33	57,67	Tidak Ada Data
Indeks pembangunan gender	Poin	93,96	93,35	Tidak Ada Data	91,39	Tidak Ada Data
Indeks pemberdayaan gender	Poin	72,67	69,76	Tidak Ada Data	74,18	Tidak Ada Data
Rasio konektivitas kota	Rasio	0,93	Tidak termasuk indikator RPJM Provinsi	Tidak Ada Data	Tidak termasuk indikator RPJM Nasional	0,57
Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	61,03	73,25-75,25	Tidak Ada Data	63,04	97,8
Cakupan pengelolaan sampah	%	99,54	100	Tidak Ada Data	Tidak termasuk indikator RPJM Nasional	59,67
Indeks risiko bencana	Predikat	Sedang (68,10)	Tidak termasuk indikator RPJM Provinsi	Tidak Ada Data	145,31	Tidak Ada Data
Nilai sektor ekonomi kreatif	Triliun rupiah	14,68	Tidak termasuk indikator RPJM Provinsi	Tidak Ada Data	1,689	Tidak Ada Data
Nilai investasi tahunan	Triliun rupiah	8,47	8,4	105,62	6,1-8,0	401,5
Indeks persepsi korupsi/ survei penilaian integritas dikeluarkan oleh KPK RI	Poin	76,25	Tidak termasuk indikator RPJM Provinsi	71,21	Tidak termasuk indikator RPJM Nasional	37
Indeks kepuasan masyarakat	Poin	90,25	Tidak termasuk indikator RPJM Provinsi	Tidak Ada Data	Tidak termasuk indikator RPJM Nasional	88,38

Sumber : RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, dan RPJMN Tahun 2020-2024

3.2.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target SDG's

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 (tujuh belas) tujuan yaitu, (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Dari 17 amanat tujuan yang ada, tujuan ke-14 terkait ekosistem kelautan tidak diterapkan di Kota Tangerang Selatan, mengingat kota ini tidak memiliki garis pantai atau laut. Sementara itu, enam belas indikator lainnya pada dasarnya merupakan amanat yang tetap dilaksanakan oleh Kota Tangerang Selatan, meskipun terdapat perbedaan dalam indikator yang digunakan. Adapun capaian indikator TPB/SDGs yang sesuai dengan Kota Tangerang Selatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.48 Perbandingan Kinerja SDG's Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dengan SDG's Nasional Tahun 2024

Go al	Indikat or	Nama Indikator TPB/SDGs Nasional	Nama Indikator TPB/SDGs Daerah	Satuan	Target Tangs el 2024	Target SDGS Nasional	Realisasi				Gap
							Nasional	Capaian (%)	Tangsel	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	$\frac{9}{=(8/7)*100\%}$	10	$\frac{11}{11=(10/6)*100\%}$	$\frac{12}{12=11-9}$
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	%	1,75	6,0-7,0	8,57	142,83	2,57	146,86	4,02
	1.2.2*	2. Gizi : <i>prevalence of undernourishment</i> (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,04	5	10,21	204,20	0,06	150,00	-54,20
		5. Partisipasi sekolah : persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	0,09	0,18	200,00	100	100,00	- 100,00
		7. Air minum: persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui spam jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	%	100	7,51	8,95	119,17	100	100,00	-19,17
		8. Sanitasi: persentase rumah tangga tidak mempunyai wc layak, terjadi deprivasi jika jika rumah tangga tidak mempunyai wc layak atau menggunakan wc bersama	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	%	100	12,5	19,08	152,64	99,51	99,51	-53,13

Goal	Indicator	Nama Indikator TPB/SDGs Nasional	Nama Indikator TPB/SDGs Daerah	Satuan	Target Tangsel 2024	Target SDGS Nasional	Realisasi				Gap
							Nasional	Capaian (%) $\frac{9}{=(8/7)*100\%}$	Tangsel	Capaian (%) $\frac{11}{=(10/6)*100\%}$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9
	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dan aman	%	100	100	100	100,00	100	100,00	0,00
2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Prevalensi stunting balita	%	14	14	14	100,00	9,2	65,71	-34,29
3	3.1.1.*	Angka kematian ibu.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Kematian per 100000 kelahiran hidup	31,86	183	183	100,00	28,95	90,87	-9,13
	3.2.1.*	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.	Angka kematian bayi (akb) per 1000 kelahiran hidup.	Kematian per 100000 kelahiran hidup	0,78	16	16	100,00	0,79	101,28	1,28
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Prevalensi obesitas sentral	%	35	21,8	21,8	100,00	44,8	128,00	28,00
	3.7.1	Persentase kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persentase kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	6,05	7,4	N/A	N/A	6,09	100,66	N/A

Goal	Indikator	Nama Indikator TPB/SDGs Nasional	Nama Indikator TPB/SDGs Daerah	Satuan	Target Tangsel 2024	Target SDGS Nasional	Realisasi				Gap
							Nasional	Capaian (%) $\frac{9}{=(8/7)*100\%}$	Tangsel	Capaian (%) $\frac{11}{=(10/6)*100\%}$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.7.2.(a)	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/tfr</i>) per wus usia 15-49 tahun	Angka kelahiran total (tfr)	Jumlah anak per wus 15-49 tahun	2,05	2,1	N/A	N/A	1,71	83,41	N/A
4	4.5.1*	Rasio angka partisipasi murni pada tingkat sd/ sederajat	Tingkat partisipasi warga tangerang selatan usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,98	99,99	100,01	100,02	100	101,03	1,01
		Rasio angka partisipasi murni pada tingkat sma/smk/ma/ sederajat	Tingkat partisipasi warga tangerang selatan usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	88,53	100,55	100,74	100,19	112,96	127,60	27,41
	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Persentase sekolah dengan hasil assesment Nasional berbasis komputer di atas rata-rata Provinsi Banten	%	86,46	37,7	24,43	64,80	86,41	99,94	35,14
5	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) per 100.000 penduduk perempuan	Persen	12,07	Menurun	Menurun	100,00	8,8	72,91	-27,09

Goal	Indikator	Nama Indikator TPB/SDGs Nasional	Nama Indikator TPB/SDGs Daerah	Satuan	Target Tangsel 2024	Target SDGS Nasional	Realisasi				Gap
							Nasional	Capaian (%) $\frac{9}{(8/7)*100}\%$	Tangsel	Capaian (%) $\frac{11}{(10/6)*100}\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9
8	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara (orang)	Juta orang dan orang	10.282	16,0-17,0	13,9	86,88	49.106	477,59	390,72
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah wisatawan nusantara (orang)	Juta orang dan orang	805.678	320-335	81,42	25,44	3.935.812	488,51	463,07
9	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Tingkat kemantapan jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik	%	81,8	97	94,2	97,11	97,52	119,22	22,10
11	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Cakupan pengelolaan sampah	%	96	99	76,81	77,59	99,35	103,49	25,90
	11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara	Indeks kualitas udara (iku)	%	65,41	84,5	88,67	104,93	71,08	108,67	3,73
	11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan rtrw yang sudah dilengkapi klhs*	Kebijakan/rencana/program strategis kota yang terintegrasi dg rpplh dan/atau klhs	Provinsi dan %	100	27 Provinsi	27 Provinsi	100,00	100	100,00	0,00
12	12.4.2*	(B) proporsi limbah b3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya.	Cakupan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	%	100	100	100	100,00	100	100,00	0,00
16	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq b$	Nilai pengukuran kinerja pada LHE SAKIP kota	%	21	100	N/A	N/A	19,93	94,90	N/A

Sumber : BPS Nasional 2024, RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, RAN SDGS Nasional Tahun 2021-2024

3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk memahami capaian yang telah diraih, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mendukung keberhasilan serta hambatan yang menyebabkan kegagalan. faktor-faktor tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

3.2.4.1 Tujuan 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Tujuan ini diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2024, IPM Kota Tangerang Selatan mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 tetapi belum melampaui target dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan 2026 dengan ketercapaian 82,4%. Keberhasilan pencapaian IPM ini tidak terlepas dari tiga variabel utama yang menyusunnya, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli.

Indeks pendidikan dan indeks daya beli Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya serta melampaui target yang telah ditetapkan. Indeks pendidikan yang sebelumnya sebesar 80,28 meningkat menjadi 80,83 pada tahun 2024. Begitu pula dengan indeks daya beli, di mana pengeluaran per kapita yang sebelumnya Rp16.225.000 per tahun meningkat menjadi Rp17.028.000 per tahun. Sementara itu, Angka Harapan Hidup (AHH) belum mencapai target yang ditetapkan PK dengan selisihnya sebesar 0,24% dari target yang ditentukan dan melampaui target dari RPJMD Kota Tangerang Selatan 2026 dengan ketercapaian 104,31%. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.49 Faktor Keberhasilan Sasaran Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”

No	Sasaran	Indikator	Faktor Keberhasilan
1	Meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks pendidikan	1. Memberikan insentif kepala sekolah PAUD, TK, SD dan SMP sebanyak 4.000 kepala sekolah; 2. Mengembangkan kurikulum yang tidak hanya fokus pada materi akademik, tetapi juga memperkenalkan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja, seperti keterampilan teknologi, kewirausahaan, dan keterampilan hidup. Hal ini membuat siswa lebih termotivasi untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang lebih tinggi; 3. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menambah kuota beasiswa dari 2.500 menjadi 5.000 siswa yang tidak hanya untuk siswa sekolah negeri tetapi juga untuk sekolah swasta; 4. Menyediakan perpustakaan keliling yang datang ke sekolah-sekolah dan fasilitas umum serta membangun pojok baca di setiap instansi pemerintah dan ruang-ruang publik seperti <i>cafe</i>, dan taman; 5. Mengalokasikan anggaran pendidikan yang mendekati 26% dari total APBD; dan 6. Meluncurkan program beasiswa sampai sarjana untuk 1.000 tahfidz.
2	Meningkatkan kesejahteraan keluarga	Indeks pembangunan keluarga	1. Terlaksananya program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan pangan melalui kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten / Kota berupa sebagai berikut. a. Ketersediaan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan; b. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya sebanyak 700 paket; c. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang melibatkan 2.630 orang; d. Memiliki dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan;

No	Sasaran	Indikator	Faktor Keberhasilan
			e. Tersalurkannya cadangan pangan sebesar 22.469 paket beras; dan f. Terdapat 13 pasar di Kota Tangerang Selatan. 2. Jumlah peserta KB aktif modern di Kota Tangerang Selatan adalah 124,393 orang atau memenuhi 68,14% dari jumlah pasangan usia subur; 3. Adanya UPT DPPA menyediakan sebagai pelayanan pengaduan korban kekerasan rumah tangga, perempuan dan anak; 4. Kota Tangerang Selatan sebagai kota cerdas, modern, dan religius memiliki banyak tempat ibadah dan pendidikan keagamaan, seperti masjid, musholla, pesantren, majlis taklim dan tempat ibadah lainnya yang sangat memadai. Keberadaan fasilitas ini membuat keluarga mudah untuk mengakses tempat ibadah, baik untuk salat berjamaah maupun kegiatan keagamaan termasuk untuk agama katolik, kristen, budha, dan hindu; 5. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, melalui OPD DP3AP2KB bersama dengan lembaga-lembaga sosial dan keagamaan, berhasil mengembangkan konseling PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam rangka memberikan konseling pernikahan, layanan mediasi, dan bantuan hukum kepada pasangan yang sedang mengalami masalah pernikahan/perceraian; 6. Adanya pelatihan keterampilan bagi anggota keluarga yang belum bekerja, terutama untuk ibu rumah tangga atau anggota keluarga yang membutuhkan peningkatan keterampilan, dapat membuka peluang baru dalam dunia kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga; 7. Adanya Program Keluarga Harapan (PKH), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan bantuan sosial yang ditujukan untuk keluarga miskin atau keluarga berpenghasilan rendah. Program ini membuat keluarga dapat mengakses bantuan langsung atau modal usaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka; 8. Pembinaan dan pemberdayaan Keluarga Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) yang melibatkan keluarga dalam proses produksi dan distribusi barang atau jasa lokal, memberi mereka peluang untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan berkontribusi pada perekonomian lokal; dan 9. Menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga berupa taman kota dan taman lingkungan yang mudah diakses oleh masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.
3	Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks pembangunan pemuda	1. Tercapainya nilai domain pendidikan sebesar 71,04% dari variabel RLS, APK SLTA/SMA dan APK Perguruan Tinggi; 2. Tercapainya nilai domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 77,33% dan mengalami peningkatan 55,22% dari tahun sebelumnya 22,11, melalui variabel angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok, persentase remaja perempuan sedang hamil; 3. Tercapainya nilai domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar di angka 53,51% dari variabel persentase pemuda wirausaha kerah putih dan TPT Pemuda; 4. Tercapainya nilai domain partisipasi dan kepemimpinan 30,42 % dari variabel persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda aktif dalam kegiatan organisasi dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat; dan 5. Tercapainya tingkat gender dan diskriminasi sebesar 48,28% dari variabel angka perkawinan anak, persentase pemuda perempuan sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas dan persentase pemuda yang bekerja disektor formal.

Sumber : Hasil Analisis, 2024.



Penghargaan yang didapatkan Kota Tangerang Selatan terkait pencapaian Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan”, penghargaan tersebut yaitu:
Penghargaan Peraih Predikat Kepatuhan Tinggi, Dari Ombudsman RI



Penghargaan yang didapatkan Kota Tangerang Selatan terkait pencapaian Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Pelaporan Kasus DBD dengan Zero Death se Provinsi Banten



Penghargaan yang didapatkan Kota Tangerang Selatan terkait pencapaian Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Piagam Penghargaan Jumlah Kematian Bayi Terendah

Tabel 3.50 Faktor Kegagalan Sasaran Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”

No	Sasaran	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Indeks Angka Harapan Hidup (AHH) belum mencapai target yang ditetapkan dalam PK dengan selisihnya sebesar 0,24% dari target yang ditentukan akan tetapi nilai AHH dan melampaui target dari RPJMD Kota Tangerang Selatan 2026 dengan capaian 104,31%. 1. Belum semua masyarakat dapat menjangkau layanan kesehatan, terutama di daerah pinggiran dan perkampungan kumuh, sehingga menyebabkan keterlambatan penanganan pengobatan; 2. Masih terdapat masyarakat yang kurang gizi dikarenakan kurang pemahaman dan literasi terkait gizi dan pola hidup sehat; 3. Kerusakan fasilitas kesehatan dan ketidaktersediaan teknologi medis yang <i>modern</i>; 4. Masih terdapat remaja perempuan yang kurang darah karena pola hidup dan asupan makannya yang buruk; 5. Belum semua penyakit menular, seperti TBC, DBD dan prevalensi tidak menular dapat terkontrol dan tertangani dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat; dan 6. Kebiasaan merokok, pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, dan penyalahgunaan alkohol sehingga meningkatkan prevalensi penyakit dan memperpendek usia harapan hidup.	1. Lebih meningkatkan lagi kegiatan mantri keliling/ngider sehat pada 54 Kelurahan untuk layanan kesehatan proaktif dan mobile; 2. Memperluas jaminan kesehatan dan Universal Health Care (UHC) agar layanan kesehatan rumah sakit swasta bisa dinikmati juga oleh masyarakat; 3. Pemenuhan cakupan pemberian makanan bergizi, vitamin dan layanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dan Balita (KIA); 4. Pemenuhan fasilitas layanan kesehatan yang sesuai standar 5. mengoptimalkan kegiatan ZOBAT MACAN karena kurang sosialisasi yang tersampaikan dengan baik; 6. Meningkatkan program DOREMIFASOLASIDO (Duta Remaja Anti Anemia, Fahami Sobat Langkah Awal Sehat Dari Diri Sendiri) dalam upaya pencegahan siklus stunting dimana duta remaja memberikan edukasi pentingnya konsumsi tablet tambah darah pencegahan anemia, mensosialisasikan stunting, olahraga, makanan seimbang bagi teman sebaya; 7. Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini dan pengelolaan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung untuk mengurangi angka kematian; 8. Melakukan kampanye besar-besaran tentang pentingnya gaya hidup sehat, termasuk pola makan yang baik, berolahraga secara teratur, serta menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan mengonsumsi alkohol; 9. Penyuluhan mengenai pengelolaan stres dan masalah psikologis; 10. Memperbaiki dan menyediakan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak seperti toilet dan pengelolaan limbah yang baik untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui air dan sanitasi buruk; dan 11. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan

No	Sasaran	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya
				organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan program kesehatan. Melalui kerjasama sama penyediaan fasilitas kesehatan atau program CSR yang berkaitan dengan kesehatan.
2	Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks pembangunan gender	Indeks Pembangunan Gender belum mencapai target yang ditetapkan dalam PK dengan selisihnya sebesar 0,36% dari target yang ditentukan dan melampaui target RPJMD Kota Tangerang Selatan 2026 dengan ketercapaian 100,38%, berikut faktor kegagalan Indeks Pembangunan Gender: 1. Kesenjangan dalam kesempatan kerja dan akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti kredit, pelatihan keterampilan, dan kesempatan untuk memulai usaha; 2. Banyak tempat, perempuan masih menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja, seperti gaji yang lebih rendah dan terbatasnya peluang untuk menduduki posisi penting; 3. Beberapa masyarakat masih mempertahankan pola pikir patriarkal yang membatasi perempuan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta hak-hak politik; 4. Kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, emosional, maupun seksual, masih menjadi masalah besar yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan perempuan, serta menghambat perkembangan mereka dalam berbagai sektor; 5. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran responsif gender karena penganggaran yang tidak terintegrasi dengan isu gender; dan 6. Belum optimalnya kualitas ketahanan keluarga karena kurangnya dukungan sosial dan komunitas.	1. Mengembangkan kebijakan yang mendukung kewirausahaan perempuan, seperti akses terhadap modal, pelatihan keterampilan, dan jaringan bisnis dan mendorong perusahaan untuk lebih inklusif dalam merekrut dan mempromosikan perempuan di posisi-posisi strategis; 2. Mendorong pendidikan setara bagi laki-laki dan perempuan, termasuk dengan memberikan beasiswa atau program pendidikan yang mengurangi hambatan ekonomi bagi perempuan dan Penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan bagi anak perempuan kepada orang tua dan masyarakat; 3. Kampanye untuk mengubah persepsi sosial yang membatasi peran perempuan, termasuk pendidikan mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4. Menyediakan layanan perlindungan untuk korban kekerasan, serta meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak perempuan dan menegakkan hukum yang melindungi perempuan dari kekerasan, serta mengedukasi masyarakat untuk mengurangi stigmatisasi terhadap korban; 5. Mengoptimalkan implementasi PUG pada tahap perencanaan melalui: ▪ Memastikan Perangkat Daerah menyusun RENJA menggunakan data terpilah, melalui proses musrenbang, dan melewati tahapan analisis gender; ▪ BAPPELITBANGDA sebagai <i>leading</i> sektor mengevaluasi tolok ukur dan indikator kinerja; dan ▪ Meningkatkan komitmen dalam anggaran yang responsif gender. 6. Mengoptimalkan implementasi PUG pada tahap pelaksanaan melalui:

No	Sasaran	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya
				▪ Melakukan koordinasi, sinkronisasi, sinergis, bimbingan teknis dan supervisi; dan ▪ Memperkecil kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program yang responsif gender ditinjau dari aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
		Indeks pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender belum mencapai target yang ditetapkan dalam PK dengan selisihnya sebesar 1,20% dari target yang ditentukan dan belum melampaui target dari RPJMD Kota Tangerang Selatan 2026 dengan ketercapaian 98,38%, berikut faktor kegagalan indeks pemberdayaan gender: 1. Hambatan sosial, budaya, dan ekonomi sering kali membuat perempuan tidak dapat melanjutkan pendidikan setelah usia tertentu, atau mereka terpaksa menikah lebih dini dan harus mengutamakan tanggung jawab keluarga; 2. Beberapa sektor pekerjaan masih didominasi oleh laki-laki, dan perempuan kesulitan mengakses pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi mereka; 3. Perempuan di beberapa tempat diharapkan untuk lebih fokus pada pekerjaan domestik dan pengasuhan anak, sementara karier atau ambisi pribadi sering kali dianggap sebagai hal yang kurang penting; dan 4. Kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan kekerasan berbasis gender lainnya menyebabkan perempuan merasa tidak aman dan kehilangan kontrol atas hidup mereka. Kekerasan ini seringkali menghalangi perempuan untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak sosial lainnya.	1. Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan yang setara, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta memberikan akses ke pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja; 2. Memperkenalkan kebijakan inklusif yang mendukung perempuan dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, seperti fleksibilitas kerja, cuti melahirkan yang adil, dan kesempatan untuk bekerja di sektor-sektor yang selama ini didominasi oleh laki-laki; 3. Melaksanakan kampanye kesadaran untuk mengubah pandangan masyarakat yang membatasi peran perempuan, serta mengedukasi masyarakat tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan; dan 4. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan mempromosikan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender melalui kampanye dan pendidikan publik.

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Selain kebijakan yang telah disebutkan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui beberapa faktor penunjang berikut.

1. Membuat kebijakan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi, seperti penyediaan bantuan sosial bagi keluarga miskin, program jaminan kesehatan, serta akses pendidikan yang lebih terjangkau, bertujuan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya :
 - a. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan dan Miskin;
 - b. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 - c. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan; dan
 - d. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
2. Bekerjasama dengan Perguruan tinggi di Tangerang Selatan seperti Institut Teknologi Indonesia, Universitas Pamulang, UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Muhammadiyah dalam berperan menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di tingkat dasar dan menengah.
3. Bantuan *influencer* dan tokoh masyarakat dalam kesadaran tentang pentingnya pembangunan keluarga.
4. Keterlibatan swasta dan organisasi pemuda yang selalu aktif memberikan kesempatan untuk membangun, seperti memberikan kesempatan magang, menyediakan tempat dan materi pelatihan yang berfokus kepada teknis dan *softskills*, bantuan modal dari CSR, pengembangan jaringan dan kolaborasi dalam proyek sosial dan bisnis. Seperti yang dilakukan :
 - PT Bumi Serpong Damai Tbk dengan menyalurkan bantuan berupa sarana dan prasarana serta edukasi peduli lingkungan ke 44 sekolah; dan
 - Yaga Yingde Group terkait bantuan pendidikan kepada siswa tidak mampu dan berprestasi.

Kendala

1. Angka harapan hidup tahun 2024 yang tidak memenuhi target, 75,64 tahun 2023 dan 75,80 tahun 2024 yang diakibatkan dari pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau juga dinilai belum merata, hal ini di tandai dengan masih terdapat anak dan ibu yang mengalami permasalahan gizi makro dan mikro, seperti stunting, obesitas sentral dan gizi buruk.
2. Belum optimalnya daya tampung sekolah negeri yang berbanding dengan minat masyarakat Kota Tangerang Selatan yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri, rata-rata lama sekolah penduduk kota tangerang selatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir (tahun 2020-2024) belum menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu antara 11,82 tahun sampai dengan 11,85 tahun dan harapan lama sekolah dalam

kurun waktu tahun 2020-2024 juga belum menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu antara 14,66 tahun sampai dengan 14,68 tahun.

3. Tidak tercapainya penurunan *unmet need* sebesar 0,06 % disebabkan adanya penurunan anggaran distribusi dan penurunan dari target sasaran akseptor yang dilayani melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui dana alokasi khusus non fisik 2024.
4. Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas masih sangat rendah dengan nilai 28,80% untuk target 100% dalam kondisi idealnya, persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal masih sangat rendah dengan persentase 23,64% dibandingkan dengan target idealnya 60% dan persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi masih sangat rendah.
5. Tidak tercapainya sasaran kualitas pembangunan berbasis gender dengan indikator indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.

Upaya

1. Upaya peningkatan angka harapan hidup yang dijabarkan dalam upaya mengatasi kegagalan AHH pada tabel faktor kegagalan sasaran tujuan 1 “meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Subsidi bantuan untuk siswa yang tidak tertampung pada sekolah negeri agar bersekolah di sekolah swasta, optimalisasi program pengelolaan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan PAUD dan optimalisasi program/kegiatan berkaitan dengan upaya keberhasilan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, begitupun dengan akselerasi angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun agar supaya capaiannya menjadi 100% antara lain penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, beasiswa dan untuk meningkatkan capaian angka partisipasi sekolah usia 15-18 tahun akan terus dilakukan kolaborasi bersama Provinsi Banten agar capaiannya juga meningkat lebih dari 90%.
3. Memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai kontrasepsi, memberikan pemaparan materi terkait KBKR oleh penyuluh KB, memberikan sosialisasi semua jenis alokon baik MKA maupun MKJP, memberikan diskusi dan tanya jawab terkait permasalahan KB yang dialami oleh PUS *unmet need* dan memberikan pelayanan kontrasepsi, seperti pemasangan atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), pemasangan atau pencabutan Implan, pemberian suntik, pil, kondom, pelayanan tubektomi dan vasektomi.
4. Menghadirkan kegiatan yang memberdayakan perempuan dalam bidang non-tradisional dalam bentuk mendorong mereka untuk mengeksplorasi dan terlibat dalam bidang yang umumnya didominasi oleh laki-laki, seperti teknologi, ilmu pengetahuan, *engineering*, atau politik, peningkatan pendidikan dan keterampilan dalam bentuk menyediakan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau kursus tambahan yang relevan dengan pekerjaan mereka, baik dalam keterampilan teknis maupun keterampilan *soft skills* (seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu) dan memfasilitasi akses untuk memperoleh sertifikasi profesional di bidang pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan kualifikasi dan meningkatkan daya saing di pasar kerja dan membangun kepemimpinan pemuda dalam kegiatan sosial melalui pelatihan dan *workshop* tentang keterampilan kepemimpinan, manajemen proyek, dan kerja tim untuk

pemuda yang tertarik memimpin inisiatif sosial serta menyediakan mentor yang dapat membimbing pemuda dalam mengembangkan ide-ide sosial mereka dan mengimplementasikan proyek-proyek sosial di komunitas.

5. Upaya peningkatan sasaran meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender dijabarkan pada tabel faktor kegagalan sasaran tujuan 1 “meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

3.2.4.2 Tujuan 2 : Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Transportasi

Keberhasilan tujuan 2 meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi diukur melalui indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar, indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar Kota Tangerang Selatan tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan PK tahun 2024 dan melebihi target RPJMD tahun 2026 dengan ketercapaian 118,43%. keberhasilan indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar tidak lepas dari tercapaainya sasaran meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan.

Sasaran meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan perkotaan dinilai berdasarkan indikator rasio konektivitas kota yang sudah memenuhi target PK dan belum memenuhi target RPJMD 2026 dengan ketercapaian 93% dan indikator kinerja lalu lintas/transportasi kota (*v/c ratio*) yang sudah memenuhi target PK dan sudah memenuhi target RPJMD 2026 dengan ketercapaian 117,39%. Berikut faktor-faktor keberhasilan tujuan 2.

Tabel 3.51 Faktor Keberhasilan Sasaran Tujuan 2 “Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Transportasi”

No	Sasaran	Indikator	Faktor Keberhasilan
1	Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan perkotaan	Rasio konektivitas kota	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan tingkatan capaian 95,06%. Melalui kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dalam bentuk a. Penambahan 4 trayek angkutan Bus Sekolah Gratis di tahun 2024, sehingga trayek yang di layani pada tahun 2024 sebanyak 25 trayek, yang terdiri dari 13 trayek angkutan perkotaan, 8 trayek angkutan feeder dan 4 trayek angkutan Bus Sekolah Gratis b. Pembangunan fasilitas keselamatan jalan; c. Mengadakan Forum Lalu Lintas; d. Melakukan Kajian Rekayasa Lalu Lintas e. Pengamanan, pengawasan, pengendalian serta pengaturan lalu lintas; f. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C dengan capaian 100% g. Terlaksananya pelayanan uji berkala dengan capaian 93,77% h. Penetapan tarif angkutan orang antar kota. i. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota atau kota dengan capaian 86,06%
		Kinerja lalu lintas/transportasi	Terlaksananya program penyelenggaraan jalan dengan tingkat capaian 98,60%. Melalui kegiatan penyelenggaraan jalan kota

No	Sasaran	Indikator	Faktor Keberhasilan
		kota (<i>v/c ratio</i>)	diantaranya. - Peningkatan Jalan Cendrawasi (Lanjutan), Cipayung, Ciputat. - Peningkatan Jalan Gunung Indah VII. - Peningkatan Jalan Kademangan Lama (Lanjutan). - Peningkatan Jalan Pondok Bintaro Hijau. - Peningkatan Jalan Yapen. - Pembangunan Jalan Akses TPU Sarimulya Segmen 2. - Pembangunan Jalan Bhayangkara. - Pembangunan Jalan Bukit Pamulang Indah. - Pembangunan Jalan Vila Pamulang. - Pembangunan Jembatan Al Ikhlas. - Pembangunan Jembatan Nusa Indah. - Pembangunan Jembatan Setu Raya 2. - Pembangunan Turap Maharta, Serpong Utara. - Rehabilitasi/pemeliharaan Senayan Utama. - Rehabilitasi/pemeliharaan Perintis. Total panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan/penurapan 49.095 meter, total volume jembatan yang di bangun 324.30 m dan total rehabilitasi/pemeliharaan jalan 645 meter. Pada tahun 2024, berdasrkan data Eri Korlantas POLRI pada September 2024 volume kendaraan sebagai berikut: - Sepeda motor 1,47 juta unit; - Mobil penumpang 331,19 ribu unit; - Mobil bermuatan 54,2 ribu unit; - Bus 3.538 unit; dan - Kendaraan khusus 2.028 unit.

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Selain kebijakan yang telah disebutkan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui beberapa faktor penunjang sebagai berikut.

1. Faktor pendukung keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan salah satunya adalah inovasi yang semakin memudahkan dalam mendapatkan layanan, inovasi tersebut yaitu SIOPTIMUS atau Sistem Informasi Operasional, Tracking dan Monitoring Bus Sekolah Gratis, merupakan sebuah aplikasi *mobile* yang kegunaannya untuk memantau siswa yang berada di dalam bus sekolah, selain itu aplikasi tersebut dapat digunakan untuk memastikan kedatangan bus sekolah, meminimalisir tawuran antar pelajar, mencegah terjadinya pelecehan seksual serta sebagai alat ukur evaluasi kinerja pelayanan publik angkutan sekolah gratis.
2. Faktor pendukung keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan salah satunya adalah inovasi, beberapa inovasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dalam mengurangi titik kemacetan antara lain :
 - a. ATCS atau *Area Traffic Control System* adalah sistem pengendalian lalu lintas yang menggunakan teknologi informasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja jaringan jalan dengan mengoptimalkan pengaturan lampu lalu lintas di persimpangan; dan
 - b. sistem satu arah atau *one way* adalah sistem pengaturan lalu lintas yang hanya mengizinkan kendaraan bergerak ke satu arah. Sistem ini biasanya diterapkan pada jalan dua arah yang diubah menjadi satu arah untuk meningkatkan kapasitas jalan dan kelancaran lalu lintas.
3. Keputusan Wali Kota Nomor 620/Kep.592-Huk/2018 Tentang Status Jalan Kota, Kota Tangerang Selatan.

4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Kendala

1. Belum terintegrasinya sistem evakuasi bencana dan sistem proteksi kebakaran dengan infrastruktur penunjang lainnya seperti sistem jaringan jalan, menyebabkan ketahanan daerah terhadap bencana rendah.
2. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang ramah kepada kelompok rentan seperti disabilitas, lanjut usia, wanita dan anak-anak, masih menjadi permasalahan yang dirasakan di Kota Tangerang Selatan.
3. Terbatasnya kapasitas jalan dan simpang juga menyulitkan operasional transportasi umum massal berbasis jalan yang membutuhkan lebar jalan dan simpang yang cukup;
4. Kendala pembebasan lahan untuk meningkatkan kapasitas jalan karena tingginya harga lahan.
5. Belum optimalnya pengelolaan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dan belum adanya layanan transportasi publik yang terintegrasi antar simpul.

Upaya

1. Perencanaan infrastruktur transportasi yang terpadu melalui kegiatan pemetaan jalur transportasi dan memetakan rute jalan, jalur sepeda, dan jalur transportasi umum secara harmonis sehingga memudahkan aksesibilitas antara berbagai moda transportasi dengan jalur evakuasi.
2. Membangun infrastruktur yang aksesibel bagi disabilitas dalam bentuk menyediakan kursi atau tempat duduk yang nyaman di trotoar dan tempat umum agar lansia dapat beristirahat saat berjalan, khususnya di lokasi yang memiliki banyak pejalan kaki seperti pasar, taman, atau pusat transportasi, memastikan jalan-jalan memiliki tanda dan marka yang jelas serta penerangan yang baik agar lansia dapat berjalan dengan aman, terutama di malam hari. penggunaan lampu jalan dengan intensitas cahaya yang sesuai dapat membantu lansia untuk melihat lebih jelas dan membuka lebih banyak fasilitas kesehatan yang ramah lansia dan mudah diakses, serta mendorong rumah sakit atau klinik untuk menyediakan layanan kesehatan khusus bagi lansia, termasuk ruang tunggu yang nyaman dan fasilitas medis yang mendukung.
3. Perlebaran jalan untuk meningkatkan kapasitas jalan dengan memperluas jalur atau menambah jalur baru untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan arus kendaraan.
4. Pembebasan lahan bertahap (*phased land acquisition*) pembebasan lahan bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
5. Pembangunan Kawasan TOD Kota, Sub Kota dan Lingkungan untuk integrasi sistem transportasi.



Penghargaan yang didapatkan Kota Tangerang Selatan terkait pencapaian sasaran "Kinerja Lalu Lintas/Transportasi Kota (V/c ratio)".



Penghargaan Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Peringkat II oleh Kementerian PU Tahun 2024.

3.2.4.3 Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni

Indeks kota layak huni menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana sebuah kota mampu menyediakan lingkungan yang nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi warganya. Indeks kota layak huni walaupun belum memenuhi target dari Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024, tetapi sudah melampaui target RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2026 dengan ketercapaian 104,93%. Peningkatan indeks ini menunjukkan adanya kemajuan dalam berbagai aspek tata kota, transportasi, ruang terbuka hijau, serta layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak. Keberhasilan dan kegagalan yang terjadi dalam meningkatkan indeks kota layak huni dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut.

1. Beberapa kawasan permukiman di Kota Tangerang sudah tertata dengan baik sesuai dengan rencana tata ruang kota, hal ini juga didukung dengan adanya perumahan-perumahan skala besar yang terintegrasi dengan baik, seperti BSD, Bintaro, Alam Sutera, dan *South City*.
2. Peningkatan jumlah dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai paru-paru kota dan area rekreasi masyarakat.
3. Upaya mitigasi bencana seperti pengendalian banjir melalui perbaikan drainase dan resapan air.
4. Pengawasan terhadap pengembangan kawasan permukiman agar sesuai dengan rencana tata kota.

Secara rinci faktor-faktor lain yang memberikan pengaruh terhadap terciptanya kota layak huni di kota Tangerang Selatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.52 Faktor Keberhasilan Sasaran Tujuan 3 “Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni”

No	Sasaran	Indikator	Faktor Keberhasilan
1	Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas berhasil melampaui target dengan nilai akumulasi dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan, berikut nilainya: • Indeks kualitas air 64 (sedang); • Indeks kualitas udara 71,59 (baik); dan • Indeks kualitas lahan 36,38 (kurang). 1. Kualitas air Rendahnya pencemaran oleh plastik dan sampah, karena sampah plastik yang dibuang sembarangan ke perairan juga menjadi penyebab utama penurunan kualitas air. Data menunjukkan TPS 3R sebanyak 36 unit yang

No	Sasaran	Indikator	Faktor Keberhasilan
			tersebar di Seluruh Kecamatan yang menyebabkan kualitas udara baik. Pengendalian kualitas air dilakukan melalui program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dan sub kegiatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati diantaranya: • Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut; • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); • Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya; • Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan; • Penyimpanan sementara limbah B3; • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan; dan • penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST /SPA Kabupaten/Kota. 2. Kualitas Udara Rendahnya polusi dari kendaraan bermotor, karena salah satu penyebab utama pencemaran udara adalah emisi gas buang dari kendaraan bermotor. kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan polutan seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOx), dan partikulat halus yang dapat memperburuk kualitas udara. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota dan sub kegiatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati diantaranya: • Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut; • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 8 Ha; dan • Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya.
		Ruang terbuka hijau publik	1. Terlaksananya program penyelenggaraan penataan ruang dengan kegiatan kegiatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah Kabupaten / Kota, kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota. • SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). 2. Penetapan kawasan peruntukan zona RTH 719,43, Kawasan peruntukan zona lainnya 176,50 dan objek ruang berfungsi RTH 218,03 sehingga total persentase kawasan lindung dan RTH 8,58%.
2	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan	Indeks rasa aman	Ada empat komponen yang terdapat dalam indikator rasa aman, antara lain keamanan dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan, dan angka kriminalitas. 1. Terlaksananya program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum melalui kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota, penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Kota serta Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) • Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 7 orang; • Tersedianya SOP dalam penegakan PERDA dan PERKADA serta penanganan gangguan trantibum sebanyak 20 SOP; • Jumlah PERDA dan PERKADA yang ditegakkan sebanyak 8 PERDA dan PERKADA; • Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani sebanyak 340;

No	Sasaran	Indikator	Faktor Keberhasilan
			• Jumlah SATLINMAS yang terlatih dan dikukuhkan sebanyak 270 orang; dan • Tersedianya sarana prasarana minimal sebanyak 14. 2. Terlaksananya program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan melalui kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan; 3. Terlaksananya program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan; 4. Terlaksananya program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya melalui perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan 5. Terlaksananya program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial melalui perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial. jumlah penanganan konflik tahun 2024 sebanyak 20 konflik.
		Indeks demokrasi	Indeks Demokrasi adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di Kota Tangerang Selatan. Tinggi rendahnya indeks demokrasi tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya akan semakin tinggi pula indeks demokrasinya. 1. Terlaksananya program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan melalui perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan; 2. Terlaksananya program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik. • Jumlah kejadian/peristiwa konflik di masyarakat tertangani sebesar 88,89% tertangani dengan kategori sangat tinggi; • Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dalam PILKADA, PILEG dan PILPRES 98,50% partisipasi dengan kategori sangat tinggi; dan • Jumlah aspirasi publik yang disampaikan oleh masyarakat/kelompok masyarakat sesuai ketentuan 28.46% kategori sangat tinggi.

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Tabel 3.53 Faktor Kegagalan Sasaran Tujuan 3 “Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni”

No	Sasaran	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya
1	Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan	Persentase permukiman layak huni	Persentase permukiman layak huni belum mencapai target yang ditetapkan dalam PK dengan selisihnya sebesar 0,09% dari target yang ditentukan dan belum melampaui target dari RPJMD Kota Tangerang Selatan 2026 dengan capaian 99,60%, berikut faktor kegagalan. 1. Masih berjalannya pendataan perumahan sehingga kondisi dilapangan belum terekam dalam data; 2. Banyak pengembang perumahan yang telah	1. Kerjasama yang baik antara instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, LSM, dan sektor swasta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program; 2. Dukungan aktif dan partisipasi masyarakat dapat membantu dalam merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat; 3. Komitmen kuat dari pemerintah dalam membentuk regulasi pertanahan dapat meningkatkan keberhasilan implementasi;

No	Sasaran	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya
			meninggalkan proyek perumahannya, sehingga hanya perumahan yang telah diserahkan sebelum kepergian mereka yang memiliki Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) sesuai standar; 3. Pada tahun 2024, kejadian bencana alam terbilang sangat minim, sehingga kebutuhan rehabilitasi rumah bagi korban bencana menjadi sulit diprediksi karena bergantung pada faktor alam yang tidak dapat dikendalikan; dan 4. Sebagian besar penduduk Tangerang Selatan, terutama yang tinggal di kawasan pemukiman informal, memiliki keterbatasan ekonomi untuk memperbaiki atau membangun rumah yang layak, sehingga mereka terpaksa tinggal di hunian yang tidak memenuhi standar.	4. Keterlibatan aktif dan partisipasi dari berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, ahli pertanahan, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah; 5. Penelitian yang mendalam dan kajian yang komprehensif tentang kondisi pertanahan serta masalah yang perlu diatasi dapat membantu merancang regulasi yang relevan dan efektif; 6. Melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi publik dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan kekhawatiran mereka, sehingga regulasi dapat merespon secara tepat; dan 7. Pemerintah bekerjasama dengan pengembang dan pihak swasta untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah, serta mendorong perumahan yang ramah lingkungan.
		Cakupan pengelolaan sampah	Cakupan pengelolaan sampah belum mencapai target yang ditetapkan dalam PK dengan selisihnya sebesar 0,46% dari target yang ditentukan dan belum melampaui target dari RPJMD Kota Tangerang Selatan 2026 dengan capaian 99,54%, berikut faktor kegagalan. 1. Besarnya timbunan sampah harian, karena penambahan jumlah penduduk tiap tahunnya; 2. Belum optimalnya TPS3R, karena keterbatasan SDM; 3. Kapasitas pengolahan sampah yang terbatas, dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah tidak memadai, serta fasilitas daur ulang yang minim; dan 4. Banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk memilah sampah, yang mengakibatkan sampah tercampur antara sampah organik, anorganik, dan berbahaya.	1. Mengoptimalkan peran rumah minim sampah, melalui pembatasan timbunan sampah di sumber sampah seperti pembatasan timbunan sampah organik dan sampah plastik sekali pakai; 2. Mengoptimalkan retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan PERMENDAGRI No.7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah; 3. Perlu membangun fasilitas pengolahan sampah yang lebih modern dan terdiversifikasi, seperti pabrik daur ulang sampah dan fasilitas pengomposan. Selain itu, TPA yang ramah lingkungan dan memiliki teknologi pemrosesan yang lebih efisien, seperti <i>waste-to-energy</i>, perlu diperkenalkan; dan 4. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga harus diperkuat. Pemerintah dan LSM bisa bekerja sama dalam kampanye penyuluhan melalui

No	Sasaran	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya
				media sosial, sekolah, dan kegiatan komunitas.
2	Meningkatkan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam	Indeks risiko bencana	Indeks risiko bencana belum mencapai target yang ditetapkan dalam PK dengan selisihnya sebesar 8,1% dari target yang ditentukan dan belum melampaui target dari RPJMD Kota Tangerang Selatan 2026 dengan capaian -6,36%, berikut faktor kegagalan. 1. Penilaian risiko bencana membutuhkan data yang sangat akurat dan terperinci tentang berbagai faktor seperti topografi, kepadatan penduduk, infrastruktur, serta sejarah kejadian bencana. Seringkali data yang tersedia tidak cukup lengkap atau tidak mutakhir; 2. Banyak indeks risiko bencana alam yang lebih fokus pada kejadian bencana yang sifatnya mendesak dan langsung, seperti gempa bumi atau banjir, namun kurang mampu memprediksi dampak jangka panjang dari bencana seperti perubahan iklim atau kerusakan lingkungan yang berlangsung lama; 3. kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dapat menyebabkan fragmentasi dalam pengumpulan data dan pembuatan kebijakan; dan 4. Proyeksi risiko bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim sangat bergantung pada model iklim yang memiliki ketidakpastian. Perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam, namun dampaknya sangat bergantung pada banyak faktor yang sulit diprediksi.	1. Upaya Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sistem pengumpulan data yang terintegrasi dan real-time. Penggunaan teknologi canggih seperti satelit, sensor, dan sistem informasi geografis (SIG) dapat membantu dalam memperoleh data yang lebih akurat dan terus diperbarui. 2. Upaya Penyesuaian indikator yang digunakan dalam penilaian indeks untuk mencakup dampak jangka panjang, seperti kerusakan terhadap ekosistem, perubahan pola cuaca, dan dampak ekonomi. Pemodelan berbasis skenario juga bisa membantu dalam memahami potensi risiko jangka panjang. 3. Upaya Pembangun mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana, termasuk pusat data yang terintegrasi. Pembentukan satuan tugas atau komite khusus di tingkat daerah yang melibatkan semua pihak terkait dapat mempercepat pengumpulan informasi dan pembuatan kebijakan. 4. Upaya Peningkatan riset mengenai perubahan iklim dan pengembangan model yang lebih akurat untuk memprediksi dampaknya. Kolaborasi internasional dalam penelitian iklim dan bencana alam serta peningkatan kapasitas untuk mengadaptasi perubahan iklim dapat membantu mengurangi ketidakpastian ini.

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Kendala

1. Masih rendahnya indeks kualitas lahan dengan nilai 36,38 (kategori kurang).
2. Belum optimalnya penegakan PERDA/PERWAL dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

3. Kendala seperti pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat yang meningkatkan tekanan terhadap fasilitas publik serta menyebabkan ketimpangan dalam akses layanan dasar.
4. Keterbatasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan menjadi permukiman dan area komersial semakin membatasi ruang hijau kota.

Upaya

1. Pengendalian terhadap pencemaran air, tanah dan udara melalui kewajiban AMDAL/UKL-UPL yang terintegrasi dengan perizinan bagi jenis usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Peningkatan cakupan pengelolaan sampah, akses jaringan air minum perpipaan dan akses terhadap sanitasi yang layak, pembangunan taman, pembuatan sumur resapan serta pengendalian limbah B3 merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran udara, air dan tanah.
2. Penanganan, saran dan masukan, menyediakan infrastruktur pengaduan yang berbasis digital, seperti aplikasi pengaduan dengan menyediakan petugas operator yang dapat merespon segala bentuk pengaduan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang dapat mempermudah pengguna layanan.
3. Perencanaan kota yang lebih baik dan terintegrasi, dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, sangat penting untuk mengurangi tekanan terhadap fasilitas publik.
4. Merancang integrasi RTH dalam perencanaan kawasan permukiman dan komersial, seperti taman kota di tengah perumahan, atau ruang terbuka hijau yang dapat diakses oleh publik di kawasan komersial.

3.2.4.4 Tujuan 4 : Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Ekonomi Daerah

Keberhasilan dalam meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah di Kota Tangerang Selatan didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, pertumbuhan sektor UMKM dan industri kreatif yang didorong melalui berbagai program pembinaan, kemudahan akses permodalan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas pasar. Kedua, peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif, yang diwujudkan melalui kemudahan perizinan, insentif bagi pelaku usaha, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang memadai. Ketiga, penguatan SDM dan inovasi teknologi, dengan menyediakan pelatihan kewirausahaan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dukungan terhadap ekosistem startup dan ekonomi berbasis digital. Keempat, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang semakin menarik wisatawan dan investor melalui promosi destinasi unggulan serta penyelenggaraan berbagai event ekonomi dan budaya. Terakhir, kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga tercipta ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Dengan berbagai faktor ini, perekonomian Kota Tangerang Selatan terus berkembang dan semakin kompetitif dalam menghadapi dinamika ekonomi regional maupun nasional. Untuk melengkapi informasi faktor keberhasilan ini juga disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.54 Faktor Keberhasilan Sasaran Tujuan 4 “Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Ekonomi Daerah”

No	Sasaran	Indikator	Faktor Keberhasilan
1	Meningkatkan sektor ekonomi kreatif	Nilai sektor ekonomi kreatif	Nilai sektor ekonomi kreatif pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 7,8 triliun yang kemudian meningkat menjadi 14,68 triliun dan di tahun 2024 telah mampu mempertahankan sebesar 14,68 triliun. Hal ini menggambarkan adanya pemberdayaan pada sektor ekonomi kreatif di Kota Tangerang Selatan. Namun peningkatan ini masih perlu upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mendorong sektor industri yang meliputi hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, berikut adalah faktor-faktor yang mendorong keberhasilan dari pada indeks nilai sektor ekonomi kreatif diantaranya: 1. Terlaksananya program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan kegiatan berupa penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagian ruang bereksprosi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Kabupaten/Kota dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. ▪ Saat ini Tangerang Selatan sudah memiliki sarana berupa studio kreatif Tangerang Selatan sudah untuk para pelaku ekonomi kreatif untuk dapat bereksprosi dan mempromosikan usaha kreatifnya. 2. Terlaksananya program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan kegiatan berupa pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. • Kota Tangerang Selatan terdapat 14,500 jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata dan yang telah tersertifikasi sebanyak 406.
2	Meningkatkan investasi	Nilai investasi	Tumbuhnya ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur ekonomi dan pelayanan perizinan satu pintu dan secara online untuk menarik investasi yang dapat menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. adapun yang menjadi faktor keberhasilan tercapainya nilai investasi tahunan adalah 1. Terlaksananya program pengembangan iklim penanaman modal melalui kegiatan : ▪ Penetapan pemberian fasilitas/insentif di Bidang Penanaman Modal; dan ▪ Pembuatan peta potensi investasi pada skala Kota Tangerang Selatan 2. Terlaksananya program promosi penanaman modal melalui kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal; 3. Terlaksananya program pelayanan penanaman modal melalui kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal; 4. Terlaksananya program pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 5. Terlaksananya program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal melalui kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah; 6. Terlaksananya program perizinan dan pendaftaran perusahaan melalui kegiatan : ▪ Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang; ▪ Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; dan ▪ Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/ Kota. 7. Terlaksananya program peningkatan sarana distribusi perdagangan melalui kegiatan : ▪ Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan ▪ Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. 8. Terlaksananya program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan

No	Sasaran	Indikator	Faktor Keberhasilan
			barang penting melalui kegiatan ▪ Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/ Kota; ▪ Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota; dan ▪ Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota. 9. Terlaksananya program pengembangan ekspor melalui kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan; 10. Terlaksananya program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri melalui kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; 11. Terlaksananya program perencanaan dan pembangunan industri melalui kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kota Tangerang Selatan; 12. Terlaksananya program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota melalui kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota; 13. Terlaksananya program pengelolaan sistem informasi industri Nasional penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota; dan 14. Mengenai informasi industri, sebanyak 26 informasi industri untuk IUI (Izin Usaha Industri), IPUI (Izin Produksi Usaha Industri), IUKI (Izin Usaha Kecil Industri), dan IPKI (Izin Produksi Kecil Industri) tersedia dari total potensi 66. Meski demikian, masih ada potensi yang belum tergarap sepenuhnya, yang bisa dijadikan fokus untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi industri. Dalam hal pemantauan izin, terdapat dua izin yang dipantau berdasarkan persetujuan teknis yang dikeluarkan, yang berjumlah sama dengan jumlah persetujuan teknis yang diterbitkan oleh OSS. Ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara proses penerbitan izin dengan pengawasan teknis yang lebih terperinci.
3	Meningkatkan daya saing pemuda	Produktivitas tenaga kerja per total output Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa	Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Adapun data produktivitas tenaga kerja diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan realisasi produktivitas tenaga kerja per total output tahun 2024 sebesar Rp.186.503.283 tercapainya indikator tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor keberhasilan diantaranya: • Terlaksananya program perencanaan tenaga kerja melalui kegiatan penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Saat Ini Kota Tangerang Selatan sudah memiliki dokumen rencana tenaga kerja dengan presentase sebanyak 19 kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah. Realisasi kinerja indikator Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa adalah sebesar Rp118.560.796 tercapainya indikator tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor keberhasilan diantaranya: 1. Terlaksananya program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan: ▪ Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dengan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri sebanyak 1.866; ▪ Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; ▪ Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja dengan jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terdaftar dan berizin sebanyak 112 LPK; ▪ Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil; dan ▪ Pengukuran produktivitas tingkat daerah Kabupaten/Kota. 2. Terlaksananya program penempatan tenaga kerja dengan kegiatan: ▪ Pelayanan antarkerja di daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah

No	Sasaran	Indikator	Faktor Keberhasilan
			tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam Wilayah Kota sebanyak 4.269; ▪ Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota; ▪ Pengelolaan informasi pasar kerja; dan ▪ Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota. 3. Terlaksananya program hubungan industrial dengan kegiatan: ▪ Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota; dan ▪ Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah kasus hubungan industrial yang diatasi sebanyak 49 dari jumlah kasus hubungan industrial sebanyak 49.

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Kendala

1. Belum optimalnya hasil penelitian yang mendukung kualitas kebijakan penyelenggaraan daerah, Inovasi sudah cukup banyak akan tetapi masih cenderung per sektor sesuai tupoksinya masing masing, atau masih berfokus pada aplikasi saja dan kapabilitas inovasi berada pada kategori sedang yang memerlukan upaya untuk dapat ditingkatkan.
2. Pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif, terutama yang baru memulai, kesulitan mendapatkan pembiayaan atau modal untuk mengembangkan usaha mereka. Bank atau lembaga keuangan tradisional seringkali enggan memberikan pinjaman kepada pelaku ekonomi kreatif karena dianggap berisiko tinggi dan tidak memiliki aset yang dapat dijaminkan.
3. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan nilai investasi adalah investasi yang diukur melalui pendekatan nilai ICOR dimana semakin tinggi ICOR mengidentifikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi, tercatat nilai ICOR Kota Tangerang Selatan lebih kecil yang menggambarkan bahwa penciptaan investasi di Kota Tangerang Selatan belum efisien.
4. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa antara lain masih rendahnya penyerapan dan produktivitas tenaga kerja lokal.

Upaya

1. Upaya dalam terkait kendala melakukan pengembangan riset dan inovasi daerah sebagai solusi permasalahan secara komperhensif dalam kerangka Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).
2. Upaya memperkenalkan skema pembiayaan yang lebih ramah bagi sektor ekonomi kreatif, seperti dana hibah, pinjaman dengan bunga rendah, atau skema *crowdfunding*. Selain itu, menyediakan pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif tentang cara mengakses pembiayaan dan pengelolaan keuangan usaha juga penting.
3. Upaya menumbuhkembangkan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur ekonomi dan pelayanan perizinan satu pintu untuk menarik investasi yang dapat menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa antara lain adalah menumbuh kembangkan usaha informal dan ekonomi kreatif yang bergerak pada sektor perdagangan dan jasa, peningkatan pelatihan tenaga kerja untuk sektor usaha perdagangan dan jasa untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam sektor perdagangan dan jasa.



Penghargaan didapatkan untuk pencapaian sasaran “Meningkatkan Sektor Ekonomi Kreatif”.

Penghargaan *Grow and Sustain*, dari Kementerian Koperasi dan UKM, atas dukungan dan partisipasi *Entrepreneur HUB* Tangerang Raya, 2024.



Penghargaan didapatkan untuk pencapaian sasaran “Meningkatkan Investasi”.

Penghargaan Hasil Penilaian Kepatuhan penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada DPMPSTP Kota Tangerang Selatan dari OMBUDSMAN RI “Zona Hijau” Kualitas Tinggi.



Penghargaan didapatkan untuk pencapaian sasaran “Meningkatkan Sektor Ekonomi Kreatif”.

Penganugerahan penghargaan perlindungan konsumen sebagai daerah tertib ukur UTTP.

3.2.4.5 Tujuan 5 :Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Keberhasilan dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien di Kota Tangerang Selatan, yang diukur melalui indeks reformasi birokrasi, didukung oleh berbagai faktor utama. Faktor-faktor ini mencerminkan bagaimana upaya perbaikan tata kelola pemerintahan telah menghasilkan peningkatan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, kualitas layanan publik, serta efisiensi birokrasi. Tabel berikut adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian tersebut.

Tabel 3.55 Faktor Keberhasilan Sasaran Tujuan 5 “Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien”

Sasaran	Indikator	Faktor Keberhasilan
Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien	Opini BPK	1. Adanya pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan; 2. Dilaksanakannya rekonsiliasi dengan perangkat daerah secara berkala; 3. Laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; 4. Adanya kerjasama yang baik antar unit organisasi baik di internal dan juga dengan perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan; 5. Adanya pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan; dan 6. Perangkat daerah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu.
	Indeks kepuasan masyarakat	1. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas fisik pelayanan umum agar memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan kebutuhan aksesibilitas bagi semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas; 2. Perbaikan tata kelola Infrastruktur Umum meliputi jalan akses, dan fasilitas parkir. Perbaikan tata kelola ini akan memudahkan akses masyarakat ke lokasi pelayanan umum dan meningkatkan efisiensi layanan; 3. Pengembangan dan pemelihara aplikasi pelayanan umum sehingga pengguna dapat merasakan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan aplikasi; dan 4. Menyusun program pelatihan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan. Program ini mencakup pelatihan teknis, manajerial, dan keterampilan interpersonal.

Sumber : Hasil Analisis, 2024.



Penghargaan yang didapatkan Kota Tangerang Selatan terkait pencapaian sasaran “Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien”.

Penghargaan dari Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Kepada Kota Tangerang Selatan sebagai penerima penghargaan pada kategori realisasi pendapatan daerah tertinggi pada penganugerahan APBD AWARD RAKORNAS Keuangan Daerah 2024.

Tabel 3.56 Faktor Kegagalan Sasaran Tujuan 1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”

Sasaran	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya
Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, nilai 69,06 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perkin dengan nilai BB (70).	1. Melakukan revidi atas dokumen perencanaan kinerja guna memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen perencanaan telah berorientasi <i>outcome</i> dan sesuai dengan jenjang levelnya, Indikator kinerja yang digunakan telah menjawab sasaran kinerja serta target kinerja mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya; 2. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian sasaran kinerja pada dokumen perjanjian kinerja; 3. Mengembangkan dan memanfaatkan aplikasi e-sakip dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kinerja secara berkala dan <i>real time</i> baik di level PEMDA maupun OPD; 4. Menyelesaikan pengintegrasian data kepegawaian dan memanfaatkannya dalam pengukuran kinerja pegawai dan menjadikan hasil pengukuran kinerja pegawai menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja atau penghasilan; 5. Melakukan pengukuran kinerja secara periodik atau triwulanan mengacu pada dokumen perencanaan kinerja hasil perbaikan bagi sebagian OPD yang sudah melakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja serta melakukan revidi kembali pada dokumen perencanaan sebagian OPD yang lainnya; 6. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan hasil informasi deskriptif program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tingkat pemerintah daerah dan seluruh OPD; 7. Memastikan kembali pengukuran sehingga pelaporan kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diandalkan; dan 8. Memastikan bahwa catatan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi sakip di setiap OPD.
	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Belum optimalnya kevalidan serta keandalan data dan informasi;	1. Mempertahankan dan meningkatkan kevalidan serta keandalan data dan informasi yang merupakan ukuran kebenaran sebuah dokumen pelaporan yang berkualitas karena

Sasaran	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya
		2. Belum optimalnya Tim Penyusun LPPD dalam analitis untuk menguraikan masalah-masalah berkaitan rendahnya capaian indikator kinerja kunci terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah; 3. Belum optimalnya evaluasi kinerja mandiri/ <i>self assesment</i> yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.	data dan informasi yang terkandung didalamnya sesuai dengan fakta yang terjadi didalam organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Meningkatkan kompetensi Tim Penyusun LPPD berupa kemampuan analitis untuk menguraikan masalah-masalah berkaitan rendahnya capaian indikator kinerja kunci terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan dapat dicari solusi pemecahan masalah sehingga mampu memperbaiki kualitas penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. 3. Melaksanakan evaluasi kinerja mandiri/ <i>self assesment</i> yang belum dilaksanakan secara optimal oleh Perangkat Daerah.
	Indeks persepsi korupsi/survei penilaian integritas dikeluarkan oleh KPK RI	1. Adanya kendala teknis dalam hal teknologi untuk melaksanakan pengendalian internal; 2. kurangnya fokus pada pengawasan berbasis risiko, lemahnya pengawasan preventif, serta terbatasnya tindak lanjut hasil pengawasan. Akibatnya, potensi penyimpangan atau inefisiensi dalam pelaksanaan program daerah sulit untuk diantisipasi secara dini.	1. Meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi dalam pemberantasan korupsi dan penegakan integritas; 2. Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan 3. Meningkatkan kinerja pelayanan publik berintegritas tinggi dalam pembangunan Zona Integritas (ZI).

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Kendala

1. Masih adanya resistensi terhadap perubahan dalam penerapan reformasi birokrasi, baik di tingkat kebijakan maupun pelaksanaannya, yang menyebabkan adopsi inovasi berjalan lambat.
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik, di mana beberapa layanan masih berjalan secara konvensional, sehingga menghambat efektivitas dan efisiensi administrasi.
3. Birokrasi yang masih cenderung hierarkis dan kurang fleksibel, sehingga proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik memerlukan waktu lebih lama. Kelima, koordinasi lintas sektor dan antar instansi yang belum optimal, yang menyebabkan kurangnya sinkronisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
4. Tantangan dalam membangun budaya kerja yang berbasis kinerja dan pelayanan, di mana masih terdapat kendala dalam penerapan sistem evaluasi kinerja yang objektif dan berbasis hasil.

Upaya

1. Percepatan digitalisasi layanan publik melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan efisiensi administrasi serta transparansi dalam pelayanan.
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur melalui pelatihan, penguatan budaya kerja berbasis kinerja, serta penerapan sistem merit dalam manajemen ASN agar lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
3. Penyederhanaan birokrasi dan pemangkasan prosedur administrasi, sehingga layanan publik dapat diakses lebih cepat, mudah, dan akuntabel.
4. Penguatan koordinasi lintas sektor dan antar instansi, dengan membangun sinergi antar perangkat daerah serta meningkatkan efektivitas forum komunikasi dan perumusan kebijakan berbasis data.

3.2.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran)

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, analisis efisiensi anggaran menjadi aspek penting dalam menilai sejauh mana alokasi dan penggunaan anggaran di Kota Tangerang Selatan telah berjalan secara optimal. Efisiensi anggaran mencerminkan bagaimana sumber daya keuangan daerah digunakan secara efektif untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penghematan, meningkatkan efektivitas belanja daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan kota. Berikut disajikan tabel data realisasi dan capaian anggaran tahun 2024.

Tabel 3.57 Efisiensi Sumber Daya/Anggaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks pembangunan manusia	%	83,70	84,16	100,55	1.816.198.611.762	1.755.904.719.355	60.293.892.407
	Meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks pendidikan	%	80,83	80,83	100,00	873.003.061.432	860.383.951.945	12.619.109.487
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	75,84	75,80	99,95	847.145.860.560	804.005.030.235	43.140.830.325
	Meningkatkan kesejahteraan keluarga	Indeks pembangunan keluarga	Predikat	Baik (70)	baik (70)	100,00	42.411.562.503	40.826.709.621	1.584.852.882
	Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks pembangunan pemuda	Poin	55,00	55,86	101,56	48.787.240.307	45.951.517.035	2.835.723.272
	Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks pembangunan gender	Poin	94,53	94,23	99,68	4.850.886.960	4.737.510.519	11.512.875.272
		Indeks pemberdayaan gender	Poin	73,86	72,67	98,39			
Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi		Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	Poin	7,03	8,29	117,92	406.778.761.762	395.265.886.490	11.512.875.272
	Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Rasio konektivitas kota	Rasio	0,89	0,93	104,49	406.778.761.762	395.265.886.490	11.512.875.272
		Kinerja lalu lintas/transportasi kota (v/c ratio)	Rasio	0,54	0,54	100,00			
Meningkatkan kualitas		Indeks kota layak huni	Poin	71,77	70,03	97,58	1.584.418.066.140	1.556.804.154.575	27.613.911.565

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
kota sebagai kota layak huni	Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	60,66	61,03	100,61	1.015.607.729.079	1.006.174.704.796	9.433.024.283
		Persentase pemukiman layak huni	%	99,69	99,6	99,91			
		Cakupan pengelolaan sampah	%	100	99,54	99,54			
		Ruang terbuka hijau publik	%	4,59	8	174,29			
	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan	Indeks rasa aman	Predikat	Aman (66,97)	aman (66,98)	100,01	286.180.553.639	274.303.824.493	11.876.729.146
		Indeks demokrasi	Predikat	Baik (81)	Tinggi (86,04)	106,22			
	Meningkatkan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam	Indeks risiko bencana	Predikat	Rendah	Sedang (68,10)	86,5	282.629.783.422	276.325.625.286	6.304.158.136
	Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah	Indeks daya saing daerah	Predikat	Sangat tinggi (3,81)	Sangat tinggi (3,81)	100,00	106.939.836.667	104.165.776.273	2.774.060.394
		Meningkatkan sektor ekonomi kreatif	(triliun rupiah)	14,68	14,68	100,00	36.437.257.622	35.171.496.341	1.265.761.281
		Meningkatkan investasi	(triliun rupiah)	7,44	8,47	113,84	51.888.059.510	50.782.098.364	1.105.961.146
		Meningkatkan produktivitas kerja per total output	(rupiah)	169.838.260	169.838.260	100,00	18.614.519.535	18.212.181.568	402.337.967

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
	tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa	(rupiah)	109.284.473	109.284.473	100,00			
Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien		Indeks reformasi birokrasi	Poin	76,79	85,61	111,49	847.096.741.149	793.105.471.908	53.991.269.241
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat	BB	B 69,06	98,66	847.096.741.149	793.105.471.908	53.991.269.241
		Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Poin	4,00	3,54	88,50			
		Opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah	Predikat	WTP	WTP	100,00			
		Indeks persepsi korupsi/ survei penilaian integritas dikeluarkan oleh KPK RI	Poin	84,00	76,25	90,77			
		Indeks kepuasan masyarakat	Poin	89,87	90,25	100,42			
	Total							4.761.432.017.480	4.605.246.008.601
Rata-rata capaian kinerja sasaran (jumlah capaian semua indikator/jumlah indikator)						104,45			

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (LRA 31 Desember 2024), Hasil Analisis Tahun 2024

Analisis efisiensi anggaran Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa secara umum, pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan. Pertama, realisasi belanja daerah menunjukkan tren yang positif, dengan proporsi anggaran yang lebih banyak dialokasikan untuk belanja modal dan program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kedua, tingkat efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan meningkat, yang ditunjukkan dengan pengurangan belanja yang kurang produktif serta optimalisasi penggunaan teknologi dalam administrasi keuangan dan pelayanan publik.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam meningkatkan efisiensi anggaran, seperti tingginya belanja pegawai dibandingkan belanja modal, sehingga perlu adanya strategi untuk meningkatkan proporsi belanja yang lebih produktif. Selain itu, realisasi beberapa program strategis masih menghadapi kendala teknis dan administratif, seperti proses perencanaan yang belum sepenuhnya terintegrasi serta kendala dalam pelaksanaan proyek infrastruktur yang menyebabkan serapan anggaran tidak optimal. Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menunjukkan komitmen dalam mengelola anggaran dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menerapkan sejumlah strategi guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Pertama, memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, dengan memastikan setiap program dan kegiatan memiliki indikator capaian yang jelas serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Kedua, optimalisasi belanja daerah, terutama dengan menekan belanja pegawai yang tidak esensial serta meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja modal yang berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Ketiga, percepatan serapan anggaran melalui perbaikan sistem administrasi dan perizinan, guna mengurangi hambatan birokrasi yang sering menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program dan proyek strategis.

Keempat, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk penerapan *e-budgeting*, *e-planning*, dan *e-reporting*, agar transparansi dan akuntabilitas anggaran semakin meningkat serta mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan.

Kelima, peningkatan kapasitas aparatur dalam manajemen anggaran, melalui pelatihan dan pendampingan teknis agar pengelolaan keuangan daerah lebih profesional dan efisien.

Keenam, penguatan pengawasan dan evaluasi anggaran, baik oleh internal pemerintah maupun melalui partisipasi masyarakat dan lembaga pengawas independen, untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan efisiensi anggaran di Kota Tangerang Selatan dapat terus meningkat, sehingga keuangan daerah dapat digunakan secara lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, berbagai program dan kegiatan strategis telah dirancang dan diimplementasikan sebagai upaya konkret dalam meningkatkan efektivitas pencapaian pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Program dan kegiatan ini disusun berdasarkan prioritas daerah serta mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan, guna memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Berikut adalah program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja daerah di tahun 2024.

Tabel 3.58 Program Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
Indeks pembangunan manusia (%)	1.816.198.611.762	1.755.904.719.355	96,68
Meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan			
Indeks pendidikan %			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	496.754.500.750	490.648.889.743	98,77
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.216.099.160	1.132.971.900	93,16
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	484.639.434.520	479.598.864.151	98,96
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	9.700.000		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	232.000.000	228.000.000	98,28
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.499.495.140	1.170.355.881	78,05
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.898.260.450	2.564.253.500	88,48
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.343.439.480	5.263.502.097	98,50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	916.072.000	690.942.214	75,42
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	303.551.487.598	299.974.568.549	98,82
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	163.796.995.461	163.408.445.373	99,76
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	102.660.165.637	101.264.032.842	98,64
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	24.300.428.000	23.747.489.378	97,72
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12.793.898.500	11.554.600.956	90,31
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	313.730.000	289.114.000	92,15
Penetapan Kurikulum Muatam Lokal Pendidikan Dasar	250.000.000	226.784.000	90,71
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	63.730.000	62.330.000	97,80
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	70.528.292.090	67.940.215.440	96,33
Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	70.528.292.090	67.940.215.440	96,33

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	892.138.140	756.436.973	84,79
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	233.431.620	206.065.000	88,28
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	548.036.520	486.121.973	88,70
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.670.000	64.250.000	58,06
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	797.356.854	717.476.640	89,98
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	797.356.854	717.476.640	89,98
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	165.556.000	57.250.600	34,58
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	67.702.080	33.731.000	49,82
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	97.853.920	23.519.600	24,04
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			
Angka harapan hidup (tahun)			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	532.413.352.633	499.758.761.157	93,87
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.931.120	423.749.500	93,97
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	243.003.213.926	232.534.253.213	95,69
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	113.475.000	107.281.000	94,54
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	968.448.000	880.620.600	90,93
Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.962.715.482	15.144.518.020	94,87
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.735.237.720	7.387.287.000	95,50
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.727.388.860	73.646.532.575	98,55
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	5.865.107.864	5.305.296.792	90,46
Peningkatan Pelayanan BLUD	183.586.834.661	163.835.104.782	89,24
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	277.214.016.427	268.040.327.877	96,69
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	92.255.108.923	88.289.641.466	95,70
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180.812.614.149	176.355.597.936	97,54
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.137.783.680	704.875.000	61,95
Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.008.509.675	2.690.213.475	89,42
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	4.910.557.662	4.716.691.297	96,05
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	59.480.000	59.185.000	99,50
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.476.000.968	1.424.008.176	96,48

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.375.076.694	3.233.498.121	95,81
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	709.129.000	609.499.200	85,95
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	103.812.000	103.256.000	99,46
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	4.500.000	4.500.000	100,00
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	232.465.000	219.540.000	94,44
Penerbitan Sertifikat Laik <i>Higiene</i> Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	84.420.000	83.920.000	99,41
Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	36.100.000	36.100.000	100,00
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	247.832.000	162.183.200	65,44
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.406.474.700	15.036.658.870	97,60
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.274.580.900	1.266.024.200	99,33
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	351.162.000	344.166.000	98,01
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.780.731.800	13.426.468.670	97,43
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.073.279.816	15.428.376.234	95,99
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	196.110.000	98,06
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.826.906.678	10.287.680.442	95,02
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.512.986.549	1.512.035.484	99,94
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.340.500	94.644.500	98,24
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.869.774.396	2.800.859.528	97,60
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	567.271.693	537.046.280	94,67
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	419.050.322	414.715.600	98,97
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabag Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	81.415.540	79.412.600	97,54
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	88.407.575	88.052.000	99,60

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	133.501.000	133.501.000	100,00
Penerapan dan Pengawasan Pesyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat veteriner	115.726.207	113.750.000	98,29
Meningkatkan kesejahteraan keluarga			
Indeks pembangunan keluarga (Predikat)			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.753.092.308	14.228.728.978	96,45
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	308.768.869	265.843.200	86,10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.196.121.029	7.963.383.984	97,16
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	19.510.000	18.978.000	97,27
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.321.166.740	1.278.823.838	96,80
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	308.572.800	280.620.000	90,94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.543.326.800	3.460.409.706	97,66
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1.055.626.070	960.670.250	91,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	362.662.000	359.362.000	99,09
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	71.342.000	68.042.000	95,37
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	291.320.000	291.320.000	100,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.240.170.000	2.146.504.900	95,82
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	640.300.000	600.456.400	93,78
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	229.063.000	229.063.000	100,00
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.046.057.000	995.036.500	95,12
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	324.750.000	321.949.000	99,14
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	6.965.485.320	6.963.054.320	99,97
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.965.485.320	6.963.054.320	99,97
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	68.000.000	68.000.000	100,00
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	68.000.000	68.000.000	100,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.326.437.149	1.307.918.700	98,60
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	465.506.730	460.037.500	98,83

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pangan			
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	122.525.000	122.525.000	100,00
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	738.405.419	725.356.200	98,23
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	340.098.560	335.350.000	98,60
Penyusutan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	45.000.000	44.950.000	99,89
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	295.098.560	290.400.000	98,41
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	177.946.300	176.698.000	99,30
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	177.946.300	176.698.000	99,30
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.863.783.146	13.293.990.268	95,89
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	253.297.000	231.630.000	91,45
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.444.870.708	7.269.546.455	97,65
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	291.896.000	273.345.500	93,64
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.276.539.995	1.172.664.758	91,86
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	817.740.320	763.325.200	93,35
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.154.174.123	3.032.565.755	96,14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	625.265.000	550.912.600	88,11
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	748.986.790	575.802.755	76,88
Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah	28.774.500	22.770.400	79,13
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	720.212.290	553.032.355	76,79
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.170.879.930	1.056.147.200	90,20
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	998.214.230	901.559.700	90,32
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	172.665.700	154.587.500	89,53
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	394.021.000	315.152.500	79,98
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	42.893.000	42.793.000	99,77
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	351.128.000	272.359.500	77,57
Meningkatkan daya saing pemuda			
Indeks pembangunan pemuda (Poin)			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.939.426.121	18.112.555.000	95,63
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275.584.389	273.981.290	99,42
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.247.820.367	8.500.399.372	91,92
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	15.000.000	14.883.410	99,22
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.846.790.255	1.844.611.770	99,88
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	302.913.790	302.913.790	100,00

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Urusan Pemerintah Daerah			
Administrasi Pendapatan Daerah			
Kewenangan Perangkat Daerah	15.000.000	12.078.480	80,52
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.848.211.720	6.775.631.388	98,94
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	388.105.600	388.055.500	99,99
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.101.500.000	1.090.077.710	98,96
Penyadaran pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan pemuda Kader Kabupaten/Kota	923.500.000	913.477.790	98,91
Pemberdayaan dan pengembangan Organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	178.000.000	176.599.920	99,21
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	27.754.814.186	25.758.109.866	92,81
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.180.364.456	3.028.988.720	95,24
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	633.278.000	606.211.960	95,73
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3.628.550.000	3.622.625.000	99,84
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	17.030.000.000	15.308.540.769	89,89
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3.282.621.730	3.191.743.417	97,23
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	991.500.000	990.774.459	99,93
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	991.500.000	990.774.459	99,93
Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender			
Indeks pembangunan gender (Poin)			
Indeks pemberdayaan gender (Poin)			
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.244.315.000	1.243.286.000	99,92
Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	57.280.000	57.280.000	100,00
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.187.035.000	1.186.006.000	99,91
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	601.607.300	588.315.759	97,79
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	260.837.000	257.613.000	98,76
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	340.770.300	330.702.759	97,05
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.918.140.000	1.870.656.000	97,52
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Kg) dan Hak Anak Tingka Daerah Kabupaten/Kota	1.680.763.000	1.641.603.000	97,67

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kg dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	237.377.000	229.053.000	96,49
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	25.040.000	24.910.000	99,48
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.040.000	24.910.000	99,48
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	298.224.200	291.874.200	97,87
Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	283.458.000	277.608.000	97,94
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14.766.200	14.266.200	96,61
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	763.560.460	718.468.560	94,09
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	90.514.000	90.400.000	99,87
Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	444.172.460	407.375.060	91,72
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	228.874.000	220.693.500	96,43
Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi			
Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar (Poin)	406.778.761.762	395.265.886.490	97,17
Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan			
Rasio konektivitas kota (Rasio)			
Kinerja lalu lintas/transportasi kota (v/c ratio)			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.765.717.705	33.729.828.040	97,02
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	241.006.000	237.062.300	98,36
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.165.001.492	10.651.036.219	95,40
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.500.000	87.220.000	98,55
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.103.803.108	2.036.523.130	96,80
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.071.939.183	17.905.818.464	99,08
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3.095.467.922	2.812.167.927	90,85
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	87.682.035.256	83.334.293.118	95,04
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	311.558.350	270.379.060	86,78
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	79.513.016.170	75.787.413.003	95,31
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	538.363.610	506.334.805	94,05
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	492.961.592	342.273.000	69,43
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	533.443.812	497.493.250	93,26
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.221.092.707	2.996.203.440	93,02

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Kabupaten/Kota	66.459.820	66.004.000	99,31
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.746.839.096	2.639.008.370	96,07
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000	156.747.120	87,08
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	78.300.099	72.437.070	92,51
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.403.774.237	75.164.269.131	95,87
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	706.587.725	666.051.725	94,26
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.077.789.595	12.375.998.584	94,63
Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.995.233.984	7.573.635.861	94,73
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.484.677.700	1.395.123.930	93,97
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.748.480.692	19.641.870.002	94,67
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2.069.865.060	1.987.887.236	96,04
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	205.927.234.564	203.037.496.201	98,60
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	205.927.234.564	203.037.496.201	98,60
Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni			
Indeks kota layak huni (Poin)	1.584.418.066.140	1.556.804.154.575	98,26
Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan			
Indeks kualitas lingkungan hidup (Poin)			
Persentase permukiman layak huni (persen)			
Cakupan pengelolaan sampah (persen)			
Ruang terbuka hijau publik (persen)			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17.196.517.861	16.903.810.510	98,30
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	17.196.517.861	16.903.810.510	98,30
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	24.004.116.170	23.835.362.350	99,30
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.004.116.170	23.835.362.350	99,30
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	404.332.375.244	400.761.068.952	99,12
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	404.332.375.244	400.761.068.952	99,12
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	454.645.025	382.828.000	84,20
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	454.645.025	382.828.000	84,20
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.033.014.080	1.993.963.170	98,08
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	612.642.000	591.960.400	96,62
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	750.496.700	746.164.710	99,42

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	669.875.380	655.838.060	97,90
PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG	2.694.886.550	2.409.139.600	89,40
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.142.526.050	1.140.918.000	99,86
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	419.870.300	351.265.000	83,66
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	841.747.700	837.914.200	99,54
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	290.742.500	79.042.400	27,19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.607.445.542	31.058.669.094	98,26
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	333.901.199	322.077.800	96,46
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.110.199.863	11.851.592.655	97,86
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	257.000.000	145.552.900	56,64
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.900.485.434	1.799.670.421	94,70
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.577.671.116	48.226.452.221	99,28
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	6.088.699.142	5.765.902.800	94,70
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.360.103.520	2.305.131.000	97,67
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	447.243.120	446.168.000	99,76
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.316.517.600	1.307.546.200	99,32
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	213.372.000	208.613.000	97,77
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	382.970.800	342.803.800	89,51
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	46.434.838.293	46.286.026.481	99,68
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	402.875.000	373.650.000	92,75
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	46.031.963.293	45.912.376.481	99,74
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	37.521.397.969	37.377.978.809	99,62
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	37.521.397.969	37.377.978.809	99,62
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	238.206.012.899	237.425.538.542	99,67
Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan (PSU)	238.206.012.899	237.425.538.542	99,67
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.376.436.754	68.215.567.769	98,33
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	333.901.199	322.077.800	96,46
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.110.199.863	11.851.592.655	97,86
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	257.000.000	145.552.900	56,64

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.900.485.434	1.799.670.421	94,70
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.577.671.116	48.226.452.221	99,28
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	6.088.699.142	5.765.902.800	94,70
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.757.480.634	1.744.236.750	99,25
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1.061.447.024	1.051.796.300	99,09
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	696.033.610	692.440.450	99,48
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.723.706.784	1.699.007.638	98,57
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.723.706.784	1.699.007.638	98,57
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	22.506.548.182	21.776.228.089	96,76
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	22.506.548.182	21.776.228.089	96,76
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	233.729.750	229.994.250	98,40
Penyimpanan Sementara Limbah B3	233.729.750	229.994.250	98,40
PROGRAM DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	226.274.550	215.934.330	95,43
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	226.274.550	215.934.330	95,43
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	171.597.787	166.987.000	97,31
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.597.787	166.987.000	97,31
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	545.218.112	527.995.000	96,84
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	545.218.112	527.995.000	96,84
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	342.084.550	321.404.550	93,95
Penyelesaian Pengduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	342.084.550	321.404.550	93,95
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	111.397.331.557	110.089.780.947	98,83
Pengelolaan Sampah	111.397.331.557	110.089.780.947	98,83
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	186.487.000	181.476.000	97,31
Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	186.487.000	181.476.000	97,31
PROGRAM PENGELOLAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	295.480.266	266.575.965	90,22
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	295.480.266	266.575.965	90,22

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik serta wawasan kebangsaan			
Indeks rasa aman (predikat)			
Indeks demokrasi (predikat)			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.706.053.560	42.740.536.584	95,60
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	201.149.820	182.646.080	90,80
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.856.909.646	8.347.794.938	94,25
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	787.184.407	758.523.143	96,36
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.768.999.542	12.740.259.889	99,77
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1.258.034.224	1.241.532.000	98,69
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.683.476.040	2.543.313.670	94,78
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.816.297.180	1.751.046.780	96,41
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	813.997.170	740.626.540	90,99
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	53.181.690	51.640.350	97,10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	167.894.993.446	159.924.541.338	95,25
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.251.884.272	1.185.175.640	94,67
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91.864.882.166	88.143.547.126	95,95
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	42.043.800	40.143.980	95,48
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.190.854.430	986.879.580	82,87
Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.645.914.655	8.367.661.802	86,75
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.273.733.087	2.972.221.900	90,79
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.531.103.195	55.897.922.410	97,16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3.094.577.841	2.469.482.900	79,80
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.368.872.470	3.644.402.100	83,42
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.748.580.030	3.069.105.400	81,87
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	770.292.440	725.109.200	94,13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.074.200.516	9.845.953.680	97,73
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	259.752.950	246.986.550	95,09
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.831.563.516	5.804.368.622	99,53
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.408.550	29.070.960	82,10
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.374.831.680	1.262.090.994	91,80
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	325.070.000	325.016.500	99,98
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.706.568.520	1.652.460.554	96,83

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	541.005.300	525.959.500	97,22
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.970.960.030	2.738.309.600	92,17
Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.970.960.030	2.738.309.600	92,17
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	51.228.784.541	50.803.402.995	99,17
Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	51.228.784.541	50.803.402.995	99,17
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	508.850.536	423.158.350	83,16
Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	508.850.536	423.158.350	83,16
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	984.494.100	941.039.776	95,59
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	984.494.100	941.039.776	95,59
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	759.868.400	699.166.400	92,01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	759.868.400	699.166.400	92,01
Meningkatkan pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam			
Indeks resiko bencana (Predikat)			
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	147.718.120.509	143.695.147.579	97,28
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	147.718.120.509	143.695.147.579	97,28
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	103.290.696.530	102.144.797.602	98,89
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	103.290.696.530	102.144.797.602	98,89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.248.680.542	9.628.010.923	93,94
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	291.459.260	281.788.900	96,68
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.476.401.292	5.476.401.292	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	862.973.150	850.382.717	98,54
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	2.822.018.020	2.699.072.434	95,64

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pemerintahan Daerah			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	795.828.820	744.346.600	93,53
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.138.960.179	3.989.525.000	96,39
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	361.039.400	361.029.400	100,00
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	861.749.679	816.729.700	94,78
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.467.957.000	2.466.997.000	99,96
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	448.214.100	344.768.900	76,92
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	12.880.234.529	12.879.427.160	99,99
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.539.893.360	12.539.893.360	100,00
Inspeksi Peralatan proteksi Kebakaran	100.000.000	99.650.000	99,65
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	240.341.169	239.883.800	99,81
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.353.091.133	3.988.717.022	91,63
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	4.234.932.933	3.920.579.222	92,58
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	118.158.200	68.137.800	57,67
Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah			
Indeks Daya Saing Daerah (predikat)	106.939.836.667	104.165.776.273	97,41
Meningkatkan sektor ekonomi kreatif			
Nilai sektor ekonomi kreatif (triliun rupiah)			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.793.035.332	14.157.130.802	95,70
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275.000.000	232.927.590	84,70
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.404.844.438	8.032.106.014	95,57
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.554.403.255	1.450.932.540	93,34
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	332.692.600	318.000.000	95,58
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.721.262.212	3.652.497.518	98,15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	479.185.827	445.037.140	92,87
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	229.232.810	225.230.610	98,25
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	167.269.200	163.267.000	97,61
Penerbitan Izin Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Kopeasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	61.963.610	61.963.610	100,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	100.000.000	74.853.800	74,85

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	74.853.800	74,85
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100.000.000	71.435.640	71,44
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	71.435.640	71,44
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	227.312.810	207.890.520	91,46
Pendidikan dan Latihan perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	227.312.810	207.890.520	91,46
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	562.299.300	553.657.170	98,46
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	562.299.300	553.657.170	98,46
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.064.471.150	1.021.524.210	95,97
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.064.471.150	1.021.524.210	95,97
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.229.661.610	1.203.525.620	97,87
Pemberdayaan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.229.661.610	1.203.525.620	97,87
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.798.379.525	10.563.066.289	97,82
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	265.130.140	264.495.000	99,76
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.175.408.143	5.980.882.655	96,85
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	16.922.600	16.911.600	99,93
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	184.456.500	182.708.014	99,05
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.162.272.552	1.156.724.000	99,52
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	343.113.850	343.104.350	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.282.800.240	2.275.378.870	99,67
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	368.275.500	342.861.800	93,10
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.340.753.120	2.268.032.800	96,89
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2.268.032.800	2.268.032.800	100,00
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	82.700.000	76.950.000	93,05
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	530.838.800	495.544.600	93,35
Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	530.838.800	495.544.600	93,35

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	140.962.200	139.332.800	98,84
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai ruang Berekspresi, Berpromosi dan berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	69.773.200	68.943.800	98,81
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif&NBSP	71.189.000	70.389.000	98,88
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.143.913.400	2.099.665.500	97,94
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.953.913.400	1.911.579.200	97,83
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	190.000.000	188.086.300	98,99
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.443.433.443	1.359.453.780	94,18
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	1.205.420.563	1.136.503.940	94,28
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	238.012.880	222.949.840	93,67
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	732.964.122	731.152.200	99,75
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	39.412.197	39.004.700	98,97
Penyediaan dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	693.551.925	692.147.500	99,80
Meningkatkan Investasi			
Nilai investasi tahunan (triliun rupiah)			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.580.180.072	28.186.843.010	98,62
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	201.800.450	200.092.450	99,15
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.004.877.548	17.783.328.118	98,77
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.289.000	31.289.000	100,00
Administasi Umum Perangkat Daerah	1.601.483.435	1.587.977.324	99,16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.306.134.839	7.203.021.818	98,59
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1.434.594.800	1.381.134.300	96,27
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	133.715.350	127.797.000	95,57
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	53.715.350	49.295.000	91,77
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	80.000.000	78.502.000	98,13
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	932.844.800	927.008.000	99,37
Penyelenggaraan Promosi penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	932.844.800	927.008.000	99,37
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	690.947.750	669.364.546	96,88
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	690.947.750	669.364.546	96,88
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	457.630.000	446.804.075	97,63

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
PENANAMAN MODAL			
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	457.630.000	446.804.075	97,63
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50.000.000	47.810.000	95,62
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	47.810.000	95,62
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.813.673.212	15.389.615.040	97,32
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.542.600	156.821.400	99,54
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.771.434.343	9.430.125.799	96,51
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2.100.000	2.100.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.001.000	9.900.000	70,71
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.588.924.110	1.561.821.028	98,29
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.300.000	163.300.000	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.588.861.160	3.579.517.140	99,74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	527.510.000	486.029.673	92,14
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	98.240.521	94.415.000	96,11
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	68.640.521	65.130.000	94,89
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	13.600.000	13.285.000	97,68
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan pengawasan Distribusi, Pengemasan dan pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.000.000	16.000.000	100,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.686.130.964	1.608.493.153	95,40
Pembangunan dan Pengelolaan Saran Distribusi Perdagangan	102.283.132	96.707.700	94,55
Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1.583.847.832	1.511.785.453	95,45
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	379.182.602	367.361.840	96,88
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.847.402	68.396.640	99,35
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar kabupaten/Kota	308.335.200	296.965.200	96,31
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000	2.000.000	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	396.633.860	355.854.400	89,72
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang terdapat Pada1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	396.633.860	355.854.400	89,72
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	157.852.600	154.241.000	97,71
Pelaksanaan Meterologi Legal, Berupa Tera,	157.852.600	154.241.000	97,71

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Tera Ulang, dan Pengawasan			
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	108.265.840	102.756.400	94,91
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	108.265.840	102.756.400	94,91
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.257.519.339	2.159.459.300	95,66
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan industri Kabupaten/Kota	2.257.519.339	2.159.459.300	95,66
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	15.763.800	15.763.800	100,00
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Peluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	15.763.800	15.763.800	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	129.478.800	128.511.800	99,25
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	129.478.800	128.511.800	99,25
Meningkatkan produktivitas tenaga kerja			
Produktivitas tenaga kerja per total output (rupiah)			
Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa (Rupiah)			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.520.676.817	11.280.881.668	97,92
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235.294.250	179.992.100	76,50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.580.660.123	7.443.292.832	98,19
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.440.000	21.440.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	949.657.950	938.025.112	98,78
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.248.014.000	2.240.378.330	99,66
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	485.610.494	485.610.494	100,00
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	25.000.000	20.850.000	83,40
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	25.000.000	20.850.000	83,40
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.899.732.500	2.869.880.600	98,97
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	2.831.064.200	2.802.944.200	99,01
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	6.300.000	6.300.000	100,00
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	7.500.000	7.500.000	100,00
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	46.768.300	45.036.400	96,30
pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.100.000	8.100.000	100,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	803.740.000	788.615.000	98,12
Pelayanan Antar Kabupaten/Kota	723.289.000	714.749.000	98,82
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.038.000	18.038.000	94,75
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	27.100.000	21.800.000	80,44
Perlindungan PMI (Pra dan purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	34.313.000	34.028.000	99,17
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	812.334.000	778.225.000	95,80

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	427.356.000	414.147.000	96,91
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	384.978.000	364.078.000	94,57
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.294.784.384	1.263.869.800	97,61
Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian	951.063.644	923.043.300	97,05
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	58.126.500	58.126.500	100,00
Penyediaan Bernih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	285.594.240	282.700.000	98,99
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.258.251.834	1.209.859.500	96,15
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.258.251.834	1.209.859.500	96,15
Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien			
Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	847.096.741.149	793.105.471.908	93,63
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah			
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)			
Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Poin)			
Opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah (Predikat)			
Indeks persepsi korupsi/ survey penilaian integritas dikeluarkan oleh KPK RI (Poin)			
Indeks kepuasan masyarakat (Poin)			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.884.729.276	25.654.339.678	99,11
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	294.861.200	294.093.200	99,74
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.682.574.127	9.603.812.063	99,19
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.470.000	93.620.000	98,06
Administasi Umum Perangkat Daerah	6.279.838.300	6.230.725.038	99,22
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.941.293.700	8.861.522.577	99,11
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	590.691.949	570.566.800	96,59
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	292.510.000	288.195.600	98,53
Pelayanan pendaftaran Penduduk	150.000.000	148.731.000	99,15
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	142.510.000	139.464.600	97,86
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	148.000.000	145.091.000	98,03
Pelayanan Pencatatan Sipil	75.000.000	74.991.000	99,99
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	73.000.000	70.100.000	96,03
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	296.922.400	288.473.600	97,15
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100.000.000	100.000.000	100,00
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	146.922.400	138.473.600	94,25
Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	50.000.000	50.000.000	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	10.000.000	9.952.000	99,52
Penyusunan Profil Kependudukan	10.000.000	9.952.000	99,52
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.600.957.287	15.972.487.298	96,21

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.154.000	217.172.000	98,65
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.987.879.717	8.737.187.808	97,21
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.500.000	21.869.500	51,46
Administasi Umum Perangkat Daerah	2.279.981.610	2.133.044.728	93,56
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.226.535.760	4.125.059.320	97,60
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	843.906.200	738.153.942	87,47
PROGRAM PENGELOLAAN INFOMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	16.040.950.000	15.925.307.740	99,28
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.040.950.000	15.925.307.740	99,28
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	47.939.135.728	47.482.079.000	99,05
Pengelolaan nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	46.025.670.728	45.645.632.600	99,17
Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemeirntah Daerah Kabupaten/Kota	1.913.465.000	1.836.446.400	95,97
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	243.062.400	242.757.400	99,87
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	408.685.000	404.652.900	99,01
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	408.685.000	404.652.900	99,01
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	924.129.480	883.361.280	95,59
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	606.708.000	568.649.000	93,73
Pembudayaan gemer Mambaca Tingkat Kabupaten/Kota	317.421.480	314.712.280	99,15
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.057.815.000	1.048.514.000	99,12
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	44.720.000	44.720.000	100,00
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	905.634.000	898.434.000	99,20
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	107.461.000	105.360.000	98,04
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	40.003.000	40.003.000	100,00
Pemusnahan Arsip Di Lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	40.003.000	40.003.000	100,00
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	64.440.000	64.440.000	100,00
Pelayanan Izin penggunaan Arsip Yang Bersifat tertutup di Kabupaten/Kota	64.440.000	64.440.000	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.311.198.791	148.267.304.161	95,46
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	510.565.800	498.805.800	97,70
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.330.397.917	31.888.708.777	95,67
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.035.091.500	1.997.904.427	98,17
Administasi Umum Perangkat Daerah	13.089.346.865	12.713.811.332	97,13
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.200.485.208	16.673.218.905	96,93
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	44.088.506.324	42.039.588.018	95,35

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pemerintahan Daerah			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	13.103.821.826	11.926.003.436	91,01
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.772.246.599	4.944.313.007	85,66
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	21.818.148.450	21.492.346.532	98,51
Penataan organisasi	911.874.502	859.176.300	94,22
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.450.713.800	3.233.427.627	93,70
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	46.511.563.376	44.665.456.721	96,03
Administrasi Pemerintahan	3.167.174.410	2.524.061.400	79,69
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	37.519.047.466	37.064.199.546	98,79
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	5.364.167.500	5.364.167.500	100,00
Fasilitasi kerja sama Daerah	461.174.000	379.211.775	82,23
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	6.459.256.339	5.208.034.440	80,63
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	2.867.650.000	1.817.287.000	63,37
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	2.262.878.440	2.165.542.440	95,70
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	1.328.727.899	1.225.205.000	92,21
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.315.509.018	86.379.860.363	97,81
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	257.831.500	235.149.000	91,20
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.906.594.290	9.674.667.137	97,66
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	50.000.000	3.600.000	7,20
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	196.005.683	187.545.000	95,68
Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.002.639.376	13.002.639.376	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	483.455.020	435.105.200	90,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.108.793.566	11.877.877.264	98,09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	5.309.521.651	5.210.486.570	98,13
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	45.237.244.412	44.837.434.943	99,12
Layanan Administrasi DPRD	1.763.423.520	1.333.596.900	75,63
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	54.633.439.898	41.824.014.978	76,55
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	619.774.000	437.986.500	70,67
Pembahasan Kebijakan Anggaran	460.996.000	349.753.400	75,87
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.038.001.920	783.305.880	75,46
Peningkatan Kapasitas DPRD	8.718.431.618	7.884.959.261	90,44
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.514.620.400	162.199.100	6,45
Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	102.650.000	56.790.000	55,32
Pembahasan Kerja Sama Daerah	20.916.000		0,00
Fasilitasi Tugas DPRD	41.158.049.960	32.149.020.837	78,11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.521.036.572	24.084.747.224	94,37
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	213.121.000	143.056.000	67,12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.915.145.278	16.195.261.488	95,74
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	464.258.250	355.343.290	76,54
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.135.695.101	2.787.846.072	88,91

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.000.000	175.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.508.171.850	3.380.206.029	96,35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1.109.645.093	1.048.034.345	94,45
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.325.014.500	4.016.174.392	92,86
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3.198.208.800	3.136.744.392	98,08
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	420.000.000	295.160.000	70,28
Pengendalian, Evasluasi dan pelaporan Bidang Perencanan Pembangunan Daerah	706.805.700	584.270.000	82,66
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.044.040.000	2.743.697.858	90,13
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.600.000.000	1.563.664.358	97,73
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonmian dan SDA (Sumber Daya Alam)	563.000.000	477.569.000	84,83
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	881.040.000	702.464.500	79,73
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	104.287.989.019	96.906.321.982	92,92
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	329.465.722	317.809.850	96,46
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.443.046.432	19.573.803.342	83,50
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	25.932.600	25.885.240	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	441.280.000	383.355.500	86,87
Administasi Umum Perangkat Daerah	3.560.608.475	3.281.264.492	92,15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.022.943.360	4.543.721.069	90,46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	848.255.000	657.275.840	77,49
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.839.508.274	6.402.622.214	65,07
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.595.867.455	2.514.857.620	96,88
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.530.490.730	1.336.413.730	87,32
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.113.067.910	1.053.853.570	94,68
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.600.082.179	1.497.497.294	32,55
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.220.699.634	4.728.019.432	90,56
Pengeolaan Barang Milik Daerah	5.220.699.634	4.728.019.432	90,56
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.716.533.919	9.387.548.000	96,61
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.716.533.919	9.387.548.000	96,61
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.670.374.946	24.149.541.580	97,89
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.012.085	103.042.000	98,12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.122.122.917	18.782.096.163	98,22
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.176.000	17.196.000	85,23
Administasi Umum Perangkat Daerah	1.334.795.380	1.317.508.928	98,70

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	371.737.154	353.329.557	95,05
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.278.053.480	3.172.626.922	96,78
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	438.477.930	403.742.010	92,08
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.848.555.410	3.814.454.585	99,11
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.214.854.010	1.214.771.710	99,99
Mutasi dan Promosi ASN	600.678.410	598.250.225	99,60
Pengembangan Kompetensi ASN	1.560.268.550	1.538.394.850	98,60
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	472.754.440	463.037.800	97,94
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.574.039.150	3.513.210.000	98,30
Pengembangan Kompetensi Teknis	1.055.784.000	1.028.185.000	97,39
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.518.255.150	2.485.025.000	98,68
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.669.590.000	1.561.259.900	93,51
Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian Peraturan	576.845.000	535.578.000	92,85
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	112.305.000	98.765.000	87,94
Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan	427.960.000	416.563.000	97,34
Pengembangan Inovasi dan teknologi	552.480.000	510.353.900	92,38
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.786.774.970	34.380.002.468	98,83
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.187.900	10.766.000	59,19
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.878.111.355	29.779.096.259	99,67
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	475.000	475.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	439.546.000	396.720.000	90,26
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.456.472.745	1.365.349.576	93,74
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.938.300	125.800.000	96,08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.934.933.670	1.823.114.033	94,22
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	928.110.000	878.681.600	94,67
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	721.370.650	700.917.600	97,16
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	709.979.250	691.665.600	97,42
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	11.391.400	9.252.000	81,22
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	475.018.768	447.456.000	94,20
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	257.835.808	238.574.400	92,53
Pendampingan dan Asistensi	217.182.960	208.881.600	96,18
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	81.085.073.965	78.620.623.396	96,96
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.000.000	40.000.000	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	62.745.389.819	60.520.539.866	96,45

Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	18.299.684.146	18.060.083.530	98,69
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	68.287.212.994	58.281.849.891	85,35
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	32.513.579.980	28.914.771.836	88,93
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	35.317.019.674	31.149.276.707	88,20
PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.841.601.385	4.572.700.227	94,45
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.841.601.385	4.572.700.227	94,45
Total	4.761.432.017.480	4.605.246.008.601	96,72

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (LRA 31 Desember 2024), Hasil Analisis Tahun 2024

3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

3.3.1 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mencapai kinerja, Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak dapat dilepaskan dari segi anggaran, berdasarkan realisasi per 31 Desember 2024 maka dapat didapatkan efisiensi maupun kualitas pelaksanaan anggaran seperti yang tertera pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024, adapun realisasi anggaran sebagai berikut.

Tabel 3.59 Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran			Efisiensi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Dan Akses Pendidikan					
	Program Pengelolaan Pendidikan	303.551.487.598	299.974.568.549	98,82	3.576.919.049	1,18
	Program Pengembangan Kurikulum	313.730.000	289.114.000	92,15	24.616.000	7,85
		70.528.292.090	67.940.215.440	96,33	2.588.076.650	3,67
	Program Pengembangan Kebudayaan	892.138.140	756.436.973	84,79	135.701.167	15,21
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	797.356.854	717.476.640	89,98	79.880.214	10,02
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar budaya	165.556.000	57.250.600	34,58	108.305.400	65,42
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat					
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	277.214.016.427	268.040.327.877	96,69	9.173.688.550	3,31
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.910.557.662	4.716.691.297	96,05	193.866.365	3,95
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	709.129.000	609.499.200	85,95	99.629.800	14,05
	Program Pemberdayaan	15.406.474.700	15.036.658.870	97,60	369.815.830	2,40

No	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran			Efisiensi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
	Masyarakat Bidang Kesehatan					
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	419.050.322	414.715.600	98,97	4.334.722	1,03
3	Meningkatkan kesejahteraan keluarga					
	Program Pengendalian Penduduk	362.662.000	359.362.000	99,09	3.300.000	0,91
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.240.170.000	2.146.504.900	95,82	93.665.100	4,18
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.965.485.320	6.963.054.320	99,97	2.431.000	0,03
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	68.000.000	68.000.000	100,00	0	0,00
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.326.437.149	1.307.918.700	98,60	18.518.449	1,40
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	340.098.560	335.350.000	98,60	4.748.560	1,40
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	177.946.300	176.698.000	99,30	1.248.300	0,70
	Program Pemberdayaan Sosial	748.986.790	575.802.755	76,88	173.184.035	23,12
	Program Rehabilitasi Sosial	1.170.879.930	1.056.147.200	90,20	114.732.730	9,80
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	394.021.000	315.152.500	79,98	78.868.500	20,02
4	Meningkatkan daya saing pemuda					
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.101.500.000	1.090.077.710	98,96	11.422.290	1,04
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	27.754.814.186	25.758.109.866	92,81	1.996.704.320	7,19
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	991.500.000	990.774.459	99,93	725.541	0,07
5	Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender					
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	1.244.315.000	1.243.286.000	99,92	1.029.000	0,08

No	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran			Efisiensi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
	Perempuan					
	Program Perlindungan Perempuan	601.607.300	588.315.759	97,79	13.291.541	2,21
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.918.140.000	1.870.656.000	97,52	47.484.000	2,48
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	25.040.000	24.910.000	99,48	130.000	0,52
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	298.224.200	291.874.200	97,87	6.350.000	2,13
	Program Perlindungan Khusus Anak	763.560.460	718.468.560	94,09	45.091.900	5,91
6	Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan					
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	87.682.035.256	83.334.293.118	95,04	4.347.742.138	4,96
	Program Penyelenggaraan Jalan	205.927.234.564	203.037.496.201	98,60	2.889.738.363	1,40
7	Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan					
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.196.517.861	16.903.810.510	98,30	292.707.351	1,70
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	24.004.116.170	23.835.362.350	99,30	168.753.820	0,70
	Program Penataan Bangunan Gedung	404.332.375.244	400.761.068.952	99,12	3.571.306.292	0,88
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	454.645.025	382.828.000	84,20	71.817.025	15,80
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.033.014.080	1.993.963.170	98,08	39.050.910	1,92
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.694.886.550	2.409.139.600	89,40	285.746.950	10,60
	Program Pengembangan Perumahan	2.360.103.520	2.305.131.000	97,67	54.972.520	2,33
	Program Kawasan Permukiman	46.434.838.293	46.286.026.481	99,68	148.811.812	0,32
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	37.521.397.969	37.377.978.809	99,62	143.419.160	0,38
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	238.206.012.899	237.425.538.542	99,67	780.474.357	0,33
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.757.480.634	1.744.236.750	99,25	13.243.884	0,75

No	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran			Efisiensi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.723.706.784	1.699.007.638	98,57	24.699.146	1,43
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	22.506.548.182	21.776.228.089	96,76	730.320.093	3,24
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	233.729.750	229.994.250	98,40	3.735.500	1,60
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	226.274.550	215.934.330	95,43	10.340.220	4,57
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	171.597.787	166.987.000	97,31	4.610.787	2,69
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	545.218.112	527.995.000	96,84	17.223.112	3,16
	Program Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	342.084.550	321.404.550	93,95	20.680.000	6,05
	Program Pengelolaan Persampahan	111.397.331.557	110.089.780.947	98,83	1.307.550.610	1,17
	Program Penatagunaan Tanah	186.487.000	181.476.000	97,31	5.011.000	2,69
	Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	295.480.266	266.575.965	90,22	28.904.301	9,78
8	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umu, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan					
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.683.476.040	2.543.313.670	94,78	140.162.370	5,22
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.368.872.470	3.644.402.100	83,42	724.470.370	16,58
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	2.970.969.030	2.738.309.600,00	92,17	232.659.430	7,83
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan	51.228.784.541	50.803.402.995,00	99,17	425.381.546	0,83

No	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran			Efisiensi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
	Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	508.850.536	423.158.350	83,16	85.692.186	16,84
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	984.494.100	941.039.776	95,59	43.454.324	4,41
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	759.868.400	699.166.400	92,01	60.702.000	7,99
Meningkatkan pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam						
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	147.718.120.509	143.695.147.579	97,28	4.022.972.930	2,72
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	103.290.696.530	102.144.797.602	98,89	1.145.898.928	1,11
	Program Penanggulangan Bencana	4.138.960.179	3.989.525.000	96,39	149.435.179	3,61
	Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	12.880.234.529	12.879.427.160	99,99	807.369	0,01
	Program Penanganan Bencana	4.353.091.133	3.988.717.022	91,63	364.374.111	8,37
Meningkatkan Sektor Ekonomi Kreatif						
10	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	229.232.810	225.230.610	98,25	4.002.200	1,75
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100.000.000	74.853.800	74,85	25.146.200	25,15
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100.000.000	71.435.640	71,44	28.564.360	28,56
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	227.312.810	207.890.520	91,46	19.422.290	8,54
	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	562.299.300	553.657.170	98,46	8.642.130	1,54
	Program Pemberdayaan	1.064.471.150	1.021.524.210	95,97	42.946.940	4,03

No	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran			Efisiensi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
	Usaha Menengah. Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)					
	Program Pengembangan UMKM	1.229.661.610	1.203.525.620	97,87	26.135.990	2,13
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.340.753.120	2.268.032.800	96,89	72.720.320	3,11
	Program Pemasaran Pariwisata	530.838.800	495.544.600	93,35	35.294.200	6,65
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	140.962.200	139.332.800	98,84	1.629.400	1,16
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.143.913.400	2.099.665.500	97,94	44.247.900	2,06
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.443.433.443	1.359.453.780	94,18	83.979.663	5,82
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	732.964.122	731.152.200	99,75	1.811.922	0,25
11	Meningkatkan Investasi					
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	133.715.350	127.797.000	95,57	5.918.350	4,43
	Program Promosi Penanaman Modal	932.844.800	927.008.000	99,37	5.836.800	0,63
	Program Pelayanan Penanaman Modal	690.947.750	669.364.546	96,88	21.583.204	3,12
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	457.630.000	446.804.075	97,63	10.825.925	2,37
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	50.000.000	47.810.000	95,62	2.190.000	4,38
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	98.240.521	94.415.000	96,11	3.825.521	3,89
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.686.130.964	1.608.493.153	95,40	77.637.811	4,60
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	379.182.602	367.361.840	96,88	11.820.762	3,12
	Program Pengembangan Ekspor	396.633.860	355.854.400	89,72	40.779.460	10,28
	Program Standarisasi dan	157.852.600	154.241.000	97,71	3.611.600	2,29

No	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran			Efisiensi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
	Perlindungan Konsumen					
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	108.265.840	102.756.400	94,91	5.509.440	5,09
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.257.519.339	2.159.031.800	95,64	98.487.539	4,36
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	15.763.800	15.763.800	100,00	0	0,00
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	129.478.800	128.511.800	99,25	967.000	0,75
12	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja					
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	25.000.000	20.850.000	83,40	4.150.000	16,60
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.899.732.500	2.869.880.600	98,97	29.851.900	1,03
	Program Penempatan Tenaga Kerja	803.740.000	788.615.000	98,12	15.125.000	1,88
	Program Hubungan Industrial	812.334.000	778.225.000	95,80	34.109.000	4,20
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.294.784.384	1.263.869.800	97,61	30.914.584	2,39
	Program Penyuluhan Pertanian	1.258.251.834	1.209.859.500	96,15	48.392.334	3,85
13	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah					
	Program Pendaftaran Penduduk	292.510.000	288.195.600	98,53	4.314.400	1,47
	Program Pencatatan Sipil	148.000.000	145.091.000	98,03	2.909.000	1,97
	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	296.922.400	288.473.600	97,15	8.448.800	2,85
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	10.000.000	9.952.000	99,52	48.000	0,48
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	16.040.950.000	15.925.307.740	99,28	115.642.260	0,72
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	47.939.135.728	47.482.079.000	99,05	457.056.728	0,95
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	243.062.400	242.757.400	99,87	305.000	0,13
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	408.685.000	404.652.900	99,01	4.032.100	0,99
	Program Pembinaan Perpustakaan	924.129.480	883.361.280	95,59	40.768.200	4,41
	Program Pengelolaan	1.057.815.000	1.048.514.000	99,12	9.301.000	0,88

No	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran			Efisiensi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
	Arsip					
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	40.003.000	40.003.000	100,00	0	0,00
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	64.440.000	64.440.000	100,00	0	0,00
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	46.511.563.376	44.665.456.721	96,03	1.846.106.655	3,97
	Program Perekonomian dan Pembangunan	6.459.256.339	5.208.034.440	80,63	1.251.221.899	19,37
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	54.633.439.898	41.824.014.978	76,55	12.809.424.920	23,45
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.325.014.500	4.016.174.392	92,86	308.840.108	7,14
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.044.040.000	2.743.697.858	90,13	300.342.142	9,87
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	9.839.508.274	6.402.622.214	65,07	3.436.886.060	34,93
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.220.699.634	4.728.019.432	90,56	492.680.202	9,44
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.716.533.919	9.387.548.000	96,61	328.985.919	3,39
	Program Kepegawaian Daerah	3.848.555.410	3.814.454.585	99,11	34.100.825	0,89
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.574.039.150	3.513.210.000	98,30	60.829.150	1,70
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.669.590.000	1.561.259.900	93,51	108.330.100	6,49
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	721.370.650	700.917.600	97,16	20.453.050	2,84
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	475.018.768	447.456.000	94,20	27.562.768	5,80
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81.085.073.965	78.620.623.396	96,96	2.464.450.569	3,04
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	68.287.212.994	58.281.849.891	85,35	10.005.363.103	14,65
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.841.601.385	4.481.435.796	92,56	360.165.589	7,44

No	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran			Efisiensi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.100.045.917.386	2.021.058.154.594	96,24	78.987.762.792	3,76
Total		4.848.848.221.014	4.605.246.008.601	96,72	156.186.008.879	3,28

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (LRA 31 Desember 2024), Hasil Analisis Tahun 2024

3.3.2 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Kota Tangerang Selatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi anggaran. Pada tahun 2022 efisiensi anggaran Kota Tangerang Selatan adalah 91,56%, pada tahun 2023 efisiensi anggaran Kota Tangerang Selatan adalah 96,00% dan pada tahun 2024 efisiensi anggaran Kota Tangerang Selatan adalah 96,72%. Perbandingan capaian realisasi anggaran tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.60 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks pendidikan	%	Program Pengelolaan Pendidikan	266.170.598.844	260.203.983.693	97,76	317.269.496.142	311.230.510.403	98,10	303.551.487.598	299.974.568.549	98,82
				Program Pengembangan Kurikulum	-	-	-	990.808.200	957.077.200	96,60	313.730.000	289.114.000	92,15
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	99.081.297.144	97.327.031.410	98,23	82.074.246.536	79.703.723.870	97,11	70.528.292.090	67.940.215.440	96,33
				Program Pengembangan Kebudayaan	1.310.000.000	1.212.931.900	92,59	1.319.331.560	1.173.453.800	88,94	892.138.140	756.436.973	84,79
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.000.000.000	959.385.500	95,94	987.723.920	921.008.100	93,25	797.356.854	717.476.640	89,98
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	150.000.000	134.620.000	89,75	878.186.000	586.794.025	66,82	165.556.000	57.250.600	34,58
2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	248.246.773.683	224.520.899.796	90,44	307.484.926.039	288.209.302.220	93,73	277.214.016.427	268.040.327.877	96,69

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
3	Meningkatkan kesejahteraan keluarga	Indeks pembangunan keluarga	Predikat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	16.534.443.577	16.429.794.558	99,37	7.092.927.403	6.724.657.736	94,81	4.910.557.662	4.716.691.297	96,05
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	324.229.200	262.165.390	80,86	161.610.000	160.606.000	99,38	709.129.000	609.499.200	85,95
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	8.069.823.500	7.897.218.700	97,86	12.149.935.265	11.929.970.400	98,19	15.406.474.700	15.036.658.870	97,60
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	366.365.417	359.547.400	98,14	590.795.080	485.417.310	82,16	419.050.322	414.715.600	98,97
				Program Pengendalian Penduduk	357.025.970	340.529.200	95,38	367.019.000	364.719.000	99,37	362.662.000	359.362.000	99,09
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.911.172.000	1.612.073.451	55,38	4.989.305.600	4.458.895.700	89,37	2.240.170.000	2.146.504.900	95,82
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.375.441.000	5.210.791.000	70,65	7.136.571.000	7.037.586.000	98,61	6.965.485.320	6.963.054.320	99,97

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	190.445.000	157.669.000	82,79	123.983.580	123.839.900	99,88	68.000.000	68.000.000	100,00
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	780.145.000	753.742.250	96,62	1.001.337.050	994.509.100	99,32	1.326.437.149	1.307.918.700	98,60
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	355.950.000	318.938.000	89,60	158.387.090	155.311.300	98,06	340.098.560	335.350.000	98,60
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	134.495.000	131.278.590	97,61	203.436.000	200.685.500	98,65	177.946.300	176.698.000	99,30
				Program Pemberdayaan Sosial	5.617.495.650	4.667.025.050	83,08	1.733.969.063	1.635.989.780	94,35	748.986.790	575.802.755	76,88
				Program Rehabilitasi Sosial	769.809.329	722.382.009	93,84	1.142.151.478	1.022.793.540	89,55	1.170.879.930	1.056.147.200	90,20
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	634.798.900	601.398.400	94,74	337.337.370	252.711.670	74,91	394.021.000	315.152.500	79,98
4	Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks pembangunan pemuda	Poin	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.777.096.294	3.598.634.469	95,28	2.347.721.746	2.202.924.950	93,83	1.101.500.000	1.090.077.710	98,96

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	21.091.820.51 ₁	20.580.462.59 ₉	97,58	21.585.644.67 ₅	21.509.805.27 ₂	99,65	27.754.814.186	25.758.109.866	92,81
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	877.336.200	851.702.480	97,08	612.326.325	599.055.050	97,83	991.500.000	990.774.459	99,93
5	Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks pembangunan gender	Poin	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	952.385.590	944.044.990	99,12	663.596.000	660.590.500	99,55	1.244.315.000	1.243.286.000	99,92
		Indeks pemberdayaan gender	Poin	Program Perlindungan Perempuan	729.038.000	686.445.690	94,16	524.444.730	488.351.072	93,12	601.607.300	588.315.759	97,79
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.545.581.000	1.521.572.200	98,45	1.557.441.000	1.545.567.500	99,24	1.918.140.000	1.870.656.000	97,52
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	56.667.000	54.599.000	96,35	24.729.000	21.880.000	88,48	25.040.000	24.910.000	99,48
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	190.994.000	186.845.000	97,83	86.600.400	84.220.400	97,25	298.224.200	291.874.200	97,87
				Program Perlindungan Khusus Anak	516.642.000	495.305.000	95,87	628.918.790	590.808.410	93,94	763.560.460	718.468.560	94,09
6	Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan	Rasio konektivitas kota	Rasio	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	70.496.956.99 ₅	67.769.445.63 ₁	96,13	89.066.535.28 ₇	87.116.343.94 ₆	97,81	87.682.035.256	83.334.293.118	95,04

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
	perkotaan			Program Penyelenggaraan Jalan	219.088.890.141	188.891.998.542	86,22	212.794.637.450	207.050.463.575	97,30	205.927.234.564	203.037.496.201	98,60
7	Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.367.708.638	4.284.473.150	98,09	24.419.220.481	24.142.278.536	98,87	17.196.517.861	16.903.810.510	98,30
		Persentase pemukiman layak huni	%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.068.068.283	3.785.709.460	93,06	41.967.152.623	41.734.201.729	99,44	24.004.116.170	23.835.362.350	99,30
		Cakupan pengelolaan sampah	%	Program Penataan Bangunan Gedung	382.834.990.265	369.548.293.385	96,53	378.943.208.491	377.216.756.043	99,54	404.332.375.244	400.761.068.952	99,12
		Ruang terbuka hijau publik	%	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	9.661.762.324	9.658.297.000	99,96	6.875.388.072	6.874.879.000	99,99	454.645.025	382.828.000	84,20
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.930.346.550	1.536.838.250	79,61	1.845.760.600	1.729.254.600	93,69	2.033.014.080	1.993.963.170	98,08
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.012.000.000	2.139.605.500	71,04	2.325.011.360	2.305.538.300	99,16	2.694.886.550	2.409.139.600	89,40
				Program Pengembangan Perumahan	5.055.930.092	4.528.432.176	89,57	3.905.115.610	3.603.486.700	92,28	2.360.103.520	2.305.131.000	97,67
				Program Kawasan Permukiman	19.869.338.200	19.744.929.100	99,37	40.185.643.950	39.676.885.300	98,73	46.434.838.293	46.286.026.481	99,68

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	14.739.367.000	14.595.025.190	99,02	28.928.020.150	28.707.989.593	99,24	37.521.397.969	37.377.978.809	99,62
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	42.530.232.502	41.133.669.565	96,72	279.859.468.685	277.501.452.810	99,16	238.206.012.899	237.425.538.542	99,67
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	604.610.100	585.920.900	96,91	2.739.929.150	2.676.241.240	97,68	1.757.480.634	1.744.236.750	99,25
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.900.337.820	1.861.271.030	97,94	1.585.690.754	1.559.612.910	98,36	1.723.706.784	1.699.007.638	98,57
				Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	25.945.501.842	16.219.891.000	62,52	25.973.367.990	25.642.704.474	98,73	22.506.548.182	21.776.228.089	96,76
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	599.423.600	582.748.700	97,22	313.303.525	304.724.670	97,26	233.729.750	229.994.250	98,40

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	297.448.400	294.694.462	99,07	239.261.875	221.931.490	92,76	226.274.550	215.934.330	95,43
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	300.387.000	288.380.000	96,00	247.271.294	240.885.350	97,42	171.597.787	166.987.000	97,31
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	569.591.700	534.771.612	93,89	2.588.859.556	2.518.091.700	97,27	545.218.112	527.995.000	96,84
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	406.198.008	367.452.650	90,46	336.852.455	336.461.810	99,88	342.084.550	321.404.550	93,95
				Program Pengelolaan Persampahan	158.464.750.892	148.047.833.973	93,43	99.324.339.346	98.525.815.558	99,20	111.397.331.557	110.089.780.947	98,83
				Program Penatagunaan Tanah	67.608.971	57.832.800	85,54	143.699.840	137.820.240	95,91	186.487.000	181.476.000	97,31
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	242.839.324	230.235.040	94,81	282.290.630	256.131.580	90,73	295.480.266	266.575.965	90,22

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
8	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan	Indeks rasa aman	Predikat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.764.649.000	1.679.838.800	95,19	1.584.089.630	1.430.291.053	90,29	2.683.476.040	2.543.313.670	94,78
		Indeks demokrasi	Predikat	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	141.008.000	137.270.000	97,35	1.639.026.007	1.457.310.296	88,91	4.368.872.470	3.644.402.100	83,42
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	332.975.800	193.950.000	58,25	2.617.829.300	2.370.900.158	90,57	2.970.969.030	2.738.309.600,00	92,17
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.316.194.600	3.220.331.400	97,11	29.369.945.280	29.282.118.350	99,70	51.228.784.541	50.803.402.995	99,17
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	580.075.000	511.062.000	88,10	374.563.180	333.075.850	88,92	508.850.536	423.158.350	83,16

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
9	Meningkatkan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam	Indeks risiko bencana	Predikat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.163.313.000	529.986.000	45,56	1.210.941.480	1.124.757.095	92,88	984.494.100	941.039.776	95,59
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	933.448.000	791.812.000	84,83	1.092.626.438	853.357.980	78,10	759.868.400	699.166.400	92,01
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	108.377.241.594	91.916.684.825	84,81	150.444.182.678	149.254.753.885	99,21	147.718.120.509	143.695.147.579	97,28
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	175.076.379.489	173.115.672.395	98,88	81.543.588.450	80.144.644.034	98,28	103.290.696.530	102.144.797.602	98,89
9	Meningkatkan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam	Indeks risiko bencana	Predikat	Program Penanggulangan Bencana	5.847.438.272	5.176.916.430	88,53	2.993.334.329	2.918.174.955	97,49	4.138.960.179	3.989.525.000	96,39
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	12.011.117.000	11.962.559.400	99,60	14.719.384.915	14.576.894.520	99,03	12.880.234.529	12.879.427.160	99,99

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				Program Penanganan Bencana	3.997.601.100	3.761.374.200	94,09	3.907.460.800	3.311.511.400	84,75	4.353.091.133	3.988.717.022	91,63
10	Meningkatkan sektor ekonomi kreatif	Nilai sektor ekonomi kreatif	Triliun rupiah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	243.014.000	222.568.000	91,59	129.099.400	124.109.700	96,13	229.232.810	225.230.610	98,25
				Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	174.506.000	141.927.550	81,33	76.640.970	67.292.300	87,80	100.000.000	74.853.800	74,85
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	400.000.000	387.193.320	96,80	67.252.150	65.798.960	97,84	100.000.000	71.435.640	71,44
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	898.390.200	882.314.850	98,21	401.133.960	382.026.330	95,24	227.312.810	207.890.520	91,46
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	727.086.000	674.976.700	92,83	227.292.356	213.429.130	93,90	562.299.300	553.657.170	98,46
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	778.090.000	728.732.800	93,66	521.457.350	486.895.560	93,37	1.064.471.150	1.021.524.210	95,97
				Program Pengembangan UMKM	1.038.934.000	958.672.838	92,27	822.947.090	804.335.700	97,74	1.229.661.610	1.203.525.620	97,87

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.930.959.700	1.890.193.800	97,89	1.449.646.120	1.347.322.000	92,94	2.340.753.120	2.268.032.800	96,89
				Program Pemasaran Pariwisata	339.682.000	337.612.000	99,39	980.808.000	933.877.100	95,22	530.838.800	495.544.600	93,35
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	136.275.000	134.836.000	98,94	120.132.130	116.340.000	96,84	140.962.200	139.332.800	98,84
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.342.518.000	1.322.918.000	98,54	2.360.746.760	2.348.441.260	99,48	2.143.913.400	2.099.665.500	97,94
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	729.372.046	603.930.349	82,80	1.261.700.657	1.249.895.250	99,06	1.443.433.443	1.359.453.780	94,18
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	90.288.000	87.227.300	96,61	297.133.350	295.121.050	99,32	732.964.122	731.152.200	99,75
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	313.165.000	257.122.000	82,10	154.380.980	132.423.000	85,78	133.715.350	127.797.000	95,57
11	Meningkatkan Investasi	Nilai investasi tahunan	Triliun rupiah	Program Promosi Penanaman Modal	486.797.080	475.462.270	97,67	547.961.400	533.063.932	97,28	932.844.800	927.008.000	99,37

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				Program Pelayanan Penanaman Modal	915.997.800	814.136.000	88,88	1.374.792.110	1.278.119.570	92,97	690.947.750	669.364.546	96,88
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	383.914.000	355.111.800	92,50	281.700.000	277.595.800	98,54	457.630.000	446.804.075	97,63
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	240.000.000	205.318.000	85,55	64.417.360	36.530.760	56,71	50.000.000	47.810.000	95,62
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	37.452.620	36.732.620	98,08	58.637.600	56.892.600	97,02	98.240.521	94.415.000	96,11
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.910.804.477	1.559.343.386	81,61	1.959.363.595	1.821.892.004	92,98	1.686.130.964	1.608.493.153	95,40
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.541.506.785	854.988.361	55,46	311.734.000	310.661.000	99,66	379.182.602	367.361.840	96,88
				Program Pengembangan Ekspor	486.891.500	427.912.000	87,89	544.557.850	518.395.250	95,20	396.633.860	355.854.400	89,72
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	157.445.055	146.684.097	93,17	225.915.200	213.856.684	94,66	157.852.600	154.241.000	97,71

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	269.104.890	199.881.000	74,28	185.500.500	146.452.900	78,95	108.265.840	102.756.400	94,91
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.204.185.190	1.112.373.739	92,38	1.514.025.800	1.452.589.660	95,94	2.257.519.339	2.159.031.800	95,64
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	15.620.800	15.620.800	100,00	14.603.920	14.579.200	99,83	15.763.800	15.763.800	100,00
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	61.504.900	58.849.640	95,68	300.354.000	289.705.999	96,45	129.478.800	128.511.800	99,25
12	Meningkatkan produktifitas tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja per total output	Rupiah	Program Perencanaan Tenaga Kerja	36.776.000	22.006.000	59,84	44.805.000	12.170.000	27,16	25.000.000	20.850.000	83,40
		Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa	Rupiah	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.947.283.197	3.752.707.997	95,07	2.033.199.598	2.021.047.500	99,40	2.899.732.500	2.869.880.600	98,97
				Program Penempatan Tenaga Kerja	1.350.370.400	1.166.100.550	86,35	624.569.630	454.940.450	72,84	803.740.000	788.615.000	98,12
				Program Hubungan Industrial	1.440.609.000	1.020.425.623	70,83	559.453.502	542.982.200	97,06	812.334.000	778.225.000	95,80

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
13	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	323.648.200	317.624.050	98,14	1.381.740.953	1.361.575.800	98,54	1.294.784.384	1.263.869.800	97,61
				Program Penyuluhan Pertanian	217.084.292	178.462.132	82,21	1.077.615.966	1.034.573.820	96,01	1.258.251.834	1.209.859.500	96,15
		Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat	Program Pendaftaran Penduduk	1.140.648.400	1.091.730.000	95,71	258.306.000	258.256.000	99,98	292.510.000	288.195.600	98,53
		Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Poin	Program Pencatatan Sipil	100.000.000	98.280.200	98,28	184.100.000	175.404.700	95,28	148.000.000	145.091.000	98,03
		Opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah	Predikat	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	125.000.000	124.523.000	99,62	260.000.000	226.102.100	86,96	296.922.400	288.473.600	97,15
		Indeks persepsi korupsi	Poin	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	-	-	-	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000	9.952.000	99,52
		Indeks kepuasan masyarakat	Poin	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	11.048.189.550	10.910.162.640	98,75	12.032.782.200	11.933.847.000	99,18	16.040.950.000	15.925.307.740	99,28
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	32.209.474.047	31.651.374.035	98,27	46.660.276.381	45.846.356.880	98,26	47.939.135.728	47.482.079.000	99,05

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	598.607.000	560.431.531	93,62	401.199.790	398.195.790	99,25	243.062.400	242.757.400	99,87
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	615.699.600	586.494.030	95,26	565.653.000	553.215.400	97,80	408.685.000	404.652.900	99,01
				Program Pembinaan Perpustakaan	3.012.352.719	2.878.076.960	95,54	1.779.979.520	1.630.529.590	91,60	924.129.480	883.361.280	95,59
				Program Pengelolaan Arsip	764.914.700	722.795.700	94,49	564.625.400	480.100.400	85,03	1.057.815.000	1.048.514.000	99,12
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	3.988.000	3.987.000	99,97	15.106.600	15.060.600	99,70	40.003.000	40.003.000	100,00
				Program Perizinan Penggunaan Arsip	28.546.000	28.546.000	100,00	52.429.600	49.524.600	94,46	64.440.000	64.440.000	100,00
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	23.511.736.850	22.111.837.528	94,05	31.466.246.896	29.136.113.433	92,59	46.511.563.376	44.665.456.721	96,03
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.048.706.000	3.401.384.784	84,01	4.011.419.000	3.788.456.800	94,44	6.459.256.339	5.208.034.440	80,63
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	46.394.573.222	32.295.543.503	69,61	42.947.546.776	37.304.474.787	86,86	54.633.439.898	41.824.014.978	76,55

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.940.189.900	1.679.906.500	86,58	3.362.501.430	3.116.664.400	92,69	4.325.014.500	4.016.174.392	92,86
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.542.821.100	1.394.506.250	90,39	1.834.497.360	1.626.113.570	88,64	3.044.040.000	2.743.697.858	90,13
				Program Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah	27.716.313.440	16.642.676.857	60,05	31.553.876.977	26.194.368.708	83,01	9.839.508.274	6.402.622.214	65,07
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.617.580.645	3.310.022.335	71,68	5.878.169.610	4.451.194.988	75,72	5.220.699.634	4.728.019.432	90,56
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.361.182.001	7.625.595.965	91,20	9.857.261.962	9.270.228.575	94,04	9.716.533.919	9.387.548.000	96,61
				Program Kepegawaian Daerah	4.956.922.300	4.626.038.221	93,32	6.006.977.077	5.413.606.782	90,12	3.848.555.410	3.814.454.585	99,11
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.192.908.000	4.007.983.573	95,59	6.142.071.820	5.696.361.166	92,74	3.574.039.150	3.513.210.000	98,30
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.293.414.400	881.272.900	68,14	1.247.592.970	1.043.820.180	83,67	1.669.590.000	1.561.259.900	93,51
				Program Penyelenggara n Pengawasan	532.225.900	526.570.600	98,94	1.051.619.800	1.015.607.800	96,58	721.370.650	700.917.600	97,16

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.014.789.970	906.971.700	89,38	600.373.580	535.987.550	89,28	475.018.768	447.456.000	94,20
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	6.649.751.800	6.618.216.476	99,53	66.387.582.094	64.031.103.812	96,45	81.085.073.965	78.620.623.396	96,96
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.638.672.657	4.066.817.628	87,67	49.715.248.841	44.503.429.471	89,52	68.287.212.994	58.281.849.891	85,35
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	350.592.595	350.425.588	99,95	3.372.004.140	3.267.828.582	96,91	4.841.601.385	4.481.435.796	92,56
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.844.456.486.424	1.667.782.320.377	90,42	1.931.009.508.438	1.823.935.258.644	94,46	2.100.045.917.386	2.021.058.154.594	96,45
				Total	4.030.749.162.663	3.690.662.680.744	91,56	4.593.816.184.222	4.410.022.651.215	96,00	4.761.432.017.480	4.605.246.008.601	96,72

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (LRA 31 Desember 2024), Hasil Analisis Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Tangerang Selatan menggambarkan capaian kinerja pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kinerja pemerintah daerah menunjukkan tren positif, yang ditandai dengan meningkatkan berbagai indikator pembangunan, seperti indeks pembangunan manusia, indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar, kota layak huni, indeks daya saing daerah dan indeks reformasi birokrasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti ketimpangan infrastruktur, efisiensi anggaran yang perlu dioptimalkan, serta tantangan dalam digitalisasi layanan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya strategis, seperti penguatan tata kelola birokrasi, percepatan reformasi digital, serta peningkatan koordinasi lintas sektor guna memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang ditandatangani oleh Wali Kota Tangerang Selatan, telah ditetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target yang harus dicapai oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024. Dalam PK tahun 2024, terdapat 29 indikator yang terdiri dari 5 indikator tujuan dan 24 indikator sasaran.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa secara umum, pencapaian kinerja tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 104,45%. Beberapa indikator kinerja sasaran dan program-program yang telah dilaksanakan menunjukkan hasil yang positif, mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari perencanaan yang matang, koordinasi antar perangkat daerah yang efektif, serta komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Meski demikian, masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target, seperti angka harapan hidup yang sedikit belum memenuhi sasaran, dan beberapa sektor yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun rincian capaian kinerja tujuan utama Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024, dijelaskan sebagai berikut.

1. Capaian tujuan 1: indeks pembangunan manusia di Kota Tangerang Selatan telah memenuhi target dengan nilai 84,16%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 83,70%, sehingga tingkat pencapaian kinerja mencapai 100,55%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa indikator kinerja sasaran yang juga menunjukkan pencapaian yang tinggi. Indeks pendidikan mencapai 80,83% sesuai dengan target yang ditetapkan, sementara angka harapan hidup mencapai 75,80 tahun, atau 99,95% dari target 75,84 tahun. Selain itu, indeks pembangunan keluarga berhasil mencapai kategori sangat baik (84,16) melebihi target baik (70) dengan capaian 120,23% dan indeks pembangunan pemuda melebihi target dengan capaian 55,86 poin dari target 55,00 poin dengan capaian 101,56%. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya mencapai target, seperti indeks pembangunan gender yang mencapai 93,96 poin dari target 94,53 poin dengan capaian 99,40% serta indeks pemberdayaan gender yang

mencapai 72,67 poin dari target 73,86 poin dengan capaian 98,39%. Secara keseluruhan, pencapaian tujuan 1 menunjukkan tren positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Tangerang Selatan, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyempurnakan beberapa aspek terkait pembangunan gender dan kesejahteraan sosial.

2. Capaian tujuan 2: meningkatkan kepuasan layanan infrastruktur dasar di Kota Tangerang Selatan telah melampaui target dengan nilai indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar sebesar 8,29 poin, dari target 7,03 poin, sehingga pencapaian kinerjanya mencapai 117,92%. Keberhasilan ini didukung oleh indikator sasaran lainnya, yaitu rasio konektivitas kota yang mencapai 0,93, melebihi target 0,89 dengan tingkat pencapaian 104,49%, serta kinerja lalu lintas/transportasi kota (*v/c Ratio*) yang mencapai 0,54, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan capaian 100%. Pencapaian yang tinggi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas infrastruktur dasar, konektivitas, serta sistem transportasi di Kota Tangerang Selatan telah berjalan secara efektif. Meskipun demikian, keberlanjutan pengembangan infrastruktur dan transportasi tetap diperlukan untuk menjaga kualitas layanan dan mengantisipasi pertumbuhan kota yang semakin pesat.
3. Capaian indeks kota layak huni di Kota Tangerang Selatan belum memenuhi target, dengan nilai 70,03 poin dari target 71,77 poin, sehingga tingkat pencapaiannya adalah 97,58%. Meskipun demikian, beberapa indikator sasaran menunjukkan pencapaian yang positif, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Beberapa indikator yang berhasil mencapai atau melampaui target antara lain:
 - indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 61,03 poin dari target 60,66 poin dengan capaian sebesar 100,61%;
 - persentase pemukiman layak huni mencapai 99,6% dari target 99,69% dengan capaian sebesar 99,91%;
 - cakupan pengelolaan sampah sebesar 99,54% dari target 100% dengan capaian sebesar 99,54%;
 - ruang terbuka hijau publik mencapai 8%, dari target 4,59% dengan capaian sebesar 174,29%;
 - indeks rasa aman mencapai 66,97 dari target 66,97 dengan capaian 100%; dan
 - indeks demokrasi mencapai kategori tinggi (86,04), dari target baik (81) dengan capaian 106,22%.

Akan tetapi, terdapat indikator yang belum memenuhi target secara signifikan, yaitu indeks risiko bencana yang berada dalam kategori sedang (68,10), sedangkan targetnya adalah rendah (60), sehingga tingkat pencapaiannya 86,5%. Secara keseluruhan, meskipun beberapa indikator menunjukkan hasil positif, pencapaian indeks kota layak huni belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan risiko bencana, penguatan sistem tata kota yang lebih adaptif, serta peningkatan strategi mitigasi lingkungan dan infrastruktur untuk menciptakan kota yang lebih layak huni dan berkelanjutan.

4. Tujuan 4: indeks daya saing daerah telah berhasil memenuhi target dengan nilai capaian indikator sebesar 3,81 yang berada dalam kategori sangat tinggi, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan meningkatkan daya saing ekonomi Kota Tangerang Selatan dalam berbagai aspek, termasuk investasi, produktivitas tenaga kerja, dan penguatan sektor ekonomi kreatif.

Berikut adalah rincian pencapaian indikator sasaran yang mendukung keberhasilan tujuan ini:

- nilai sektor ekonomi kreatif mencapai Rp14,68 triliun dari target Rp14,68 triliun, dengan capaian telah mencapai target yang ditetapkan 100%;
 - nilai investasi tahunan mencapai Rp8,47 triliun, melampaui target Rp7,44 triliun, dengan capaian sebesar 113,84%, menunjukkan peningkatan minat investor terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah ini;
 - produktivitas tenaga kerja per total *output* mencapai Rp186.503.283, 34 melampaui target yang telah ditentukan sebesar Rp169.838.260 dengan capaian 109,81%; dan
 - produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa mencapai Rp118.560.769,91 melampaui target yang telah ditentukan sebesar Rp109.284.473 dengan capaian 108,49%.
5. Capaian tujuan 5: mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien : berhasil memenuhi target dengan nilai capaian indikator 85,61, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 76,79 dengan capaian 111,49%. Keberhasilan ini mencerminkan kemajuan dalam memperbaiki kualitas birokrasi di Kota Tangerang Selatan, baik dari sisi akuntabilitas, transparansi, integritas, maupun kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Berikut adalah rincian pencapaian indikator sasaran yang mendukung keberhasilan tujuan ini:
- nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencapai B (69,06) dari target BB dengan capaian sebesar 98,66% sehingga, indikator ini telah memenuhi target;
 - nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah mencapai 3,54 poin dari target adalah 4 poin, dengan capaian sebesar 88,50% menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah telah berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan capaian 100% dari target, yang mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan;
 - indeks persepsi korupsi/survei penilaian integritas yang dikeluarkan oleh KPK RI mencapai 76,25 poin, sementara target adalah 84,00 Poin, dengan capaian 90,77%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam upaya memperbaiki persepsi integritas di mata publik; dan
 - indeks kepuasan masyarakat mencapai 90,25 poin dari target 89,87 poin, dengan capaian sebesar 100,42%, yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap layanan publik.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

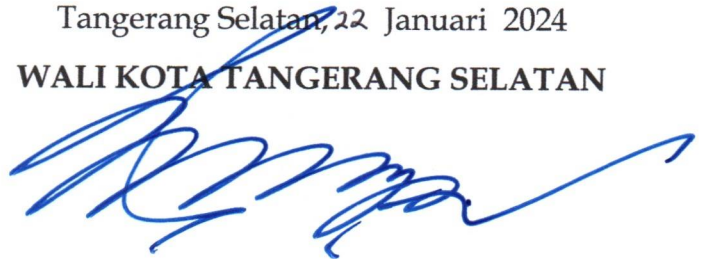
Nama : **BENYAMIN DAVNIE**
Jabatan : **WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2024 sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tangerang Selatan, 22 Januari 2024

WALI KOTA TANGERANG SELATAN



BENYAMIN DAVNIE

Lampiran.

1. VISI dan MISI

a. VISI KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021-2026

“TERWUJUDNYA TANGSEL UNGGUL MENUJU KOTA LESTARI, SALING TERKONEKSI, EFEKTIF DAN EFISIEN”

b. MISI KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021-2026

UPAYA UNTUK MENCAPAI VISI, AKAN DICAPAI MELALUI 5 (LIMA) MISI PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
2. Pembangunan infrastruktur yang saling terkoneksi mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing.
3. Membangun kota yang lestari.
4. Meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi di sektor ekonomi kreatif.
5. Membangun birokrasi yang efektif dan efisien.

2. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS , ARAH KEBIJAKAN DAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

a. TUJUAN PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 - 2026, SEBAGAI BERIKUT:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.
3. Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni.
4. Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah.
5. Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

b. SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 - 2026, SEBAGAI BERIKUT:

BERDASARKAN MASING-MASING TUJUAN, DITETAPKAN SASARAN STRATEGIS UNTUK KUANTIFIKASI LEBIH LANJUT DAN LEBIH TEKNIS AGAR DAPAT DIKELOLA PENCAPAIANNYA SEBAGAI BERIKUT:

- 1. Meningkatnya kualitas layanan dan akses Pendidikan.
- 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- 3. Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
- 4. Meningkatkan daya saing pemuda.
- 5. Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender.
- 6. Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan.
- 7. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan.
- 8. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan.
- 9. Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan non-Alam.
- 10. Meningkatnya sektor ekonomi kreatif.
- 11. Meningkatnya Investasi.
- 12. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.
- 13. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

c. **ARAH KEBIJAKAN** PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024 YAITU “PENINGKATAN KUALITAS TANGSEL UNGGUL, INOVATIF, LAYAK HUNI”.

d. **TARGET KINERJA DAERAH** TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	82,40
	Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	%	80,83
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	Tahun	73,22
	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Predikat)	Predikat	Baik

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
	Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	53,8
	Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,53
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	73,86
Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.		Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	Poin	5,80
	Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Rasio konektivitas Kota	Rasio	0,74
		Kinerja Lalu lintas/ Transportasi Kota (V/C Ratio)	Rasio	0,5
Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni		Indeks kota layak huni	Poin	71,77
	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,66
		Persentase permukiman layak huni (Persen)	%	99,69%
		Cakupan Pengelolaan Sampah (Persen)	%	96,00%
		Ruang Terbuka Hijau Publik (Persen)	%	4,59%
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan	Indeks Rasa Aman (Predikat)	Predikat	Aman
		Indeks Demokrasi (Predikat)	Predikat	Baik (81)
	Meningkatnya pencegahan dan Penanganan	Indeks resiko bencana (Predikat)	Predikat	Rendah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
	Bencana Alam dan Non Alam			
Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah		Indeks Daya Saing Daerah (Predikat)	Predikat	Tinggi (3,75)
	Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	Nilai sektor ekonomi kreatif	(Triliun Rupiah)	9,36
	Meningkatnya Investasi	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	(Triliun Rupiah)	4,9
	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja per total output (Rupiah)	(Rupiah)	88.439.806
		Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa (Rupiah)	(Rupiah)	90.476.066
Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	67
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	BB
		Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Poin	4
		Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah	Predikat	WTP
		Indeks Persepsi Korupsi	Poin	84
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
1	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG UNGGUL					
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
			Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan			
				1.01. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	273.397.357.755
					1.01.03. Program Pengembangan Kurikulum	317.927.000
					1.01.04. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	75.478.942.090
				2.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.22.02. Program Pengembangan Kebudayaan	1.200.000.000
					2.22.03. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	950.200.000
					2.22.05. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	197.356.000
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			
				1.02. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	241.483.962.733
					1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.149.346.482
					1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	712.197.000
					1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	9.991.408.000
				3.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27.04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	482.573.462
			Meningkatnya kesejahteraan keluarga			
				2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02. Program Pengendalian Penduduk	416.400.000
					2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.332.028.000
					2.14.04. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.976.041.320
				2.09. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.09.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	71.186.000
					2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.779.943.698
					2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan	353.547.000
					2.09.05. Program Pengawasan Keamanan Pangan	188.453.000
				1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial	903.518.140
					1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial	1.142.245.252
					1.06.05. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	861.976.250
			Meningkatkan daya saing pemuda			
				2.19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan	2.19.02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.151.500.000
					2.19.03. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	28.064.075.000
					2.19.04. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.050.000.000
			Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender			
				2.08. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	843.550.000
					2.08.03. Program Perlindungan Perempuan	604.647.200
					2.08.04. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.219.281.000
					2.08.05. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	65.000.000
					2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	329.690.000
					2.08.07. Program Perlindungan Khusus Anak	650.604.460

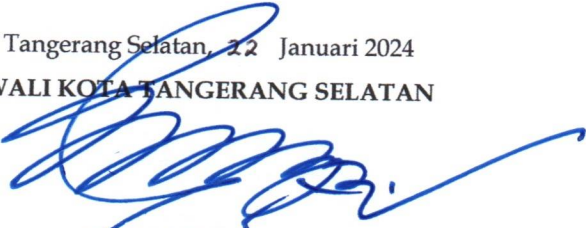
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
2	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG SALING TERKONEKSI					
		Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.				
			Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan			
				2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	88.303.210.431
				1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10. Program Penyelenggaraan Jalan	220.353.528.276
3	MEMBANGUN KOTA YANG LESTARI					
		Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni				
			Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan			
				1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	27.302.241.300
					1.03.05. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	24.562.943.383
					1.03.08. Program Penataan Bangunan Gedung	371.016.523.180
					1.03.09. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.909.311.525
					1.03.11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.036.418.380
					1.03.12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.008.800.100
				1.04. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.04.02. Program Pengembangan Perumahan	2.494.102.890
					1.04.03. Program Kawasan Permukiman	46.964.151.841
					1.04.04. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	37.471.826.200
					1.04.05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	237.335.858.375
				2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.02. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.984.992.283
					2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.754.186.490
					2.11.04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	22.566.562.382
					2.11.05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	307.923.000
					2.11.06. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	252.221.000
					2.11.08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	192.682.287
					2.11.09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	577.442.612
					2.11.10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	370.000.000
					2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan	112.258.838.812
				2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2.10.10. Program Penatagunaan Tanah	186.487.000
				1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.07. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	249.444.250

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan			
				1.05. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.05.02. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.050.345.340
				7.01. Kecamatan	7.01.04. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.650.912.000
				8.01. Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.086.013.700
					8.01.03. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	50.720.299.605
					8.01.04. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	487.677.350
					8.01.05. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.019.041.890
					8.01.06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.061.341.808
			Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam			
				1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	146.333.545.127
					1.03.06. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	82.566.736.402
				1.05. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.05.03. Program Penanggulangan Bencana	4.589.770.510
					1.05.04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	11.597.869.660
				1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.06. Program Penanganan Bencana	4.327.021.278
4	MENINGKATKAN EKONOMI BERBASIS NILAI TAMBAH TINGGI DI SEKTOR EKONOMI KREATIF					
		Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah				
		Meningkatnya sektor ekonomi kreatif				
			2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	2.17.02. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	268.230.000	
				2.17.03. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100.000.000	
				2.17.04. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100.000.000	
				2.17.05. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	239.822.903	
				2.17.06. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	670.999.900	
				2.17.07. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.466.749.900	
				2.17.08. Program Pengembangan UMKM	1.492.672.780	
				3.26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3.26.02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.682.773.220
			3.26.03. Program Pemasaran Pariwisata		550.049.800	
			3.26.04. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		130.896.640	
			3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1.516.900.000	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
				3.25. Urusan Pemerintahan	3.25.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.536.745.570
				Bidang Kelautan dan Perikanan	3.25.06. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	771.438.220
				Meningkatnya Investasi		
				2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	113.715.350
					2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal	744.121.800
					2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal	690.947.750
					2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	457.630.000
					2.18.06. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	50.000.000
				3.30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	3.30.02. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	131.820.540
					3.30.03. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.659.393.918
					3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	407.307.602
					3.30.05. Program Pengembangan Ekspor	374.133.860
					3.30.06. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	164.152.600
					3.30.07. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	129.181.840
					3.31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3.31.02. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
					3.31.03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	18.763.800
					3.31.04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	129.478.800
				Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		
				2.07. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2.07.02. Program Perencanaan Tenaga Kerja	25.000.000
					2.07.03. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.931.230.000
					2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja	970.000.000
					2.07.05. Program Hubungan Industrial	908.132.000
				3.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27.02. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.369.882.160
					3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian	1.102.339.536
5	MEMBANGUN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN					
	Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah					
				2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk	292.510.000
					2.12.03. Program Pencatatan Sipil	148.000.000
					2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	296.922.400
					2.12.05. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	10.000.000
				2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	2.16.02. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	11.060.950.000
					2.16.03. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	37.481.734.028
				2.20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	223.062.400
				2.21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	307.500.000
				2.23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan	949.617.000

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
				2.24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2.24.02. Program Pengelolaan Arsip	1.092.403.000
					2.24.03. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	40.003.000
					2.24.04. Program Perizinan Penggunaan Arsip	74.355.000
				4.01. Sekretariat Daerah	4.01.02. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	40.296.583.210
					4.01.03. Program Perekonomian dan Pembangunan	4.675.794.340
				4.02. Sekretariat DPRD	4.02.02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	52.005.152.600
				5.01. Perencanaan	5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.440.838.500
					5.01.03. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.100.000.000
				5.02. Keuangan	5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	9.914.631.941
					5.02.03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.460.035.083
					5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.810.517.979
				5.03. Kepegawaian	5.03.02. Program Kepegawaian Daerah	4.187.711.010
				5.04. Pendidikan Dan Pelatihan	5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.019.820.640
				5.05. Penelitian Dan Pengembangan	5.05.02. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.399.990.000
				6.01. Inspektorat Daerah	6.01.02. Program Penyelenggaraan Pengawasan	798.409.400
					6.01.03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	165.467.500
				7.01. Kecamatan	7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	63.180.575.346
					7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70.528.692.546
					7.01.05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.709.800.000
				Seluruh Urusan	xx.xx.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.045.929.199.856
Jumlah						4.573.597.534.116

Tangerang Selatan, 22 Januari 2024
WALI KOTA TANGERANG SELATAN

BENYAMIN DAVNIE



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BENYAMIN DAVNIE**
Jabatan : **WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2024 sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tangerang Selatan, 24 September 2024

WALI KOTA TANGERANG SELATAN



BENYAMIN DAVNIE

Lampiran.

1. VISI dan MISI

a. VISI KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021-2026

“TERWUJUDNYA TANGSEL UNGGUL MENUJU KOTA LESTARI, SALING TERKONEKSI, EFEKTIF DAN EFISIEN”

b. MISI KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021-2026

UPAYA UNTUK MENCAPAI VISI, AKAN DICAPAI MELALUI 5 (LIMA) MISI PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
2. Pembangunan infrastruktur yang saling terkoneksi mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing.
3. Membangun kota yang lestari.
4. Meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi di sektor ekonomi kreatif.
5. Membangun birokrasi yang efektif dan efisien.

2. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

a. TUJUAN PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 – 2026, SEBAGAI BERIKUT:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.
3. Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni.
4. Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah.
5. Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

b. SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 – 2026, SEBAGAI BERIKUT:

BERDASARKAN MASING-MASING TUJUAN, DITETAPKAN SASARAN STRATEGIS UNTUK KUANTIFIKASI LEBIH LANJUT DAN LEBIH TEKNIS AGAR DAPAT DIKELOLA PENCAPAIANNYA SEBAGAI BERIKUT:

1. Meningkatnya kualitas layanan dan akses Pendidikan.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
4. Meningkatkan daya saing pemuda.
5. Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender.
6. Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan.
7. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan.
8. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan.
9. Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan non-Alam.
10. Meningkatnya sektor ekonomi kreatif.
11. Meningkatnya Investasi.
12. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.
13. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

c. **ARAH KEBIJAKAN** PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024 YAITU “*PENINGKATAN KUALITAS TANGSEL UNGGUL, INOVATIF, LAYAK HUNI*”.

d. TARGET KINERJA DAERAH TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	83,70
	Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	%	80,83
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	Tahun	75,84
	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Predikat)	Predikat	Baik (70)
	Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	55,00
	Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,53
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	73,86

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024**

4

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	BB
		Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Poin	4,00
		Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah	Predikat	WTP
		Indeks Persepsi Korupsi	Poin	84,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	89,87

Tangerang Selatan, 24 September 2024

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

BENYAMIN DAVNIE

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
1		PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG UNGGUL				
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
		Meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan				
				1.01. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	303.551.487.598
					1.02.03 Program Pengembangan Kurikulum	313.730.000
					1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	70.528.292.090
				2.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	892.138.140
					2.22.03. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	797.356.854
					2.22.05. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	165.556.000
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
				1.02. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	277.214.016.427
					1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.910.557.662
					1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	709.129.000
					1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	15.406.474.700
				3.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27.04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	419.050.322
		Meningkatkan kesejahteraan keluarga				
				2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga	2.14.02. Program Pengendalian Penduduk	362.662.000
					2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.240.170.000
					2.14.04. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.965.485.320
				2.09. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.09.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	68.000.000
					2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.326.437.149
					2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan	340.098.560
					2.09.05. Program Pengawasan Keamanan Pangan	177.946.300
				1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial	748.986.790
					1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial	1.170.879.930
					1.06.05. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	394.021.000
		Meningkatkan daya saing pemuda				

No	Mis i	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
				2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan	2.19.02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.101.500.000
					2.19.03. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	27.754.814.186
					2.19.04. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	991.500.000
			Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender			
				2.08. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.244.315.000
					2.08.03. Program Perlindungan Perempuan	601.607.300
					2.08.04. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.918.140.000
					2.08.05. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	25.040.000
					2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	298.224.200
					2.08.07. Program Perlindungan Khusus Anak	763.560.460
2	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG SALING TERKONEKSI					
		Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.				
			Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan			
				2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	87.682.035.256
				1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	1.03.10. Program Penyelenggaraan Jalan	205.927.234.564
3	MEMBANGUNAN KOTA YANG LESTARI					
		Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.				
			Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan			
				1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.196.517.861
					1.03.05. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	24.004.116.170
					1.03.08. Program Penataan Bangunan Gedung	404.332.375.244
					1.03.09. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	454.645.025
					1.03.11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.033.014.080
					1.03.12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.694.886.550
				1.04. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.02. Program Pengembangan Perumahan	2.360.103.520
					1.04.03. Program Kawasan Permukiman	46.434.838.293
					1.04.04. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	37.521.397.969

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
					1.04.05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	238.206.012.899
				2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.02. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.757.480.634
					2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.723.706.784
					2.11.04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	22.506.548.182
					2.11.05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	233.729.750
					2.11.06. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	226.274.550
					2.11.08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	171.597.787
					2.11.09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	545.218.112
					2.11.10. Program Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	342.084.550
					2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan	111.397.331.557
				2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2.10.10. Program Penatagunaan Tanah	186.487.000
				1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.07. Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	295.480.266
			Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan			
				1.05. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta perlindungan Masyarakat	1.05.02. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.683.476.040
				7.01. Kecamatan	7.01.04. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.368.872.470
				8.01. Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.970.960.030
					8.01.03. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	51.228.784.541

No	Mis i	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)	
					8.01.04. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	508.850.536	
					8.01.05. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	984.494.100	
					8.01.06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	759.868.400	
					Meningkatkan pencegahan dan penanganan bencana dan non alam		
				1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	147.718.120.509	
					1.03.06. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	103.290.696.530	
					1.05. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta perlindungan Masyarakat	1.05.03. Program Penanggulangan Bencana	4.138.960.179
					1.05.04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	12.880.234.529	
					1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.06. Program Penanganan Bencana	4.353.091.133
4	MENINGKATKAN EKONOMI BERBASIS NILAI TAMBAH TINGGI DI SEKTOR EKONOMI KREATIF						
			Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah				
			Meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan				
		2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah	2.17.02. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	229.232.810			
			2.17.03. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100.000.000			
			2.17.04. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100.000.000			
			2.17.05. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	227.312.810			
			2.17.06. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	562.299.300			
			2.17.07. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.064.471.150			
			2.17.08. Program Pengembangan UMKM	1.229.661.610			
			3.26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3.26.02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.340.753.120		
		3.26.03. Program Pemasaran Pariwisata		530.838.800			
		3.26.04. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		140.962.200			
		3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		2.143.913.400			

No	Mis i	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)		
				3.25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	3.25.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.443.433.443		
					2.35.06. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	732.964.122		
			Meningkatkan Investasi					
			2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	133.715.350			
				2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal	932.844.800			
				2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal	690.947.750			
				2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	457.630.000			
				2.18.06. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	50.000.000			
			3.30. Urusan Perumahan Bidang Perdagangan	3.30.02. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	98.240.521,29			
				3.30.03. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.686.130.964			
				3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	379.182.602			
				3.30.05. Program Pengembangan Ekspor	396.633.860			
				3.30.06 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	157.852.600			
				3.30.07. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	108.265.840			
			3.31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3.31.02. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.257.519.339			
				3.31.03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	15.763.800			
				3.31.04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	129.478.800			
			Meningkatkan produktivitas tenaga kerja					
			2.07. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2.07.02. Program Perencanaan Tenaga Kerja	25.000.000			
				2.07.03. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.899.732.500			
				2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja	803.740.000			
				2.07.05. Program Hubungan Industrial	812.334.000			
				3.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27.02. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.294.784.384		
					3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian	1.258.251.834		
5	MEMBANGUN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN							
		Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien						
		Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah						
		2.12. Urusan Pemerintahan	2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk	292.510.000				

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
				Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan	2.12.03. Program Pencatatan Sipil	148.000.000
					2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	296.922.400
					2.12.05. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	10.000.000
				2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi	2.16.02. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	16.040.950.000
					2.16.03. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	47.939.135.728
				2.20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	243.062.400
				2.21. Urusan Pemerintahan Bidang persandian	2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	408.685.000
					2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan	924.129.480
				2.24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2.24.02. Program Pengelolaan Arsip	1.057.815.000
					2.24.03. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	40.003.000
					2.24.04. Program Perizinan Penggunaan Arsip	64.440.000
				4.01. Sekretariat Daerah	4.01.02. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	46.511.563.376
					4.01.03. Program Perekonomian dan Pembangunan	6.459.256.339
				4.02. Sekretariat DPRD	4.02.02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	54.633.439.898
				5.01. Perencanaan	5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.325.014.500
					5.01.03. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.044.040.000
				5.02. Keuangan	5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	9.839.508.274
					5.02.03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.220.699.634
					5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.716.533.919
				5.03. Kepegawaian	5.03.02. Program Kepegawaian Daerah	3.848.555.410
				5.04. Pendidikan dan Pelatihan	5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.574.039.150
				5.05. Penelitian dan Pengembangan	5.05.02. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.669.590.000
				6.01. Inspektorat Daerah	6.01.02. Program Penyelenggaraan Pengawasan	721.370.650
					6.01.03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	475.018.768
				7.01. Kecamatan	7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81.085.073.965

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
					7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	68.287.212.994
					7.01.05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.841.601.385
				Seluruh Urusan	xx.xx.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.100.045.017.480
Total						4.761.432.017.480

Tangerang Selatan, 24 September 2024
WALI KOTA TANGERANG SELATAN



BENYAMIN DAVNIE



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

INSPEKTORAT

Komplek Puspemkot Tangerang Selatan, Gedung II Lt. 5, Jalan Raya Maruga No. 1,
Serua - Ciputat

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

Kami telah mereviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tangerang Selatan, 20 Maret 2025

INSPEKTUR,


Ir. H. ACHMAD ZUBAIR, M.Si, CGCAE
NIP. 19700326 199803 1 006